

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 15
TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM BANYUWANGI
CERDAS DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENJAMINAN KELANGSUNGAN PENDIDIKAN**

(Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi

Pada Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

SITI KURNIA PUTRI

NIM.125030506111001



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2018**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013
Tentang Program Banyuwangi Cerdas Dalam Rangka
Mendukung Penjaminan Kelangsungan Pendidikan (Studi
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Disusun oleh : Siti Kurnia Putri

NIM : 125030506111001

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

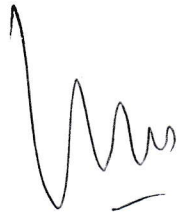
Minat : Administrasi Pemerintahan

Malang, 27 Maret 2018

Menyetujui

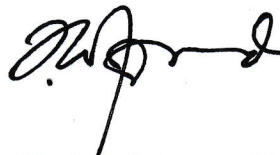
Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Irwan Noor, MA
NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota



Dr. Endah Setyowati, M.Si
NIP. 19710505 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Mei 2018
Jam : 10.00 – 11.00
Skripsi atas nama : Siti Kurnia Putri
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 Tentang
Program Banyuwangi Cerdas Dalam Rangka Mendukung
Penjaminan Kelangsungan Pendidikan (Studi Pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Malang, 22 Mei 2018

Dan Dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Irwan Noor, MA
NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota



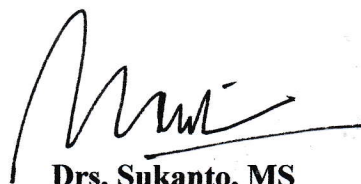
Dr. Endah Setyowati, M.Si
NIP. 19710505 199903 2 001

Anggota



Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota



Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 27 Maret 2018



Siti Kurnia Putri
NIM. 125030506111001

CURRICULUMVITAE

Nama : Siti Kurnia Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 125030506111001

Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 28 April 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

E-mail : kputri60@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 2 Temuguruh 2006
2. SMP Negeri 1 Sempu 2009
3. SMA Negeri 1 Rogojampi 2012
4. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 2018



RINGKASAN

Siti Kurnia Putri. 2018. *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas Dalam Rangka Mendukung Penjaminan Kelangsungan Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi)*. Dr. Irwan Noor, MA, Dr. Endah Setyowati, M.Si. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. 177 hal+

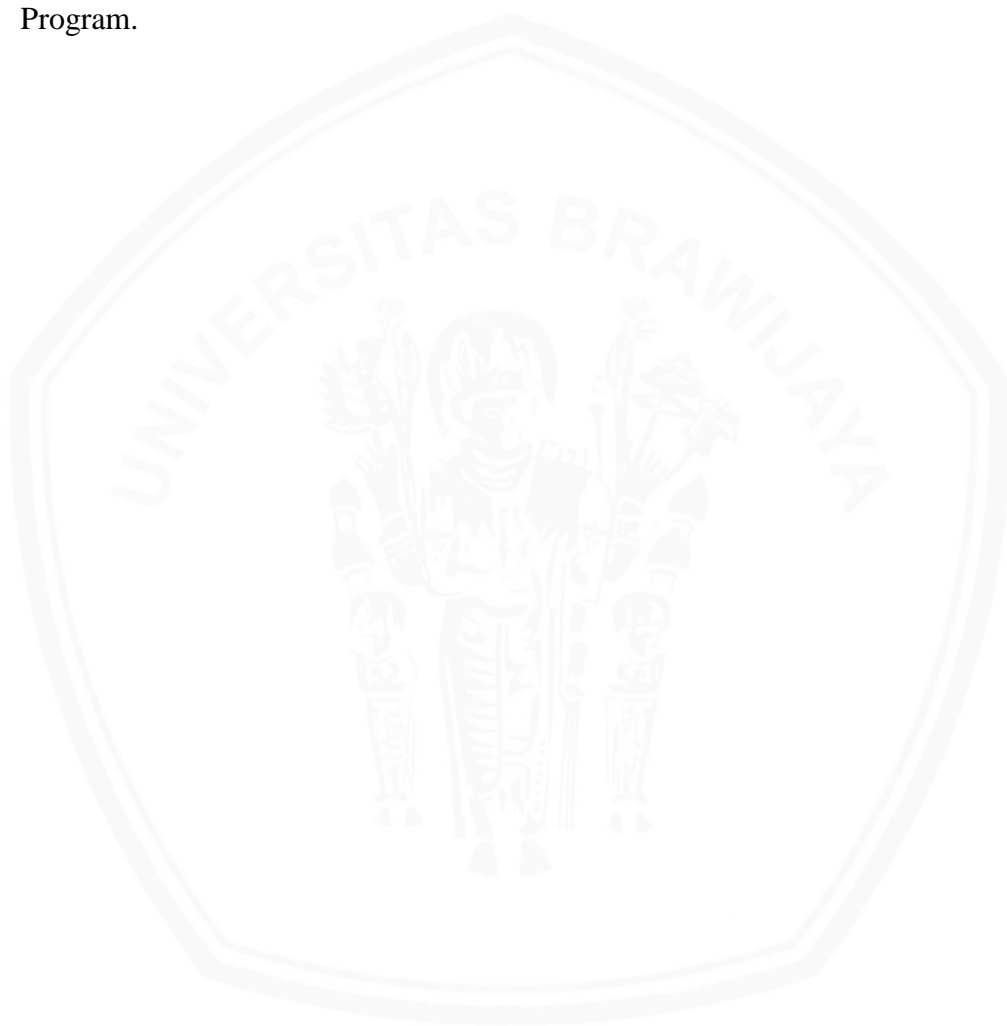
Penelitian ini dilakukan atas dasar meningkatnya persentase tidak atau belum sekolah di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 sampai 2015 yakni, 8,92% tahun 2011, 6,47% tahun 2012, 6,40,% tahun 2013, 5,89% tahun 2014, dan 8,64 pada tahun 2015. Menanggulangi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas. Tujuan dari program banyuwangi cerdas itu sendiri adalah untuk mendukung penjaminan kelangsungan pendidikan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, penerima bantuan program banyuwangi cerdas, dan masyarakat. Lokasi penelitian, berlokasi di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan program banyuwangi cerdas dan faktor penghambat dari implemenasi program banyuwangi cerdas. Hasil penelitian dituangkan pada model implementasi ambiguitas konflik Matland dan sebagai penunjang indikator efektivitas menggunakan Nugroho. Analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sudah mengimplementasikan kebijakan program banyuwangi cerdas. Hal ini dilihat dari 4 tahapan pelaksanaan diantaranya sosialisasi dan penetapan penerima, pengalokasian dana dan pencairan dana, laporan pertanggungjawaban, dan monitoring. Namun dalam pelaksanaannya belum efektif karena belum terpenuhinya 5 ketepatan indikator efektif dalam pelaksanaan kebijakan program banyuwangi cerdas terkait proses pencairan dana beasiswa. Sedangkan untuk faktor pendukung dalam keberhasilan program banyuwangi cerdas yaitu besarnya dana alokasi APBD yang dialokasikan. Serta adanya dukungan dari 3 sektor utama yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta sebagai pihak ketiga yang tidak mengikat. Untuk faktor penghambat yang mempengaruhi program banyuwangi cerdas yaitu keterlambatan pencairan dana beasiswa, budaya penikahan dini serta minimnya jumlah universitas yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga banyak siswa yang mengurungkan niatnya karena tidak sesuai dengan jurusan yang diinginkan.

Saran untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang pertama, perlu penyusunan jadwal pencairan dana dengan koordinasi ulang supaya pelaksanaan pencairan dana lebih terjadwal, berjalan cepat dan tepat waktunya. Kedua, merubah pola pikir masyarakat desa melalui pendekatan langsung yang dilakukan oleh relawan dari kebijakan program banyuwangi cerdas (DETAS). Tiga, segera menjalin koordinasi dengan perguruan tinggi lainnya.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Program Banyuwangi Cerdas, Implementasi Program.



SUMMARY

Siti Kurnia Putri. 2018. *The Implementation of the Regents Rules No. 15 of 2013 on Program of Smart City Banyuwangi in Supporting the Education Continuity Insurance (Study at the Department of Education in Banyuwangi Regency)*. Dr. Irwan Noor, MA, Dr. Endah Setyowati, M.Si. department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, University of Brawijaya. Page 177.

This research was conducted on the basis of the increase of non-schooling percentage in Banyuwangi District from 2011 to 2015 ie 8.92% in 2011, 6.47% in 2012, 6.40% in 2013, 5.89% in 2014, and 8.64 in 2015. Tackling the problem, the Government of Banyuwangi Regency issued a policy stipulated under Regulation No. 15 of 2013 on program of smart city banyuwangi. The objective of this program of smart city banyuwangi is to support the education continuity insurance in the community of Banyuwangi Regency.

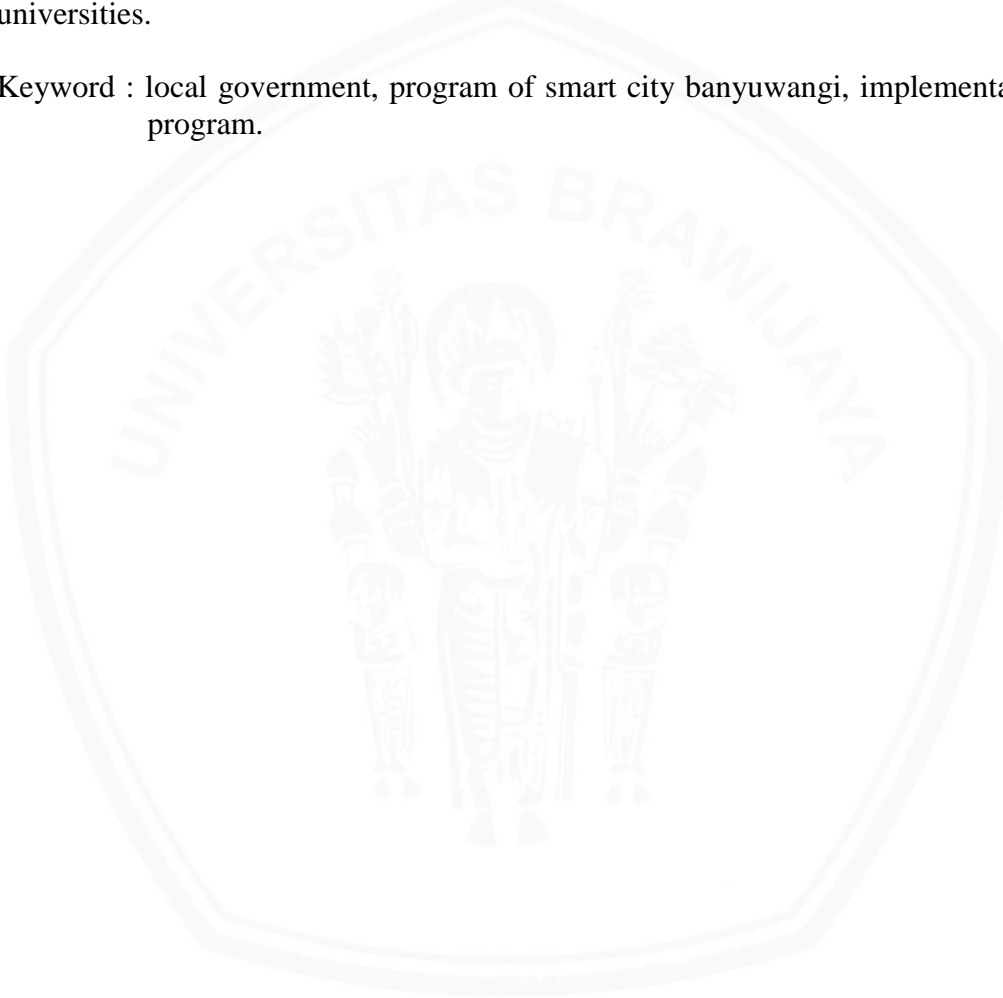
This research uses qualitative research method with descriptive approach. Technique of data collection is conducted by interview and documentation to the department of education in banyuwangi regency, beneficiaries of the program of smart city banyuwangi, and the community. The research location, located in Banyuwangi District. This research focuses on the policy of implementation of the program of smart city banyuwangi and inhibiting factor from the implementation of program of smart city banyuwangi. The result of the research is written on the implementation model of ambiguity of Matland conflict and as supporting the effectiveness indicator using Nugroho. Data analysis using interactive model from Miles, Huberman and Saldana, these are the data condensation, data presentation and conclusion.

The result of this study indicate that Banyuwangi District Education Office has implemented a smart banyuwangi program policy. This is seen from 4 stages of implementation such as socialization and determination of recipients, allocation of funds and disbursement of funds, accountability reports, and monitoring. However, the implementation has not been effective due to the unfulfilledness of 5 indicators of effectiveness in the implementation of intelligent banyuwangi program policies related to the process of disbursement of scholarship funds. As for the supporting factors in the success of intelligent banyuwangi program is the amount of allocated APBD budget allocated. And the support of 3 main sectors namely government, society and private as a third party that is not binding. For the inhibiting factors that affect the intelligent banyuwangi program is the delay in disbursement of scholarship funds, early marriage culture and the lack of number of universities in cooperation

with the Government of Banyuwangi Regency so that many students who discouraged because not in accordance with the desired majors.

Suggestions for Banyuwangi District Education Office first, it is necessary to arrange the disbursement schedule with coordination so that the implementation of fund disbursement is more scheduled, running fast and timely. Second, change the mindset of the villagers through a direct approach by volunteers from the intelligent banyuwangi program policy (DETAS). Three, immediately coordinate with other universities.

Keyword : local government, program of smart city banyuwangi, implementation of program.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karuniannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas Dalam Rangka Mendukung Penjaminan Keberlangsungan Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Banyuwangi).”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Irwan Noor, MA selaku Ketua Komisi Pembimbing dalam penyusunan skripsi penulis. Terima Kasih untuk diskusi dan saran untuk perbaikan karya ilmiah ini.

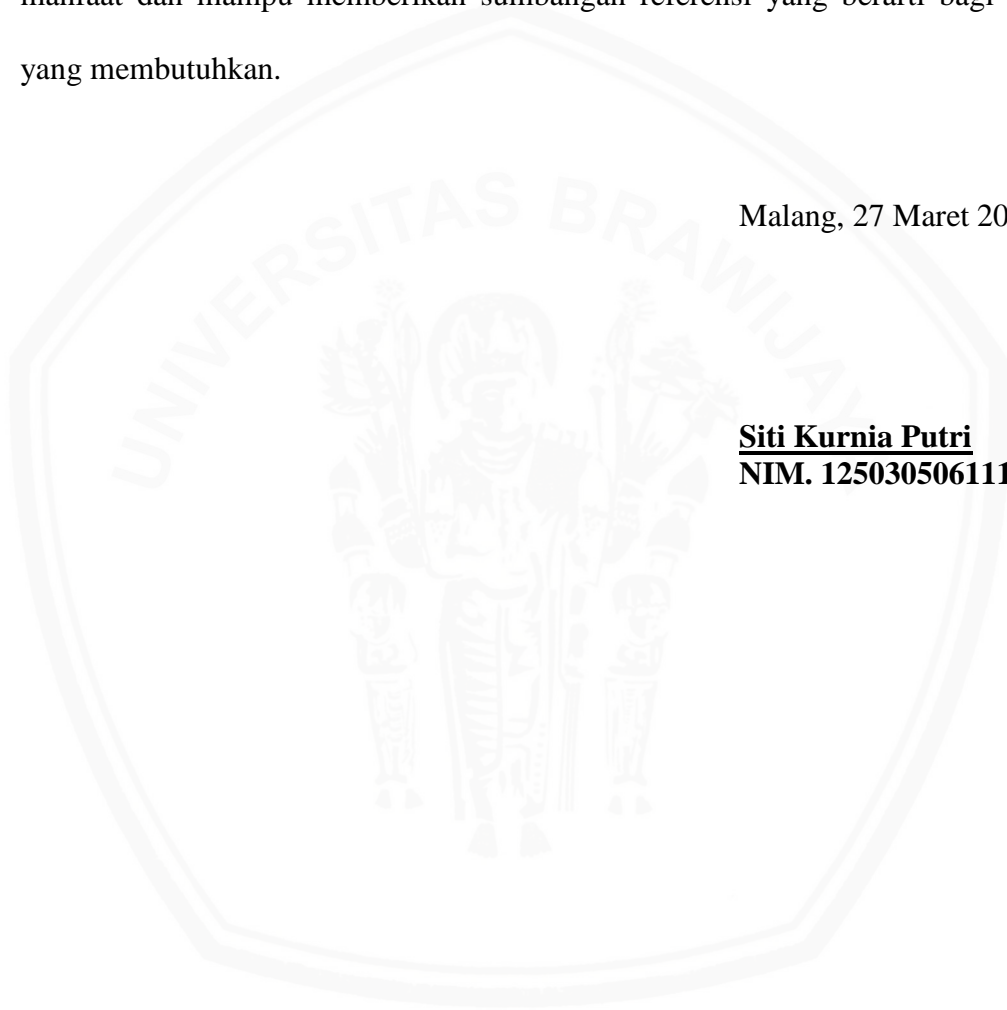
4. Ibu Dr. Endah Setyowati, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing dalam penyusunan skripsi. Terima Kasih untuk diskusi dan saran untuk perbaikan karya ilmiah ini.
5. Segenap dosen pengajar di Fakultas Administrasi Universitas Brawajaya Malang yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam segala hal.
6. Kepada Dinas dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi serta semua pihak yang sudah berkenan memberikan izin, tempat, ilmu dan informasi terkait data- data yang dibutuhkan selama penelitian ini berlangsung.
7. Keluargaku tersayang Ayah (Samsuri), Ibu (Sumarni) dan Adik (Mukhlis Yuda Hermawan), Terimakasih atas segala dukungan dan kasih sayang selama ini. Maaf masih sering mengecewakan, namun percayalah janji dan tekadku adalah untuk membahagiakan kalian.
8. Sahabat- sahabatku Imam Mustain, Mifta Sari Rohmatullah, Nanda Septiasari, Eni Puji Lestari, Tyas Puji Koesmarini, Christine Triana Singarimbun, Luluk Hidayati, dan Rahmawati Ayu Arimadika yang membantu dan memberikan semangat selama penelitian.
9. Keluarga seperjuangan Administrasi Pemerintahan angkatan tahun 2012, terimakasih telah banyak memberikan ilmu dan memeberikan cerita tersendiri selama kuliah di Universitas Brawijaya ini.

Serta untuk banyak pihak yang tak bisa disebutkan satu per satu dalam mendukung terselesaikannya skripsi ini. Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis

sudah berusaha untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin, namun demi kesempurnaan Skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Tidak lupa penulis memohon maaf jika ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan mampu memberikan sumbangan referensi yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 27 Maret 2018

Siti Kurnia Putri
NIM. 125030506111001



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15

A. Administrasi.....	15
1. Pengertian Administrasi Publik	16
2. Fungsi Administrasi Publik	16
B. Implementasi Kebijakan Publik	18
1. Pengertian Kebijakan Publik	18
2. Implementasi Kebijakan	20
3. Model Implementasi Kebijakan	21
4. Faktor Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	30
5. Efektifitas Implementasi Kebijakan	32
C. Pendidikan.....	35
1. Pengertian Pendidikan	35
2. Tujuan Pendidikan.....	37
3. Jenis Pendidikan	39
D. Program Banyuwangi Cerdas	39

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis Penelitian	43
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi dan Situs Penelitian	45
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Instrumen Penelitian	51
G. Analisis Data	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 56

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	56
1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	65
2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ..	69
3. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan	75
B. Hasil Penelitian	72
1. Implementasi Program Banyuwangi Cerdas Dalam Mendukung Penjaminan Keberlangsungan Pendidikan.....	72
a. Sosialisasi dan penetapan Penerima Program Banyuwangi Cerdas	72
b. Pengalokasian dan Pencairan Dana Program Banyuwangi Cerdas	97
c. Laporan Pertanggungjawaban Program Banyuwangi Cerdas	111
d. Monitoring Program Banyuwangi Cerdas.....	113
2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Banyuwangi Cerdas	115
a. Faktor Pendukung.....	116
b. Faktor Penghambat	122
C. Pembahasan	126
1. Implementasi Program Banyuwangi Cerdas	127
a. Sosialisasi dan penetapan Penerima Program Banyuwangi Cerdas	129
b. Pengalokasian dan Pencairan Dana Program Banyuwangi Cerdas	133
c. Laporan Pertanggungjawaban Program Banyuwangi Cerdas	137
d. Monitoring Program Banyuwangi Cerdas.....	141
2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Banyuwangi Cerdas.....	152
a. Faktor Pendukung.....	152
b. Faktor Penghambat	154

BAB V PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran	159
 DAFTAR PUSTAKA	 160



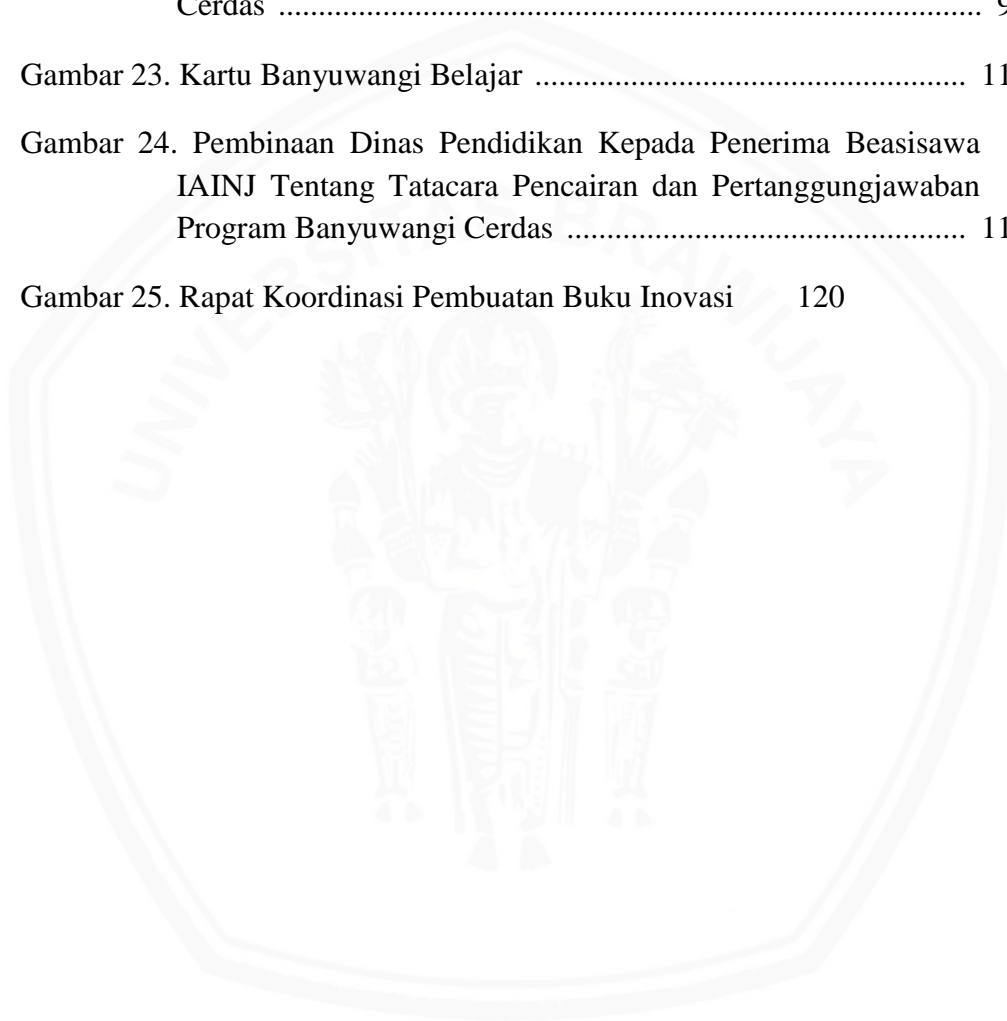
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 2011-2015	5
Tabel 2. Jumlah Kecamatan, Desa, Dan Kelurahan.....	58
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.....	60
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.....	61
Tabel 5. Persentase penduduk 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan 2011-2015.....	61
Tabel 6. Dasar Hukum Program Banyuwangi Cerdas	74
Tabel 7. Dana Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Banyuwangi Cerdas	102
Tabel 8. Matriks Matland	128

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Perkembangan Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017/2018	4
Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Van Horn dan Van Meter	21
Gambar 3. Model Implementasi Matland	27
Gambar 4. Model Analisis Data Interaktif	55
Gambar 5. Letak Geografis Kabupaten Banyuwangi	58
Gambar 6. Dinas Pendidikan Dinas Kabupaten Banyuwangi	66
Gambar 7. Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	67
Gambar 8. Sosialisasi Pemberian Info Program Banyuwangi Cerdas Kepada Masyarakat Kalipuro	80
Gambar 9. Sosialisai Dinas Pendidikan Dan Gerakan PKK Dalam Program Banyuwangi Cerdas Kepada Masyarakat Kabupaten Banyuwangi	80
Gambar 10. Sosialisai Program Banyuwangi Cerdas Yang Dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	81
Gambar 11. Sosialisasi Iklan Program Banyuwangi Cerdas	81
Gambar 12. Pedoman Pendaftaran Program Banyuwangi Cerdas	82
Gambar 13. Website Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	89
Gambar 14. Menu Aplikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	89
Gambar 15. Menu Aplikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	90
Gambar 16. Menu Aplikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	90
Gambar 17. Menu Aplikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	91
Gambar 18. Pendaftaran Secara Online Program Banyuwangi Cerdas	93

Gambar 19. Proposal Pengajuan Calon Penerima Program Banyuwangi Cerdas	95
Gambar 20. Seleksi Program Banyuwangi Cerdas	95
Gambar 21. Seleksi Baca dan Tulis ayat suci al-Quran	96
Gambar 22. Proses TIM Penelusuran Tinjau Lapang Program Banyuwangi Cerdas	96
Gambar 23. Kartu Banyuwangi Belajar	110
Gambar 24. Pembinaan Dinas Pendidikan Kepada Penerima Beasiswa IAINJ Tentang Tatacara Pencairan dan Pertanggungjawaban Program Banyuwangi Cerdas	113
Gambar 25. Rapat Koordinasi Pembuatan Buku Inovasi	120



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1.	Surat Rekomendasi Riset dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
2.	Surat Rekomendasi Riset dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
3.	Surat Keterangan Sudah Melakukan Riset dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
4.	Pedoman Wawancara dalam penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas Dalam Rangka Mendukung Penjaminan Keberlangsungan Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Banyuwangi).”
5.	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas
6.	Rekapitulasi Kegiatan Belanja Langsung pada Rancangan Perubahan APB (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016
7.	Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Bantuan Sosial Berupa Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Tidak Mampu yang Berasal Dari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi publik merupakan hal penting dalam melaksanakan suatu kegiatan, karena tanpa adanya administrasi publik kegiatan tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008: 3), mengemukakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Aspek politik, administrasi publik adalah aktivitas pemerintah. Administrasi publik berkenaan dengan aktivitas tindakan pemerintah dalam mengelola urusan publik atau implementasi publik baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya pemerintah menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Secara tidak langsung, penyediaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui sektor swasta atau bisnis.

Penyelenggaraan aktivitas pemerintah dalam mengelola urusan publik di daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan asas otonomi prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah di daerah berdasarkan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Penugasan pembantuan pemerintah pusat terdapat pemerintah daerah adalah dalam melaksanakan sebagian penyelenggaraan urusan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintah dibagi menjadi urusan absolut (urusan sepenuhnya kewajiban pemerintah) dan urusan konkuren (urusan pemerintah yang diserahkan kepada pelaksana otonomi daerah). Urusan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintah daerah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar seperti: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan pinataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di daerah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

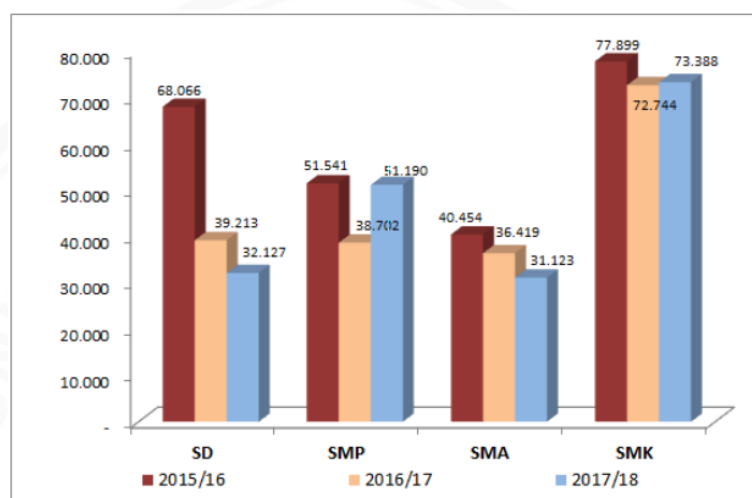
Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak terlepas dari kegiatan administratif, pelayan publik dan masalah kebijakan publik. Dalam menghadapi berbagai persoalan publik yang muncul pemerintah diharuskan mampu mengambil keputusan, yaitu keputusan perlu dan tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik. Selaku pelayan masyarakat, pemerintah harus tahu dan memahami mengenai kebutuhan serta keinginan masyarakat. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai pemerintah melalui pelaksanaan otonomi daerah

adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu persoalan akibat kegagalan pembangunan manusia adalah munculnya fenomena putus sekolah. Permasalahan yang dihadapi, bahwa sistem pendidikan di Indonesia walaupun dalam konstitusi sudah memiliki landasan yang kuat, tetapi pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sesuai harapan. Persoalan ini ditemui, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan di Indonesia, di antaranya; belum semua masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masalah pelayanan pendidikan, belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat semestinya diimplementasikan sesuai konstitusi yang ada, karena pada dasarnya pendidikan itu bukan saja hak kalangan tertentu, tetapi wajib diberikan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata. Kepentingan ini berkenaan dengan tujuan bangsa yang semestinya direalisasikan dengan baik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentu hal ini berkaitan dengan pemenuhan akses pendidikan terutama untuk masyarakat kurang mampu dikarenakan faktor ekonomi. Pemenuhan biaya sekolah yang kurang menjadikan tingginya angka

putus sekolah untuk dapat duduk dibangku sekolah. Berikut perkembangan jumlah siswa putus sekolah menurut jenjang pendidikan tahun 2016/2017 berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di Indonesia:

Grafik 1. Perkembangan Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017/2018.



Sumber: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia, 2017.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan persentase putus sekolah tertinggi masyarakat di Indonesia adalah tingkat SD rata-rata dari tahun 2015- 2017 yakni 68.006, 51.541, 40.454, 77.899 disusul SMA/SMK yakni rata-rata dari tahun 2015-2017 32.127, 51.190, 31.123, 73.388 dan tingkat SMP menjadi tingkat pendidikan yang memiliki persentase paling rendah yakni 39.213, 38.702, 36.419, 72.744.

Tingginya persentase putus sekolah tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi permasalahan kompleks di Indonesia dan berimbas pada faktor lain yakni bidang pendidikan. Keberadaan anak putus sekolah dapat kita

jumpai pada setiap daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi. Berada diujung timur Pulau Jawa dan merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur yakni 5.782,5 km² membuat Kabupaten Banyuwangi memiliki angka putus sekolah yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi 2013 mencatat penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 sejumlah 1.574.778 jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata dari tahun 2000 sampai dengan 2010 sebesar 0,44 % dan tingkat kepadatan 281 jiwa/km. Namun di Kabupaten Banyuwangi dari data yang ada masih terdapat 100,789 orang anak yang tidak dan belum pernah duduk dibangku sekolah di usia sekolah.

Sedangkan angka rata-rata persentase penduduk 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan tertinggi di Kabupaten Banyuwangi yang ditamatkan 2011-2015 masih cukup rendah. Berikut, persentase penduduk Kabupaten Banyuwangi

Tabel 1. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 2011-2015.

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tidak/Belum pernah sekolah	8.92	6.47	6.40	5.49	8.64
2.	Tidak/Belum tamat SD/MI	25.05	24.54	26.38	26.86	23.01
3.	SD/MI	28.71	29.11	28.60	28.24	30.03
4.	SLTP	19.78	18.87	17.82	19.16	20.46
5.	SMA	14.45	16.20	17.50	16.20	13.92
6.	Perguruan Tinggi	3.10	4.81	3.30	3.64	3.93

Sumber : Susenas - Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan persentase tidak/belum sekolah di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 sampai 2015 meningkat yakni, 8,92% tahun 2011, 6,47% tahun 2012, 6,40,% tahun 2013, 5,89% tahun 2014, dan 8,64

pada tahun 2015. Untuk persentase pendidikan tertinggi masyarakat Banyuwangi adalah tingkat sekolah dasar yakni rata-rata dari tahun 2011- 2015 28.71%, 29.11%, 28.6%, 28.24%, 30.03% dan tingkat perguruan tinggi menjadi tingkat pendidikan yang memiliki persentase paling rendah yakni 3.10%, 4.81%, 3.30%, 3.64%, 3.93% mulai tahun 2011-2015.

Rendahnya persentase tersebut berdampak serius terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Seperti terhadap kualitas pekerja dan pengangguran yang ada di daerah. Untuk kualitas pekerja dengan rata-rata pendidikan yang relatif rendah tentu akan mempengaruhi nilai jual pekerja itu sendiri, sedang untuk kualitas pengangguran dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah akan menyusahkan mereka dalam memperoleh kesempatan kerja yang pada umumnya diperebutkan dengan kompetitor lain, dengan demikian maka tingginya pembangunan manusia bidang pendidikan di Kabupaten Banyuwangi akan menjadi lebih serius.

Menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terutama dalam hal terwujudnya masyarakat banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berkahlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan suatu kebijakan berupa Perbup (Peraturan Bupati) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas. Program Banyuwangi Cerdas merupakan salah satu program beasiswa unggulan di bidang pendidikan yang saat ini tengah digalakkan oleh Pemkab Banyuwangi. Pemberian Beasiswa melalui program Banyuwangi Cerdas ini digagas oleh Bupati

Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mulai tahun 2011 dan berjalan sampai saat ini.

Program Banyuwangi Cerdas bermaksud untuk memberikan kesempatan belajar dalam rangka mendukung penjaminan pendidikan bagi para peserta didik atau mahasiswa tidak mampu namun berprestasi. Program Banyuwangi cerdas berfungsi membekali peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah agar dapat menuntaskan pendidikannya untuk melanjutkan lagi kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk membuat masyarakat lebih mengerti dan memahami tentang program Banyuwangi cerdas, Pemda Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi dengan berbagai cara seperti melalui media cetak, media elektronik, terjuan langsung ke masyarakat dan mensosialisasikan kepada para Kepala Sekolah serta guru Bimbingan dan Konseling (BK) se-Banyuwangi. Pelaksanannya Program Banyuwangi Cerdas itu sendiri Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Universitas Jember, IAIN Jember dan Universitas Terbuka.

Kerangka fasilitas Program Banyuwangi Cerdas diimplementasikan dengan diterbitkannya Kartu Banyuwangi Belajar dan Kartu Banyuwangi Cerdas. Dua kartu tersebut memiliki fungsi sebagai jaminan keberlangsungan belajar peserta didik mulai dari pendidikan sekolah dasar hingga pendidikan perguruan tinggi khusus bagi anak yang kurang mampu. Kartu Banyuwangi Belajar diberikan untuk siswa tidak mampu pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, sedangkan Kartu Banyuwangi Cerdas ditujukan kepada mahasiswa tidak mampu berprestasi. Pemberian beasiswa aspek pendanaan atau pembiayaan Program

Banyuwangi Cerdas tertuang dalam Perbup pasal 12 ayat (11).Dimana pendanaan Program Banyuwangi Cerdas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pemerintah Daerah dalam menunjang keberhasilan Program Banyuwangi Cerdas berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan sebagai SPKD yang bersentuhan langsung dengan Program pendidikan Pemda Kabupaten Banyuwangi berkewajiban memberikan layanan, fasilitas, bantuan, dan kemudahan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik yang telah mendapatkan program Banyuwangi cerdas. Tujuan dan sasaran pelaksanaan program Banyuwangi cerdas, diantaranya: 1) Meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia (IPM) dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi; 2) Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dengan cara memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi masyarakat miskin namun memiliki berprestasi. Sasaran dari program banyuwangi cerdas ini adalah putra dan putri Daerah Kabupaten Banyuwangi pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan paling utama adalah untuk peserta didik lulusan SMA/SMK/MA yang berprestasi di sekolah tetapi tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi karena terkendala biaya.

Namun, dalam pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas terdapat Hambatan salah satunya dalam proses pencairan. Proses pencairan dana yang tidak bisa secara langsung membuat penerima beasiswa Program Banyuwangi bingung akan

kebutuhan dana masuk kuliah (Drs. Sutikno,M.Pd. 2015.Kepala Sub.Bagian Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi). Pada bulan juli 2015 calon mahasiswa yang terseleksi sudah masuk sebagai terseleksi penerima dana Program Banyuwangi Cerdas berjumlah sebanyak 50 orang. Dari jumlah tersebut ketika kebutuhan dan daftar ulang yang diharapkan dari Program Banyuwangi Cerdas masih dalam proses. Adanya keterlambatan proses pencairan yang seharusnya bulan juli digunakan untuk daftar ulang, tetapi baru cair pada bulan Agustus atau September membuat orang tua calon mahasiswa bingung mencari dana talangan untuk daftar ulang. Bahkan mengakibatkan calon mahasiswa yang sudah terdaftar menjadi penerima bantuan mungundurkan diri karena tidak memiliki biaya untuk daftar ulang. Permasalahan keterlambatan pencairan dana bantuan tidak hanya disaat daftar ulang, tetapi pada beberapa bulan dalam pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas. Hal ini membuat mahasiswa bingung dalam membiayai biaya kebutuhan hidup setiap harinya seperti: biaya makan, biaya kos, buku, dan biaya lainnya.

Program Banyuwangi Cerdas merupakan program gagasan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pemberian kesempatan belajar dan penjaminan pendidikan dalam upaya meingkatkan rata-rata lama sekolah sehingga bisa memutus rantai kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (IPM). Terlepas dari sisi positif yang dapat meningkatkan beban masyarakat dalam menempuh pendidikan, Program Banyuwangi Cerdas dalam implementasinya masih mengalami banyak kendala, diantaranya dalam proses pencairan dana. Berdasarkan hal tersebut, melatar belakangi peneliti melakukan penelitian berjudul

“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas Dalam Rangka Mendukung Penjaminan Kelangsungan Pendidikan”(Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang akan diterima oleh semua pihak terkait dalam penelitian ini dan diharapkan bisa memberikan manfaat baik bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai bahan pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam bidang Kebijakan Publik dan sasaran untuk mengaktualisasikan berbagai ilmu yang telah diterima dalam perkuliahan.
 - b. Dapat menerapkan respon mahasiswa terhadap program-program pemerintah dan untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh.
 - c. Sebagai bahan masukan bagi penelitian yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Program Banyuwangi Cerdas.
2. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai bahan masukan dalam melakukan studi implementasi program banyuwangi cerdas.
3. Bagi Instansi Pemerintah
 - a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan perbaikan solusi pemecah dari kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi program banyuwangi cerdas di Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Sebagai bahan evaluasi mengenai implementasi program banyuwangi cerdas di Kabupaten Banyuwangi.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi masyarakat mengenai hal yang berkaitan dengan implementasi program banyuwangi cerdas dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan belajar di Kabupaten Banyuwangi.

E. Sistematika Penelitian

Dalam skripsi ini di bagi dalam lima bagian, yang dibagi dalam lima bab. Masing- masing bab dalam skripsi ini merupakan satuan kesatuan yang saling berkait antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagaiberikut:

BAB I: PENDABULUAN

Bab ini secara umum menguraikan tentang penelitian yang dilakukan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini peneliti menjelaskan mengenai kemiskinan di Kabupaten banyuwangi yang akhirnya berdampak pada terhambatnya masyarakat untuk meraih kesempatan pendidikan dan ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan, seperti daftar ulang, spp, membeli seragam, peralatan tulis dan iuran lainnya. Sehingga pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya untuk membantu peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk bisa memenuhi biaya kebutuhan pendidikan, dan agar tidak ada lagi alasan untuk anak dari keluarga tidak mampu tidak bisa sekolah.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tentang kajian teori-teori atau temuan-temuan dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis agar nantinya dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian dan penganalisan data yang diperoleh peneliti dari yang dilakukan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Teori administrasi publik, teori implementasi kebijakan, teori pendidikan dan Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Implementasi Program Banyuwangi Cerdas meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data. Untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian Implementasi Program Banyuwangi Cerdas di Dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi lebih rinci sehingga akan mempermudah peneliti untuk proses analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Implementasi Program Banyuwangi Cerdas di Dinas Kabupaten Banyuwangi yang lebih rinci sehingga mempermudah peneliti untuk proses analisis data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan yang sudah didapat dari penelitian yang dilakukan peneliti dan semua isidari skripsi. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang saran-saran yang dapat di jadikan masukan untuk pihak-pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi

1. Pengertian Administrasi Publik

Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan publik sebagai orang banyak (umum). Kata publik dalam bahasa Inggris, publik diserap dari kata *public* yang tidak asing untuk kita jumpai pada aktivitas sehari-hari yang dapat diartikan menjadi publik, milik bangsa, negara, komunitas dalam jumlah yang besar, umum, masyarakat atau rakyat, dan khalayak.

Sedangkan dalam Administrasi menurut Sagala (2009: 26) adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia secara sistematis untuk menjalankan roda suatu usaha atau misi organisasi agar dapat terlaksana, sesuatu usaha dengan sesuatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Ada beberapa macam Pengertian administrasi publik, The Liang Gie dalam Sukidin (2009: 4) mengelompokkan tiga macam pengertian yaitu:

- a. Administrasi diartikan sebagai proses.
- b. Adminitrasi diartikan sebagai sebagai tatausaha.
- c. Administrasi diartikan sebagai pemerintah atau administrasi publik.

Berdasarkan pemaparan teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi publik adalah kegiatan sekelompok manusia dilingkungan pemerintahan maupun kelompok swasta dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dimana untuk mencapai tujuan, terdapat seluruh

proses kegiatan penetapan susunan suatu rencana-rencana kegiatan dalam mencapainya. Terkait masalah administrasi publik erat hubungannya dengan manajemen dimana wadah berupa organisasi dan alat sebagai strategi dan tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Program Banyuwangi Cerdas, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diwakili Dinas Pendidikan beserta lembaga dibawahnya sebagai wadah untuk proses kegiatan penyusunan strategi terkait tercapainya tujuan dalam pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas.

2. Fungsi Administrasi Publik

Menurut Tjokomidjoyoyang dikutip oleh Tjiptoherijonto dan Manurung (2010: 112), menyebutkan tiga fungsi utama administrasi publik adalah formulasi/ perumusan kebijakan, pengaturan/ pengendalian unsur-unsur administrasi dan penggunaan dinamika administrasi:

- a. Formulasi Kebijakan
Fungsi formulasi kebijakan memiliki empat subfungsi yaitu analisis kebijakan, pemikiran masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program atau strategi dan pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan amat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera. Konsistensi tersebut mencakup konsistensi antara waktu/ generasi, antara sektor dan wilayah, antara tingkat pemerintah dan antara tingkat pemerintah antar unit pemerintah.
- b. Pengaturan/ Pengendalian Unsur-unsur Administrasi
Unsur administrasi yang perlu dikelola adalah (struktur) organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lain. pengaturan/ pengendalian unsur-unsur administrasi diantaranya adalah pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan kepastian administrasi publik.
- c. Penggunaan Dinamika Administrasi
Dinamika administrasi (*the dynamics of administration*) meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, komunikasi. Jika pengaturan/ pengendalian unsur-unsur administrasi lebih menekankan pada aspek

organisasi dari administrasi publik, maka dinamika administrasi menerapkan aspek manajemen administrasi publik.

Terdapat tujuh fungsi administrasi publik yang bisa disebut PEOPLE. Menurut Sugandha (1991: 14) PEOPLE adalah akronim dari *Planning, Executing, Organizing, Persuading, Leading, dan Evaluating*, yaitu:

- a. *Planning* (perencanaan), berarti merencanakan kegiatan sebelumnya.
- b. *Executing* (pelaksanaan), berarti menjalankan semua fungsi itu melalui pemerintah, membuat keputusan-keputusan, dengan menerapkan teknik komunikasi, penelitian untuk mendapatkan informasi, secara hubungan kemanusiaan.
- c. *Organizing* (pengorganisasian), berarti mengelompokkan orang, menyempurnakan organisasi, bahkan membentuk organisasi.
- d. *Persuading* (pengarahan), berarti mendorong untuk bergairah kerja.
- e. *Leading* (pemimpin), berarti menggerakkan, memimpin
- f. *Evaluating* (penilaian), berarti memberikan penghargaan dan penerimaan.

Sedangkan menurut Tjokoamidjoyo yang dikutip oleh Tjiptoherijanto dan Manurung (2010: 120), dari sudut pandang Manajemen dapat dikelompokkan menjadi tiga utama, yaitu perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) kebijakan publik.

- a. Perencanaan
Perencanaan adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh administrator publik untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat. Perencanaan adalah langkah awal yang sangat penting dan strategi, karena sebagian besar efisiensi penggunaan sumber daya sektor publik ditentukan dalam tahap perencanaan.
- b. Pelaksanaan
Ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang diluar kemampuan kontrol manajemen pemerintah atau badan-badan publik. Faktor-faktor internal adalah faktor-faktor yang berada dalam kontrol manajemen atau kekuasaan badan pemerintah yang merumuskan/ melaksanakan kebijakan. Faktor-faktor yang ada mencakup struktur organisasi, kemampuan manajerial, kemampuan keuangan serta jumlah dan kualitas SDM yang tersedia. Kegagalan pelaksanaan kebijakan publik, lebih sering disebabkan faktor-faktor internal, yaitu lemahnya daya dukung administrasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

c. Evaluasi

Evaluasi program bertujuan mengetahui perencanaan yang disusun sudah dapat dilaksanakan secara efisien. Administrasi publik harus memiliki kemampuan analisis strategi tentang hubungan antara indikator keberhasilan. Berdasarkan fungsi-fungsi administrasi publik di atas bisa dikatakan bahwa administrasi publik sangatlah penting. Administrasi publik tidak hanya bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga berperan dalam pengoptimalan kinerja dalam suatu organisasi pemerintahan. Administrasi publik berkaitan erat dengan aspek pemerintahan yang membuat keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah berpengaruh besar dalam keberhasilan Program Banyuwangi Cerdas karena pemerintah berperan pada pengoptimalan kinerja dalam organisasi untuk mencapai keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan. Kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan publik, lebih sering terjadi pada faktor-faktor internal, yaitu lemahnya daya ukur administrasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Sedangkan keberhasilan suatu kebijakan juga tergantung dari baik dan buruknya koordinasi yang dilakukan oleh para administrator.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologi istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris "*Policy*". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan diartikan sama dengan keputusan. Padahal istilah kebijakan dengan keputusan memiliki istilah yang jauh berbeda. Definisi Thomas R. Dye didukung oleh Islamy (2001: 20-21) yang menyimpulkan bahwa kebijakan publik (*public policy*) ialah

tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat sehingga pada hakikatnya kebijakan publik didasarkan pada faham bahwa kebijakan publik harus mengabdikan kepada kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang tidak dilakukan atau dilakukan oleh sekelompok manusia atau pemerintah yang bertujuan memecahkan masalah-masalah publik untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat luas. Biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat mengikat dan memaksa. Jika dikaitkan dengan permasalahan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas. Bertujuan dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada di daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya bidang pendidikan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Biasanya, implementasi dilaksanakan setelah perencanaan yang benar-benar sudah matang. menurut Winarno (2012: 147) implementasi diartikan dalam konteks atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti seperti tingkat pengeluaran program.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Ripley dan Franklin (1982) dalam Winarno (2012: 148) bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang diterapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2012: 135-136) definisi implementasi, yaitu:

“Apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang menyangkut baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijabarkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan- tindakan kegiatan yang penting untuk merelisasikan atau melaksanakan program yang telah disusun untuk termencapainya tujuan program yang telah direncang atau direncanakan sebelumnya yang dilakukan oleh organisasi publik. Keberhasilan suatu implementasi bisa diukur dari keberhasilan tujuan akhir yang telah diraih

sedangkan implementasi program dapat tercapai jika antara program, pelaksanaan, dan kelompok sasaran tepat terhadap kesesuaian tujuan dalam pelaksanaannya.

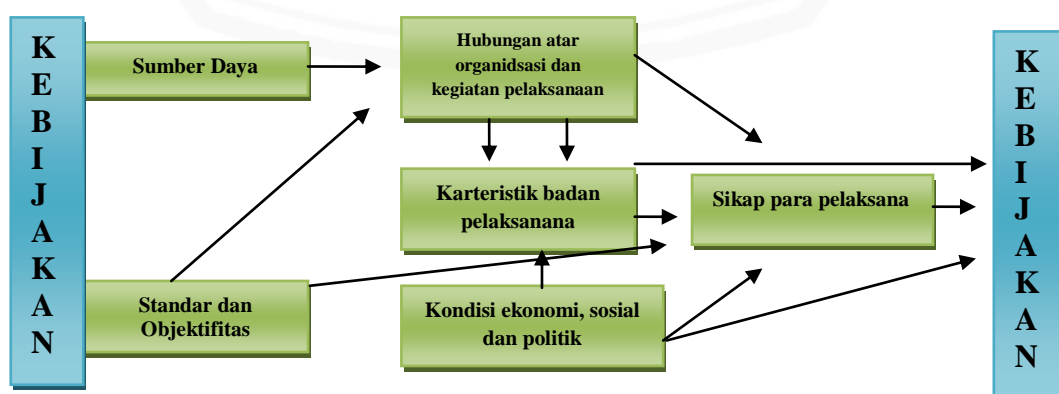
3. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik terdapat beberapa model dalam mewujudkan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nugroho (2014: 655-679), berikut model dalam implementasi kebijakan:

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengendalikn bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik antara lain:

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- 2) Karakteristik dari agenda pelaksana/implementator
- 3) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- 4) Kecenderungan (*Disposition*) dari pelaksana/implementator.



Gambar 2: Model Van Horn dan Van Meter.

Sumber : Nugroho (2014: 666).

b. Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam Nugroho (2012: 222- 223). Edwerd menyatakan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, diantaranya:

1) Komunikasi

Berkenaan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada dan/ atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

2) Sumber daya (*Resources*)

Berkenaan denganketersediaan sumber daya penduduk, khususnya sumber daya manusia, hal berkenaan dengan kecakapan dari para pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan efektif.

3) Disposisi (*Disposition*)

Berkenaan dengan kesediaan para implementator untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisai birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

c. Model Matland

Model implementasi mulai berkembang sesuai dengan semakin rumitnya masalah yang dihadapi oleh para implementator kebijakan. Salah satu model implementasi kebijakan yang sering dianjurkan adalah model dari Richard Matland yang disebut sebagai Matriks Ambiguitas-Konflik yang dikembangkan oleh Matland (1995). Model ini melakukan pendekatan dengan berkonsentrasi pada signifikansi teoritis ambiguitas dan konflik untuk implementasi kebijakan. Matland (1995: 147-174), Tinjauan literatur implementasi kebijakan menemukan pemecah bidang menjadi dua sekolah utama, *top-down* dan *bottom-up*. Berikut penjelasan dari pendekatan tersebut:

1) Model Pendekatan *Top-Down*

Model implementasi *Top-Down* digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat implementasi sukses, menurut pendekatan ini pencapaian tujuan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan pemerintah atasan kebawah serta bagaimana cara atasan mengawasi para bawahan tersebut. Teori *top-down* melihat desain kebijakan sebagai aktor sentral dan memusatkan perhatian mereka pada faktor-faktor yang dapat dimanipulasi ditingkat pusat. Fokus pada kepastian-kepastian pemerintah, model *top-down* ini pertama kali dikembangkan oleh Pressman dan Wildavsky (1973). Dalam bukunya yang berjudul *Implementation*, kedua orang peneliti ini secara eksplisit menggunakan konsep implementasi untuk menjelaskan kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai sasarannya. Van Meter dan Van Horn (1978) berpandangan bahwa dalam

implementasi kebijakan perlu dipertimbangkan isi dan tipe kebijakan. Gunn (1978) menyatakan ada beberapa syarat untuk mengimplementasikan kebijakan secara sempurna. Mazmanian dan Sebatier (1979) melihat implementasi dari kerangka implementasi.

2) Model Pendekatan *Bottom-Up*

Model pendekatan implementasi *Bottom-Up* sering dianggap sebagai lahan harapan (*promised land*), bertolak dari pengidentifikasian kerangka aktor-aktor yang terlibat dalam “*service delivery*” di dalam satu atau lebih wilayah lokal dan mempertanyakan pada mereka tentang tujuan, strategi, kegiatan/aktivitas, dan kontak mereka. Teori ini menekankan kelompok sasaran dan pengantar layanan, dengan alasan kebijakan yang benar-benar dibuat ditingkat lokal. Selanjutnya model ini menggunakan kontak sebagai sasaran untuk mengembangkan teknik network untuk mengidentifikasikan aktor-aktor lokal, regional, dan nasional yang terlibat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan program pemerintah dan non pemerintah secara relevan. Pendekatan ini menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari birokrat tingkat jalan *street level bureaucrats* sampai pada pembuatan keputusan tinggi dari publik maupun privat.

Dalam pendekatan *bottom-up* masih ditemukan kelemahan, karena asumsinya bahwa implementasi berlangsung di dalam lingkungan pembuat keputusan yang terdesentralisasi. Sehingga pendekatan ini salah dalam menerima kesulitan empiris sebagai *statement normative* maupun satu-satunya basis analisis atau kelompok masalah organisasi dan politik.

Selain itu, petugas lapangan tentu melakukan kekeliruannya. Karena itu berbahaya untuk menerima relaitas deskriptif yang menunjukkan bahwa birokrasi lapangan membuat kebijakan dan mengubahnya ke dalam suatu deskripsi tindakan.

Matland (1995: 147-174) mengatakan bahwa, atribut kebijakan dapat dibedakan menjadi *policy conflict* dan *policy ambiguity*. Berikut, penjelasan dari *policy conflict* dan *policy ambiguity*.

1) *Policy Conflict*

Kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa aktor berkenaan dengan suatu masalah dalam mencapai tujuan tertentu. Tindakan para aktor dapat berupa pengambilan keputusan yang biasanya bukan keputusan tunggal, yaitu kebijakan diambil dengan berbagai keputusan yang terkait dengan masalah tersebut.

Konflik adalah sikap saling mempertahankan diri dua organisasi bahkan lebih yang memiliki pandangan dan tujuan berbeda untuk mementingkan diri sendiri. Sehingga terdapat perbedaan pencapaian tujuan didalam posisi oposisi, bukan kerjasama. Konflik dapat berupa perselisihan, adanya ketegangan dan munculnya kesulitan-kesulitan diantara lebih dari satu organisasi. Konflik dalam kebijakan bisa disebabkan oleh banyak hal, diantaranya ketidak sesuaian aktor, ketidak sesuaian atas substansi sasaran yang diusulkan untuk mencapai tujuan, ketidak dapatan pencapaian kesepakatan.

2) *Policy Ambiguity*

Ambiguitas kebijakan dalam pelaksanaannya muncul dalam dua kategori yaitu ambiguitas tujuan dan ambiguitas sasaran. Dalam model *top-down* kejelasan sasaran adalah variabel independen yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Tujuan ambiguitas dipandang menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpastian dalam kegagalan implementasi. Tingkat ambiguitas dalam kebijakan langsung mempengaruhi proses implementasi secara signifikan. Dalam merancang kebijakan, konflik dan ambiguitas berkorelasi positif. Salah satu cara untuk mengatasi konflik adalah dengan ambiguitas sebuah kebijakan. Semakin jelas tujuan maka semakin besar kecil pula ambiguitasnya.

Tingkat ambiguitas pada kebijakan berpengaruh besar terhadap kelangsungan proses pelaksanaan. Cara yang signifikan mempengaruhi atasan untuk memantau kegiatan, kemungkinan bawah kebijakan adalah seragam dipahami di banyak situs *implementation*, kemungkinan bahwa faktor-faktor kontekstual lokal berperan penting, dan derajat aktor yang relevan bervariasi tajam di pelaksanaan situs.

Pemikiran Matland dapat dikembangkan secara lebih rinci sebagai berikut:

		CONFLICT	
		Low	High
AMBIGUITY	Low	<i>Administrative Implementation</i> Resources Example: Smallpox eradication	<i>Political Implementation</i> Power Example: Busing
	High	<i>Experimental Implementation</i> Contextual Conditions Example: Headstart	<i>Symbolic Implementation</i> Coalition Strength Example: Community action agencies

Gambar 3: Model Matland

Sumber : Matland, 1995 *Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Jurnal of Public Administration Research and Theory. J-PART, Vol. 5, No. 2.*

Matland (1995: 147-174) mengembangkan empat dasar model implementasi, diantaranya:

- 1) *Administrative Implementation: Low Policy Ambiguity and Low Policy Conflict*

Dalam teori pengambilan keputusan, pilihan peluang dimana ambiguitas dan konflik yang rendah memberikan kondisi prasyaratan untuk proses pengambilan keputusan yang rasional. Sumber daya merupakan Prinsip utama apakah implementasi dapat berjalan lancar atau tidak. Hasil yang diinginkan dapat

dijamin, mengingat implementasi kebijakan dibuat dan disesuaikan dengan sumberdaya yang ada. Lembaga merupakan otoritas pusat, disini otoritas memiliki informasi, sumber daya, dan kemampuan sanksi untuk membantu memberlakukan kebijakan yang diinginkan. Informasi mengalir dari atas kebawah. Setiap link dalam rantai pelaku memiliki gagasan yang jelas tentang tanggung jawab dan tugas-tugas mereka.

Kebijakan administratif dilaksanakan dengan pendekatan *self-implemented* atau menggunakan model administratif. Masuk dalam kelompok ini kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pelayanan publik bersifat mendasar. Aktor yang berperan dalam model kebijakan adalah masyarakat sebagai aktor pelaku utama, pemerintah sebagai aktor pelaku pendamping. Kebijakan-kebijakan yang *socieletal driven policy*, di sini termasuk kegiatan pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat yang mendapat subsidi dari pemerintah.

2) *Political Implementation: Low Policy Ambiguity and High Policy Conflict*

Kebijakan yang bersifat kritikal bagi kehidupan bersama atau berkenaan dengan eksistensi negara, termasuk dalam hal ini pemerintah yang sah dapat melakukan paksaan. Prinsip utama dalam pelaksanaan politik adalah bahwa hasil pelaksanaan diputuskan oleh kekuasaan pemerintah. Meliputi kebijakan-kebijakan yang masuk dalam kategori *directed* atau berkenaan dengan eksistensi negara dan bangsa. Kebijakan disini disebut sebagai *existensial driven policy* (pertahanan, keamanan, penegak keadilan, dan sebagainya).

3) *Experimental Implementation: High Policy Ambiguity and Low Policy Conflict*

Implementasi eksperimen adalah kebijakan menunjukan tingkat tinggi ambiguitas dan rendahnya konflik, keberhasilan implementasi eksperimen didominasi pada mana aktor yang aktif dan paling terlibat. Pemerintah sebagai pelaku utama, masyarakat pelaku pendamping.

4) *Symbolic Implementation: High Policy Ambiguity and High Policy Conflict*

Kebijakan simbolik memainkan peran penting dalam mengkonfirmasi tujuan baru. Prinsip utamanya adalah bahwa tingkat lokal kekuatan koalisi menentukan hasilnya. Kursus kebijakan ditentukan oleh koalisi aktor yang mengendalikan sumber-sumber yang tersedia. Aktor yang berperan dalam model kebijakan simbolik adalah masyarakat sendiri, termasuk di dalamnya kebijakan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan milik Matland dengan mengembangkan implementasi kebijakan *top-down* melalui pendekatan administratif dan politik. Alasannya karena kebijakan pendidikan penting bagi peradaban manusia, pendidikan juga menjadi hak dan kewajiban pemerintah dan daerah untuk memberikan kemudahan dan penjaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Pendidikan itu sendiri mempunyai tingkat konflik yang rendah dan ambiguitas yang rendah karena kebijakan formal dikomunikasikan kepada masyarakat melalui sosialisasi untuk diimplementasikan. Namun, apabila terjadi kelangkaan sumber daya untuk pembiayaan dan pengalokasian pendidikan, terlebih dengan rendahnya dukungan

politik lokal (legistatif), kebijakan berkembang ke arah pola dengan konflik yang tinggi dan ambiguitas rendah. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan otoritas pusat yang memiliki informasi, sumber daya, dan memiliki kekuatan pembuat kebijakan dan sanksi. Pendidikan merupakan kebutuhan primer masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah oleh karena pendekatan menurun dari atas ke bawah (*Top-Down*).

4. Faktor Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi kebijakan dipandang dalam arti luas, merupakan alat administrasi hukum dimana sebagai aktor organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012:102). Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:85) setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan suatu proses implementasi, yaitu:

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri; kualitas kebijakan itu sendiri menyangkut banyak hal seperti: kejelasan tujuan, kejelasan implementor dan lainnya.
- b. Kecukupan *input* kebijakan (terutama anggaran).
- c. Ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan.
- d. Kepastian implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran.
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Rondinelli dan Cheeme dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:90) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: Kondisi lingkungan (*environmental conditions*), Hubungan antar organisasi (*inter-*

organizational relationship), Sumberdaya (*resources*), dan Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*), sedangkan Gogwood dan Gunn dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 14) mengemukakan bahwa pada kenyataannya *perfect implementation* tidak pernah terwujud karena dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Hambatan kondisi eksternal.
- b. Waktu dan sumber tidak memadai.
- c. Kesalahan dalam membuat kebijakan: dalam hal kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan yang ada sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah.
- d. Hasil atau dampak dari suatu kebijakan baru terasa dalam waktu yang lama atau terjadi *time lag*.
- e. Pelaksanaan kebijakan tidak bisa mandiri: dalam hal ini masih tergantung kepada pihak lain untuk mewujudkan tujuan kebijakan.
- f. Kurang kesepakatan antara pelaksana dan stakeholder terkait petunjuk pelaksanaan kebijakan dan tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan tersebut.
- g. Kurang koordinasi dan komunikasi yang baik.

Sementara itu Sebatier dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 19) menyebut ada empat variabel utama yang dianggap memberi kontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu:

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten.
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.
- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas.
- d. Komitmen dan keahlian para pelaku kebijakan.

- e. Dukungan *stakeholder*.
- f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan pol

Berdasarkan beberapa pendapat ahli terdapat yang telah disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi implementasi. Faktor tersebut dapat membuat keberhasilan dan kegagalan. Faktor pertama faktor internal yang terdiri dari kualitas kebijakan dan/atau program itu sendiri, sumber daya (kemampuan sumberdaya pelaksana, finansial, fasilitas) yang memadai, karakter organisasi, dan komunikasi, koordinasi, kerjasama yang baik antara *stakeholder*. sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal yang terdiri dari koordinasi lingkurang di luar organisasi seperti geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

5. Efektifitas Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2011: 650) berpendapat bahwa pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. Tepat pertama “tepat kebijakan”, apakah kebijakan tersebut sudah tepat. ketepatan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kabijakan.

“Tepat” yang kedua adalah “tepat pelaksanaan”. Aktor implementasi tidak hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu

pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti ketahanan dan keamanan sebagainya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama dengan masyarakat. Kebijakan yang mengarah kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau dimana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri berkala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

“Tepat” ketiga adalah “tepat target”. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tumpang tindih dalam intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, atautkah tidak. Kedua, kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau mempengaruhi implemnetasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

“Tepat” keempat adalah “tepat lingkungan”. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu: pertama, lingkungan kebijakan adalah interaksi di antara lembaga di antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista (Nugroho, et.al., 2011: 651) menyebutnya sebagai lembaga endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network camposition* yang berkenaan dengan komposisi jaringan dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jaringan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. Kedua, lingkungan eksternal kebijakan adalah lingkungan yang disebut Calista variabel eksogen, yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategi dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan insividualis, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

“Tepat” kelima adalah “tepat proses”. Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga proses, yaitu:

- a. Dukungan politik (Policy acceptance)
- b. Dukungan strategic (Strategic readiness), dan
- c. Dukungan teknis (Policy adoption).

C. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan tanggungjawab semua komponen bangsa, karena kualitas masa depan manusia sangat berpengaruh terhadap faktor pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat dan instansi secara terpadu dengan berbagai istitusi yang diadakan dengan sengaja untuk mengembangkan pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan hanya diketahui dari mutu individu, tetapi erat kaitannya dengan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan merupakan fenomena manusia yang fundamental yang juga mempunyai sifat dalam kehidupan manusia. pendidikan merupakan suatu aspek yang mendasar dalam usaha mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi proses dan dinamika kehidupan dalam bangsa dan bernegara.

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani “paedagogike”. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata “Pais” yang berarti anak dan kata”ago” yang berarti “aku membimbing”. Jadi, paedagogike berarti aku membimbing anak (Soedomo, 2008: 17).

Menurut Daryanto dan Suprihatin (2013:19) mengatakan bahwa pendidikan ialah suatu usaha dimana seseorang berusaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan situasi belajar agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual atau keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan akhlak manusia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, serta negaranya.

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa “Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan kebutuhannya budi pekerti, pikiran dan tubh anak; agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang selaras dengan dunianya”.

Pengertian pendidikan menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Dasar dari Pendidikan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar ada nilai-nilai agama, kebudayaan nasioanal Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara aktif agar menjadi manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, pandai, cerdas, mandiri, cakap, kreatif sehingga bisa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan belajar dan mengajar yang dikerjakan oleh seseorang

atau kelompok secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara aktif supaya memiliki kekuatan agama, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan terampil sehingga mampu membentuk manusia yang mampu tanggap dan mampu bersaing pada tuntutan zaman sehingga dapat bisa mempersiapkan diri untuk menjalankan kehidupan dimasa depan serta meningkatkan taraf kesejahteraan untuk mencapai tujuan pendidikan dan memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan suatu perbuatan agar terjadi perubahan sikap dan tata laku yang diharapkan guna menjadi manusia yang cerdas, terampil, mandiri, disiplin, dan berakhlak mulia.

2. Tujuan Pendidikan

Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam menempatkan tujuan sebagai suatu yang hendak dicapai. Menurut Soekidjo (2003: 42), “ Tujuan pendidikan adalah rumusan pada tingkah laku yang lazimnya dirumuskan dalam kategori pengetahuan, kecerdasan, sikap, keterampilan yang diharapkan untuk dimiliki oleh sasaran pendidikan setelah menyelesaikan program pendidikan”. Tujuan pendidikan nasional merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan,

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Hasil pendidikan dalam tujuan pendidikan tidak dapat segera dirasakan, karena pendidikan merupakan usaha yang bersifat kompleks dan membutuhkan kurun waktu yang cukup lama. Untuk dapat mencapai tujuan dari pendidikan, maka pembuat kebijakan harus memahami macam-macam dari tujuan pendidikan. Menurut Langeveld dalam (Amri, 2013: 12-14) macam-macam tujuan pendidikan diantaranya, yaitu:

- a. Tujuan Umum
Tujuan umum ini sering disebut tujuan akhir, yaitu tujuan yang pada akhirnya akan dicapai oleh pendidik terhadap anak didiknya yaitu terwujudnya kedewasaan jasmani dan rohani.
- b. Tujuan Khusus
Tujuan khusus adalah tujuan disesuaikan dengan kondisi tertentu dalam situasi pendidikan.
- c. Tujuan Seketika/Insidental
Tujuan seketika adalah tujuan yang sifatnya sesaat, tetapi dapat memberikan andil dalam pencapaian tujuan. Karena melalui tujuan-tujuan seperti ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung yang erat hubungannya nanti dimasa yang akan datang.
- d. Tujuan Sementara
Tujuan sementara adalah tujuan yang dicapai anak pada fase perkembangan.
- e. Tujuan Tidak Lengkap
Tujuan tidak lengkap adalah tujuan yang erat hubungannya dengan aspek-aspek pendidikan yang membentuk aspek-aspek kepribadian manusia.
- f. Tujuan Perantara/Intermedier
Tujuan perantara adalah alat atau sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain.

Menurut Triwiyanto (2014: 115) menyatakan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
- c. Menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dari penjelasan di atas, mengenai tujuan pendidikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa, tujuan pendidikan yang baik adalah mampu mengembangkan potensi dalam dirinya yang bersifat positif dan berguna bagi orang lain dan mampu menempatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Jenis Pendidikan

Jenis pendidikan yang terutang dalam Undang-Undang Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengarah pada tujuan bangsa dalam rangka mencerdaskan bangsa yaitu:

- a. Jalur Pendidikan Formal: Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- b. Jalur Pendidikan Nonformal: Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- c. Jalur Pendidikan Informal: Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

D. Program Banyuwangi cerdas

Program Banyuwangi cerdas merupakan suatu program yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Program

Banyuwangi Cerdas adalah program beasiswa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang ingin melanjutkan pendidikan hingga kejenjang perguruan tinggi, Program Banyuwangi Cerdas bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

Program Banyuwangi cerdas dicetuskan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada tahun 2011. Pada pelaksanaan program Banyuwangi Cerdas didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas. Program banyuwangi cerdas dilatar belakangi oleh pembangunan ekonomi yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi. Dalam hal ini Pemkab Banyuwangi berfikir dan berpendapat bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan haruslah diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan sumber daya manusia dianggap sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi, apabila tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai akan menimbulkan kemiskinan bagi semua masyarakat yang kurang terdidik.

Tujuan dan sasaran pelaksanaan program Banyuwangi cerdas, diantaranya: 1) Meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi; 2) Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dengan cara memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi masyarakat miskin namun memiliki berprestasi. Sasaran dari program banyuwangi cerdas ini adalah putra dan putri Daerah

Kabupaten Banyuwangi pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan paling utama adalah untuk peserta didik lulusan SMA/SMK/MA yang berprestasi di sekolah tetapi tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi karena terkendala biaya.

Pada Kebijakan Program Banyuwangi Cerdas pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan mempunyai peran yang penting. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang mengabaikan dari peran biaya, sehingga tanpa biaya pendidikan tidak akan berjalan secara lancar seperti yang diinginkan. Oleh karenanya, Program Banyuwangi cerdas mendapatkan alokasi dana melalui skema APBD, Pemkab Banyuwangi juga mengajak dunia usaha untuk ikut menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaannya dengan mendukung penyaluran beasiswa bagi dunia pendidikan Banyuwangi berserta bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat lainnya.

Pada pelaksanaannya Pemkab Banyuwangi terus berkomitmen memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakatnya. Menurut bapak Drs. Sulhiyono, MM, M.Pd mengatakan bahwa alokasi dana Banyuwangi Cerdas pada tahun 2017 sebesar Rp 7 miliar naik dibandingkan alokasi 2016 yang sebesar Rp 3,75. Setiap tahun, alokasi beasiswa Banyuwangi Cerdas terus ditingkatkan. Program tersebut dimulai pada 2011 dengan alokasi dana yang terus meningkat.

Pada tahun 2011 anggaran banyuwangi cerdas disalurkan dana sebesar Rp 788 juta, tahun 2012 berikutnya anggaran yang disalurkan mengalami peningkatan sebar Rp 1,8 miliar, lalu pada tahun 2013 peningkatan alokasi anggaran sebesar Rp 2,07 miliar, pada tahun 2014 berikutnya anggaran yang disalurkan sebesar Rp

2,85 miliar, berikutnya tahun 2015 anggaran yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar Rp 3,2 miliar, setelah itu peningkatan terjadi pada tahun 2016 berikutnya Rp 3,75 miliar dan hingga pada tahun 2017 meningkat tinggi sebesar Rp 7 miliar. Maka, jika ditotal sejak tahun 2011 sampai 2017 anggaran dana yang telah disalurkan lebih dari Rp 15 miliar kepada lebih dari 700 mahasiswa asli Banyuwangi yang berkuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Calon penerima bantuan program Banyuwangi cerdas dalam implementasinya dapat memilih kampus dan jurusan yang diinginkan. Namun untuk kuliah lewat jalur bidik misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya menyediakan tiga tempat yakni Unej, IAIN Jember, dan UT.

Mekanisme pelaksanaan Program banyuwangi cerdas dibagi, sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan penetapan penerima Program Banyuwangi Cerdas
- b. Pengalokasian dan pencairan dana Program Banyuwangi Cerdas
- c. Laporan pertanggungjawaban Program Banyuwangi Cerdas
- d. Monitoring Program Banyuwangi Cerdas

Kesimpulan dari tujuan Program Banyuwangi Cerdas (BPC) sendiri adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang layak, baik dan lebih berkualitas kepada masyarakat ekonomi bawah. Sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengayam bangku pendidikan yang nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Harapan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi terjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Sukmadinata, 2007). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti melakukan pengamatan dengan terjun lapang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah dalam implementasi Program Banyuwangi Cerdas. Seperti pendapat Sugiyono (2015: 6) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data secara valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif ini adalah:

1. Metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.
2. Metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajam-penajam, pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
3. Metode kualitatif lebih muda menyesuaikan apabila nantinya berhadapan dengan kenyataan ganda.

Berdasarkan alasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan kualitatif diskriptif mampu melihat proses yang dilakukan dengan hasil memperoleh identifikasi, mendiskripsikan, dan mengeksplorasi penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang proses implementasi Program Banyuwangi Cerdas dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup yang dijadikan sebagai wilayah penelitian, untuk membatasi studi sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan juga dapat menyaring informasi yang lebih relevan. Sehingga peneliti memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti, sekaligus untuk mengklarifikasi penelitian yang ditemukan peneliti di lapangan dengan mengklarifikasikan pembahasan yang harus di bahas secara menyeluruh dan mendalam. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini diantaranya :

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas (PBC) dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, secara administratif dan politik, diantaranya:
 - a. Sosialisasi dan penetapan penerimaan Program Banyuwangi Cerdas.
 - b. Pengalokasian dan pencairandanaProgram Banyuwangi Cerdas.
 - c. Laporan pertanggungjawaban Program Banyuwangi Cerdas.

d. Monitoring Program Banyuwangi Cerdas.

2. Faktoryang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas (PBC) di Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

a. Faktor Pendukung

1) Faktor Internal: tersedianya sumber anggaran, peraturan daerah yang mendukung, komitmen seluruh stake holder, dan tingginya motivasi.

2) Faktor Eksternal: partisipasi masyarakat.

b. Faktor Penghambat

1) Faktor Internal: pencairan dana yang terlambat.

2) Faktor Eksternal: budaya menikah usiadini dan menguundurkan diri karena alasan tidak cocok dengan jurusan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat Moleong (2011: 128). Lokasi penelitian adalah tempat atau letak dimana peneliti akan fenomena dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dengan permasalahan yang telah diambil peneliti. Dalam peneltian ini, peneliti memilih lokasi pada penelitian disalah satu instansi

pemerintah yaitu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan :

1. Kabupaten Banyuwangi dalam pembangunan pada sektor pendidikan pernah mendapat penghargaan *Pro Poor Award* 2014 tingkat provinsi.
2. Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten yang melaksanakan kebijakan bantuan pendidikan Program Banyuwangi Cerdas.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat memperoleh validitas data informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian. Adapun kegunaan dari validitas data informasi dan data berkaitan dengan penelitian yang didapat tersebut adalah untuk menjawab segala permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang telah ditetapkan. Adapun situs yang dipilih adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, penerima kebijakan program banyuwangi cerdas.

Dari situasi peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan Implementasi Program Banyuwangi Cerdas. Secara umum situs penelitian diatas pertimbangan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian.
2. Mampu memberikan masukan, baik berupa orang, program, struktur interaksi, dan sebagai yang sesuai dengan ketentuan diskripsi mendalam.
3. Sebagai pelaksana utama program bantuan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.
4. Sebagai objek kebijakan program bantuan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Sedangkan data-data tersebut digali dan diperoleh dari berbagai nara sumber yang berkaitan dengan implementasi Program Banyuwangi Cerdas. dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Orang/Informan

Data yang diperoleh dari narasumber asli dengan objek yang diteliti dengan cara melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Drs. Sulihtiyono, S.pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- b. Bapak Drs. Dwiyanto selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- c. Ibu Hj. Sumiati, S.Sos selaku Kepala Sub.Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- d. Ibu Drs. Nuriatus Sholeha, M.Pd selaku Kepala Sub.Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- e. Bapak Drs. Sutikno, M.Pd selaku Kepala Sub.Bagian Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- f. Peserta didik penerima Program Banyuwangi Cerdas, diantaranya:
 1. Dewi Retnosari
 2. Leoda Zulfikar Asrusani

2. Peristiwa

Peristiwa adalah sumber data yang diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian, Dengan mengamati peristiwa atau aktivitas tersebut peneliti dapat melakukan *cross check* terhadap informasi verbal yang diberikan subjek yang diteliti. Peristiwa yang menjadi fokus penelitian meliputi pelaksanaan program banyuwangi cerdas dalang rangka mendukung penjaminan pendidikan yang berpedoman pada proses pemilihan penerima bantuan program banyuwangi cerdas mulai proses sosialisasi dan pendaftaran sampai pembuatan laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh penerima bantuan program banyuwangi cerdas.

3. Dokumen

Dokumen adalah data- data yang sudah tersedia dan diperoleh oleh peneliti dari dokumen- dokumen atau arsip- arsip, buku, jurnal, artikel, dan sumber referensi atau literatur lain yang terkait dengan judul penelitian ini. Dokumen ini berkaitan dengan fokus penelitian yang berupa :

- a. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas.
- b. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

- c. Data Jumlah Anak Penerima Bantuan PBC Berdasarkan Hasil Identifikasi Keputusan Bupati Tahun 2016.
- d. Biaya Rancangan Anggaran Yang Sudah Diberikan Dinas Pendidikan Tahun 2016.
- e. Data Pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas Dinas Pendidikan
- f. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas.
- g. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- h. Data Jumlah Anak Penerima Bantuan PBC Berdasarkan Hasil Identifikasi Keputusan Bupati Tahun 2016.
- i. Biaya Rancangan Anggaran Yang Sudah Diberikan Dinas Pendidikan Tahun 2016.
- j. Dokumen - dokumen Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas Dinas Pendidikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data, dalam penelitian diperlukan teknik pengumpulan data karena dapat memperoleh sesuai yang diharapkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Adapun teknik untuk

memperoleh sumber data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Esterberg (dalam sugiyono 2014 : 231) mendefinisikan interview atau wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal- hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara ini menggunakan semistruktur dimana pelakana lebih bebas dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka, diaman pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide- idenya terkait implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013, tentang program Banyuwangi cerdas dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini yang dijadikan sebagai narasumber sebagai berikut:

- a. Bapak Drs. Sulihtiyono, S.pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- b. Bapak Drs. Dwiyanto selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- c. Ibu Hj.Sumiaty,S.Sos selaku Kepala Sub.Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

- d. Ibu Drs. Nuriatus Sholeha, M.Pd selaku Kepala Sub.Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- e. Bapak Drs. Sutikno, M.Pd selaku Kepala Sub.Bagian Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- f. Peserta didik penerima program Banyuwangi cerdas, diantaranya:
 - 1. Dewi Retnosari
 - 2. Leoda Zulfikar Asrusani

2. Dokumetasi

Pengumpulan data dari arsip yang mengandung fokus penelitian disebut dokumentasi. Moleong (2007: 217) menjelaskan bahwa dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Data yang terkait dokumen dalam implementasi program banyuwangi cerdas diantaranya PERBUB tentang program Banyuwangi cerdas, data penerima program Banyuwangi cerdas, alokasi anggaran program Banyuwangi cerdas dan dokumen terkait lainnya terkait program tersebut.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mencari data. Dalam penelitian kualitatif penulis sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan data yang utama (Moleong, 2007: 135).

Adapun instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipakai dalam membahas penelitian, yaitu :

1. Peneliti sendiri

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif, dimana pengumpul data lebih tergantung kepada peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen utama dengan menggunakan panca indra untuk mengamati objek atau fenomena dalam penelitian ini.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara yaitu beberapa daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan dan digunakan oleh peneliti sebagai kerangka dasar dalam mengadakan wawancara dengan orang yang terlibat sebagai sumber utama penelitian. Sehingga pembahas terfokus pada pokok permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian ini data dan tanggapan yang dibutuhkan terhadap pihak- pihak terkait dengan penelitian adalah berbagai hal tentang Implementasi Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi.

3. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang adalah alat yang diperlukan peneliti dalam mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam pengumpulan data di lapangan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku catatan, alat tulis, kamera, dan handphone sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan secara visual sesuai kejadian di lapang.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan pokok penelitian sesuai dengan data. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2014: 246) Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penelitian akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Model analisis yang digunakan peneliti adalah metode pengumpulan data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman and Saldana (2014: 12-13). Alasan penggunaan analisis ini dikarenakan alur dalam analisis lebih terarah dengan jelas. Adapun komponennya adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya adalah proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilih-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan peneliti.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

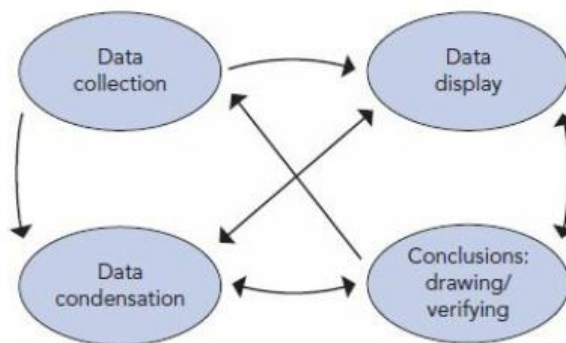
Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, panyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawanging/ virification*)

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data penelitian berusaha untuk menganalisis dan mencari pemhaman yang tidak memiliki pola, mencatat penjelasan, dan sebab alur akibat yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.

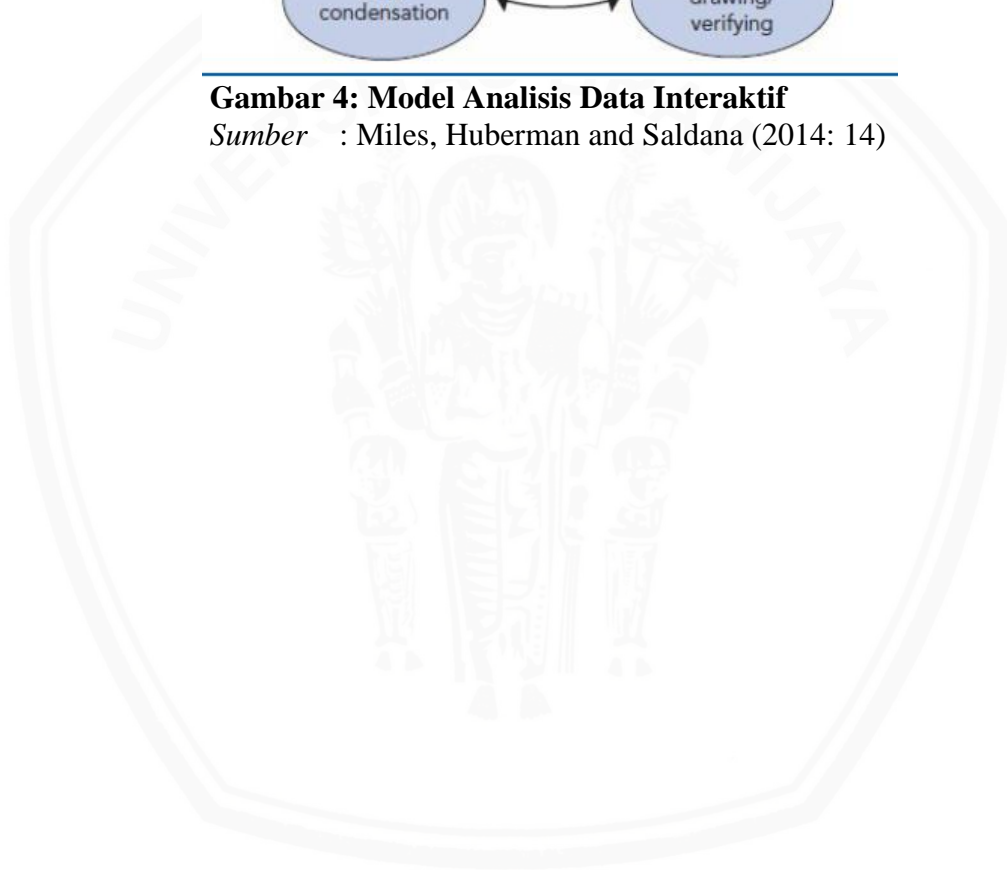
Kesimpulan juga merupakan pembuktian dari proses analisis. Pembuktian tersebut bisa sejak singkat ide yang lewat hanya beberapa detik saja dalam pikiran saat sedang menulis, bisa juga datang dari ingatan tentang catatan lapangan, bisa sepenuhnya data terperinci, dengan argumen yang panjang dan beberapa tinjauan dikembangkan kembali atau dengan usaha yang lebih luas mencari berbagai macam informasi kemudian menyalin penemuan tersebut kedalam kumpulan data lain, sehingga didapatkan gambaran bagaimana implementasi kebijakan Program Banyuwangi Cedar di Kabupaten Banyuwangi. selanjutnya bahan dipertimbangkan untuk menarik kesimpulan dan pemberian saran penelitian.

Gambar model interaktif yang dikembangkan oleh Miles Huberman dan Saldana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4: Model Analisis Data Interaktif

Sumber : Miles, Huberman and Saldana (2014: 14)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

a. Keadaan Geografis

Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 400, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila disbanding dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai untuk ketersediaan budidaya pertanian.

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten paling luas se-Jawa Timur, dengan luas wilayah 5.782,50 km². Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagian

besar masih merupakan daerah kawasan hutan, karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72 persen; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44 persen dan perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21 persen; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04 persen. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti lading dan lain-lainnya.

Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur. Disamping potensi dibidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif ke depan, pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.

Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah pulau sebanyak 15 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi. Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara dimana di dalamnya

terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah.

Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak antara $7^{\circ} 43' - 8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 53' - 114^{\circ} 38'$ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Banyuwangi mempunyai ketinggian antara 25 – 100 meter di atas permukaan air laut.

Secara administratif Kabupaten Banyuwangi mempunyai batas daerah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.
- 2) Sebelah Timur : Selat Bali.
- 3) Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.



Gambar 5: Letak Geografis Kabupaten Banyuwangi.

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 24 Kecamatan, 189 Desa dan 28 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1.	Pesanggaran	5	-
2.	Siliragung	5	-
3.	Bangorejo	7	-
4.	Purwoharjo	8	-
5.	Tegaldlimo	9	-
6.	Muncar	10	-
7.	Cluring	9	-
8.	Gambiran	6	-
9.	Tegalsari	6	-
10.	Glenmore	7	-
11.	Kalibaru	6	-
12.	Genteng	5	-
13.	Srono	10	-
14.	Rogojampi	18	-
15.	Kabat	16	-
16.	Singojuruh	11	-
17.	Sempu	7	-
18.	Songgon	9	-
19.	Glagah	8	2
20.	Licin	8	-
21.	Banyuwangi	-	18
22.	Giri	2	4
23.	Kalipuro	5	4
24.	Wongsorejo	12	-
JUMLAH		189	28

Sumber: Banyuwangi Dalam Angka (BDA) Tahun 2015.

b. Keadaan Demografi

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah social dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 mencapai 1.668.438 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 838.856 jiwa (50,28%) dan jumlah

penduduk perempuan 829.582 jiwa (49,72%). Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 0,35 jiwa/km² dari luas wilayah sebesar 5.782,50km².

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan
Kolompok Umur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015**

No	Kelompok Umur / Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	49.486	46.346	95.832
2	5 - 9	63.134	59.889	123.023
3	10 - 14	67.250	63.457	130.707
4	15 - 19	65.728	61.823	127.551
5	20 - 24	63.095	59.449	122.544
6	25 - 29	59.395	56.425	115.820
7	30 - 34	64.001	63.817	127.818
8	35 - 39	65.486	66.671	132.157
9	40 - 44	66.969	70.001	136.970
10	45 - 49	63.066	64.566	127.632
11	50 - 54	56.180	58.536	114.716
12	55 - 59	47.802	47.986	95.788
13	60 - 64	36.446	33.384	69.830
14	65 - 69	27.304	28.701	56.005
15	70 - 74	20.868	20.898	41.766
16	> 75	22.646	27.633	50.279
	JUMLAH	838.856	829.582	1.668.438

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Penduduk Kabupaten Banyuwangi sebagian besar bermata pencaharian bidang wiraswasta yang mendominasi keseluruhan jumlah penduduk yaitu mencapai 462.956 jiwa atau 27,75% dari Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 sebesar 1.668.438 jiwa. Secara terperinci jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan mata pencaharian, diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015**

No	Mata Pencarian	Jumlah	Prosentase
1.	Belum / Tidak Bekerja	443.342	26,57
2.	Pelajar / Mahasiswa	251.937	15,10
3.	Pertanian / Peternakan / Perikanan	308.092	18,47
4.	Perdagangan	30.419	1,82
5.	Industri	1.164	0,07
6.	Jasa Kemasyarakatan	284	0,02
7.	Konstruksi	730	0,04
8.	Pemerintah	28.025	1,68
9.	Swasta	93.003	5,57
10.	Wiraswasta	462.956	27,75
11.	Lainnya	48.486	2,91
JUMLAH		1.668.438	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SD/Sederajat yaitu sebesar 586.501 atau 35,15% dari jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 sebesar 1.668.438 jiwa, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 2011-2015

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tidak/Belum pernah sekolah	8.92	6.47	6.40	5.49	8.64
2.	Tidak/Belum tamat SD/MI	25.05	24.54	26.38	26.86	23.01
3.	SD/MI	28.71	29.11	28.60	28.24	30.03
4.	SLTP	19.78	18.87	17.82	19.16	20.46
5.	SMA	14.45	16.20	17.50	16.20	13.92
6.	Perguruan Tinggi	3.10	4.81	3.30	3.64	3.93

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahun terakhir tercatat lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan di Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,59 persen, sedangkan di Jawa Timur sebesar 6,27 persen. Pada kurun waktu tiga tahun terakhir yakni mulai tahun 2012-2014, tren pertumbuhan Banyuwangi mulai mengalami perlambatan. Tren perlambatan terjadi di hampir semua daerah seluruh Indonesia seiring dengan imbas pelemahan ekonomi tingkat global. Di balik itu, sejumlah sektor ekonomi justru mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan tertinggi tercatat di sektor akomodasi makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 10,33 persen. Pertumbuhan ini nampaknya seiring dengan gencarnya promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sektor yang terkait pariwisata juga mengalami kenaikan signifikan. Salah satunya adalah transportasi dan perdagangan yang pertumbuhannya sebesar 8,42 persen. Pertumbuhan juga terjadi di sejumlah sektor ekonomi lainnya, seperti kategori industri pengolahan mencapai sebesar 7,30 persen.

Yang menggembirakan, di saat sektor real estate di sejumlah kota besar mengalami stagnasi, di Banyuwangi justru mengalami pertumbuhan yang konsisten menjadi sebesar 9,79 persen. Ini menunjukkan sektor industri dan properti juga mengalami perkembangan yang positif. Sektor perumahan memang terus berkembang, sejumlah investor properti nasional pun mulai masuk ke Banyuwangi. Masuknya pengembang perumahan skala besar menunjukkan bahwa sejumlah pebisnis masih melihat Banyuwangi sebagai daerah yang prospektif

untuk pengembangan usaha. Sementara itu untuk wilayah tapal kuda, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sebesar 5,91 persen masih yang tertinggi dari Malang, Blitar dan Kediri.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi ditopang oleh sektor-sektor ekonomi secara lebih merata mulai dari pertanian, kehutanan, pertambangan, industri, konstruksi, perumahan dan pariwisata. Selain itu pendapatan per kapita juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 25,5 juta/orang/tahun, kini menjadi Rp. 33,6 juta/orang/tahun. Selanjutnya jika dilihat dari tingkat inflasi, Kabupaten Banyuwangi mencapai sebesar 2,15 persen dan jika dibandingkan dengan Jawa Timur sebesar 3,08 persen.

Berdasarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan, maka diperkirakan stabilitas ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dalam tahun 2015 tetap dijaga, dan diharapkan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menumbuhkan sektor modern seperti jasa dan manufaktur, namun tetap harus dipastikan pertumbuhan juga terjadi di sektor-sektor menengah ke bawah, sehingga ekonomi kerakyatan dapat terwujud.

d. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banyuwangi

1) Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Banyuwangi dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan **ABDULLAH AZWAR ANAS (Bupati) – YUSUF**

WIDYATMOKO (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”.

2) Misi

Untuk mewujudkan Visi pasangan ABDULLAH AZWAR ANAS (Bupati) dan YUSUF WIDYATMOKO (Wakil Bupati) ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

- a) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
- b) Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- c) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
- d) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik;
- e) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan

3) Tujuan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi 2011-2015 ditetapkan 7 (tujuh) tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan.
- b) Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemadirian ekonomi masyarakat.
- d) Meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi.
- e) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik.
- f) Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana fisik.
- g) Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi (disingkat Dispendik Kab Banyuwangi) adalah Suatu Kerja Perangkat Daerah yang ada dalam pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang membidangi urusan pendidikan. Lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi berada di Jalan KH Agus Salim No. 5, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.



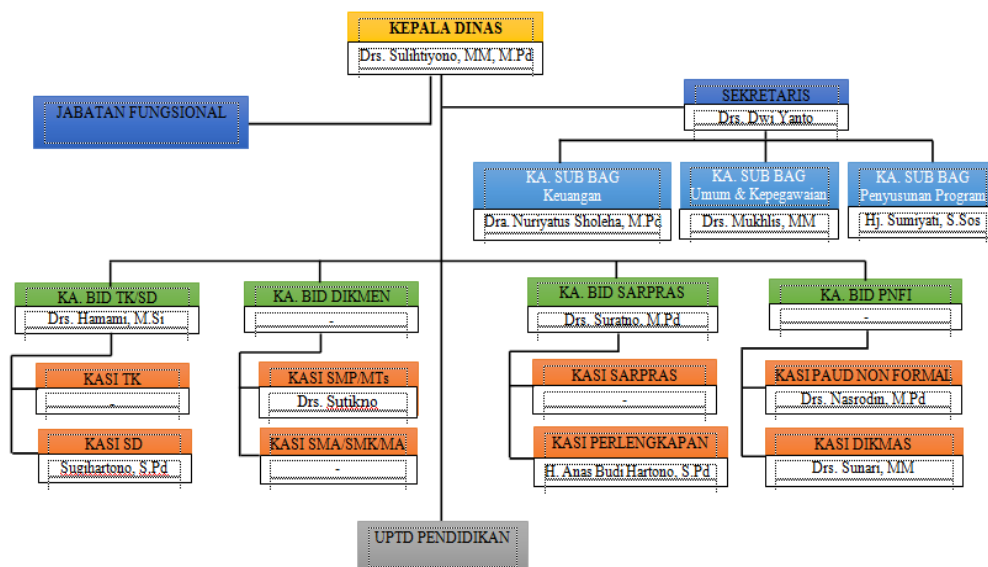
Gambar 6: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2017.

a. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati. Berikut, bagan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 7: Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017.

Uraian tugas dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

a) Dinas Pendidikan terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Sekretariat;
3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Bidang Pendidikan SD;
5. Bidang Pendidikan SMP;
6. Bidang Pendidikan Masyarakat; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

b) Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Penyusunan Program

c) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini membawahi:

1. Seksi Peningkatan Mutu PTK PAUD dan
2. Seksi Sarana Prasarana PAUD .

d) Bidang Pendidikan SD:

1. Seksi Peningkatan Mutu dan PTK Pendidikan Sekolah Dasar;
dan
2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar.

e) Bidang Pendidikan SMP membawahi :

1. Seksi Peningkatan Mutu dan PTK Pendidikan Sekolah Pertama;
dan
2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Pertama.

f) Bidang Pendidikan Masyarakat membawahi:

1. Seksi Keaksaraan dan kesetaraan; dan
2. Seksi Kursus dan Pelatihan.

2) Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari:

a) Tugas Pokok

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

b) Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
3. Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

a. Visi

Visi adalah merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Pendidikan di Kabupaten Banyuwang harus dibawa dan agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dengan eksistensinya dalam kerangka pembangunan. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Berpijak atas dasar kondisi obyektif serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yakni: ***"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQ MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA***

MANUSIA” dengan issue strategis: ”Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak”, Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

“TERLAKSANANYA LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN UNTUK MEMBENTUK MANUSIA BANYUWANGI CERDAS“

Penjelasan Visi :

Yang dimaksud Layanan prima :

- 1) Tersedia secara merata diseluruh Kabupaten Banyuwangi
- 2) Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
- 3) Berkualitas dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Setara untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi
- 5) Kepastian bagi masyarakat Banyuwangi mengenyam pendidikan.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatugerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi adalah:

- 1) Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan.
- 2) Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan.
- 3) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan swasta sebagai mitra
- 6) pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan.

c. Tujuan

- 1) Tersedia dan terjangkau layanan PAUD oleh pemerintah dan masyarakat.
- 2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu.
- 3) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu.
- 4) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 5) Tersedianya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan.

d. Sasaran

- 1) Meningkatkan perluasan paud formal dan non formal.
- 2) Meningkatkan daya tampung dan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 3) Meningkatkan daya tampung, sarana prasarana dan pendirian unit sekolah baru pendidikan menengah.
- 4) Meningkatkan pendidikan non formal melalui pusat kegiatan belajar masyarakat dan lembaga kursus.
- 5) Meningkatkan tata kelola dan layanan pendidikan.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

a. Sosialisasi dan Penetapan Penerima Bantuan Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi.

Suatu perencanaan kegiatan kebijakan sangat diperlukan adanya implementasi suatu kebijakan yang akan dicanangkan oleh pemerintah suatu daerah yang akan melakukan kegiatan pembangunan. Hal ini, terkait dengan segala kebijakan aturan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu Negara. Berkenaan dengan sosialisasi dan penetapan bantuan kebijakan pendidikan penting untuk dijabarkan. Hal ini, digunakan untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana proses implementasi Program Banyuwangi Cerdas dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Program Banyuwangi Cerdas itu sendiri tertuang pada dasar hukum dalam implementasi kebijakan Program Banyuwangi Cerdas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk standar pelaksanaan program banyuwangi cerdas bertumpu pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas pembantuan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dasar yaitu pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Banyuwangi Cerdas, dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pealaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Drs. Sulihtiyono M,M, M,Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi selaku penanggung jawab program banyuwangi cerdas, sebagai berikut:

“Jadi, kebijakan yang kami ambil berupa aturan yang terikat terhadap masyarakat. Pada pelaksanaannya Program Banyuwangi Cerdas mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Banyuwangi Cerdas, yang selanjutnya mengadopsi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama melalui pemerataan pendidikan dengan memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat secara gratis. Permasalahannya adalah meski sekolah 12 tahun gratis, namun masih terdapat anak putus sekolah. Hal ini, dikarenakan tidak semua kebutuhan sekolah dipenuhi oleh pemerintah pusat. Terkait masih ada pemungutan biaya seperti uang gedung ketika daftar ulang dan masih banyak lainnya yang membuat masyarakat berekonomi lemah tidak bisa mengayam pendidikan lebih tinggi. Untuk pendidikan tinggi juga masih banyak peserta didik yang tidak melanjutkan sekolah, hal ini dikarenakan kendala biaya untuk mendapatkan pendidikan. Melalui kebijakan Program Banyuwangi Cerdas ini solusi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengatasi pemungutan dengan pemberian kekebalan dan beasiswa kepada peserta didik berekonomi lemah.” (Hasil wawancara Selasa, 3 Januari 2017 jam 01:00 WIB di ruang kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Kesimpulan hasil wawancara tersebut Program Banyuwangi Cerdas mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Banyuwangi Cerdas dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sintem Pendidikan Nasional. Berikut data penguat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi:

No .	DASAR HUKUM
1.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2.	Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.	Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4.	Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5.	Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6.	Undang-Undang No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7.	Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8.	Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10.	Undang-Undang No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11.	Undang-Undang No. 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
12.	Undang-Undang No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
13.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
14.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
15.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
16.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 6: Dasar Hukum Program Banyuwangi Cerdas.

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2017.

Menangulangi permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, maka pemerintah dalam program ini menentukan Tujuan dan objek sebagai sasaran utama kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Meningkatkan kualitas pendidikan disini adalah upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pemberian dukungan penjaminan kelangsungan pendidikan melalui kebijakan yang diimplementasikan pada Program Banyuwangi Cerdas. Sehingga bermanfaat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, siap bersaing dengan harga jual yang tinggi ketika memasuki dunia kerja dan bermanfaat guna untuk Kabupaten Banyuwangi.

Objek sasaran utama dari program ini adalah siswa-siswi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang terkendala biaya atau kurang beruntung dalam segi ekonomi namun memiliki prestasi. Seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Drs. Dwiyanto selaku Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PBC Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

“Jadi begini mbak, awal mula program banyuwangi cerdas (PBC) ini digagas oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mulai tahun 2011. Program Banyuwangi Cerdas tersebut merupakan inovasi dalam pembangunan kualitas pendidikan guna meningkatkan indeks pembangunan manusia yang sedang berlangsung di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah beranggapan salah satu faktor berkembangnya suatu wilayah dikarenakan memiliki kualitas pembangunan pendidikan yang baik sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik pula. Terkait sasaran utama program banyuwangi cerdas ini adalah putra/putri asli daerah di Kabupaten Banyuwangi dari siswa-siswi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang terkendala biaya atau kurang beruntung dalam ekonomi tapi berprestasi.” (Hasil wawancara Jumat, 2 Desember 2016 jam 16:04 WIB di ruang sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Mengacu pada petikan wawancara tersebut, sasaran utama Program Banyuwangi Cerdas adalah peserta didik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang memiliki prestasi namun, terkendala biaya atau miskin (secara swadaya ekonomi) yang merupakan putra/putri daerah Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan Program Banyuwangi Cerdas dalam rangka mendukung penjaminan keberlangsungan pendidikan dinilai mampu meningkatkan indek pembangunan manusia melalui pendidikan.

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Sumiyati, S. Sos selaku KASUBBAG Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

“Sasaran utama Program Banyuwangi Cerdas merupakan peserta didik putra daerah yang tergolong kurang (secara swadaya ekonomi). Karena program ini diharapkan mampu memberikan kesempatan mengayam pendidikan dari semua golongan ekonomi lemah tanpa adanya perbedaan. Jadi secara teknis pemerintah Kabupaten Banyuwangi berusaha memberikan rasa peduli kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan golongan dari tingkat ekonominya”. (Hasil wawancara Jumat, 2 Desember 2016 jam 13:04 WIB di ruang penyusunan program Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Jadi, kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa program banyuwangi cerdas merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Maksud bentuk kepedulian yang diberikan di sini adalah bagaimana pemerintah membuat inovasi kebijakan dibidang pendidikan melalui pembangunan pendidikan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkendala biaya karena ketimpangan ekonomi untuk tetap merasakan bangku sekolah setinggi-tingginya.

Selain itu untuk menjalankan sebuah kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Maka, untuk pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas Kabupaten Banyuwangi, pemerintah bekerjasama dengan beberapa pihak. Seperti dinyatakan dalam hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sulihtiyono M,M, M,Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai penanggungjawab program banyuwangi cerdas, sebagai berikut:

“Jadi begini mbak, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pembangunan pendidikan melalui Program Banyuwangi Cerdas melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Diantaranya, Dinas Pendidikan, seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, Perguruan Tinggi, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi dan pihak swasta dalam proses revitalisasi yang bantuan hibah, sedangkan pihak lainya kami juga melakukan kerjasama dengan masyarakat yang berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pendanaan dan bantuan sumberdaya lainnya yang mendukung Program Banyuwangi Cerdas.” (Hasil Wawancara Selasa, 3 Januari 2017 jam 01:00 WIB di ruang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Selain itu untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menyusun langkah peran aktif/kewajiban pada setiap aktor yang berperan dalam kebijakan PBC, diungkapkan melalui hasil wawancara dengan Bapak Drs. Dwiyanto selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

“Kerjasama PBC itu mbak, dilaksanakan dengan berbagai pihak. Dinataranya lembaga pemerintah, satuan pendidikan, swasta, dan masyarakat. Bentuk kerja sama setiap lembaga itu sendiri berbeda sesuai porsinya masing-masing. Namun, terikat fungsi lembaga pemerintah disini adalah sebagai wadah pelaksanan kebijakan mulai unit tertinggi sampai unit terendah.” (Hasil wawancara Selasa, 3 Januari 2017 jam 01:00 WIB di ruang sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten banyuwangi dalam pelaksanaan PBC sudah bekerjasama dengan berbagai elemen yaitu: Dinas Pendidikan, seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, Perguruan Tinggi, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi dan pihak swasta. Secara khusus dalam pelaksanaan PBC di Kabupanten Banyuwangi, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi berperan sangat kuat karena sebagai penghubung antara PEMDA Banyuwangi dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya agar kebijakan PBC tersebut bisa diketahui oleh khalayak masyarakat, Dinas Pendidikan melakukan upaya tindakan berupa sosialisali program kebijakan pendidikan PBC kepada masyarakat.

Upaya sosialisasi itu sendiri dilakukan dengan berbagai cara mulai sosialisai langsung kepada masyarakat, sosialisasi kepada perguruan tinggi, sosialisasi kepada seluruh guru BK se-Kabupaten Banyuwangi hingga melalui media masa dan cetak. Maka, untuk mengetahui bagaimana proses implementasi dari PBC mengenai aspek tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ibu Sumiyati,S.Sos Ka. Sub Bagian penyusunan program PBC Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi:

“Kami, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan PERBUP yang ada, Dinas Pendidikan sudah berupaya sebaik-baiknya dalam pemberian hak masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wakil pemerintah daerah. Misalnya dalam pengarahan dan membimbing proses sosialisasi dan penetapan dalam seleksi Program Banyuwangi Cerdas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan mengiklanan PBC kepada masyarakat melalui media masa seperti radio, internet, bener dan koran, supaya masyarakat mengetahui bahwa pemerintah memiliki program pemberian bantuan dalam bidang pendidikan khususnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang membutuhkan bantuan dalam mengenyam pendidikan lebih tinggi.” (Hasil wawancara Selasa, 6 Desember 2016 jam 07:00 WIB di ruang penyusunan program Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Selain itu untuk mengetahui apakah pelaksanaan upaya sosialisasi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi sudah berhasil, Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Drs. Nuriatus Sholeha, M.Pd selaku Kepala Sub.Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

“Jadi begini mbak. Pelaksanaan sosialisasi PBC yang kami lakukan sudah terlihat hasilnya. Faktor ini dinilai dari semakin banyaknya jumlah masyarakat yang mendaftar Program Banyuwngi Cerdas pada setiap tahunnya.” (Hasil wawancara Jumat, 17 Feruari 2017 jam 08:10 WIB di ruang keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Hal ini juga diperkuat dengan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Leoda Zulfikar Asrusani selaku penerima bantuan program banyuangi cerdas. Berikut adalah hasil wawancara:

“Merurut saya mbak!. Upaya pemerintah untuk mengsosialisasikan kepada masysrakat sudah baik dan dapat dikatakan berhasil, karena awal mula tau Program Banyuwangi Cerdas, saya mendapatkan informasi ini melalui bener yang ada di sebagian jalan raya. Lalu saya penasaran untuk mencari infonya bersama teman-teman melalui alamat website Dinas Pendidikan yang tertera di bener tersebut dan memang benar ternyata program tersebut ada, sehingga saya dan teman-teman mendaftar bersama. Untuk langkah-langkah setiap tahap pendaftaran juga sudah jelas, mempermudah saya dan teman-teman ketika melakukan pendaftaran beasiswa Program Banyuwangi Cerdas.” (Hasil wawancara Jumat, 11 Agustus 2017 jam 16:30 WIB di Universitas PGRI Kabupaten Banyuwangi).

Dari hasil penelitian kepada beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi PBC mengenai upaya sosialisasi PBC sudah berhasil. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang sudah mengetahui kebijakan pendidikan (Program Banyuwangi Cerdas) yang dibuat oleh pemerintah. Berikut contoh sosialisasi info, iklan, dan pengarahannya pendaftaran Program Banyuwangi Cerdas:



Gambar 8: Sosialisai Pemberian Info Program Banyuwangi Cerdas Kepada Masyarakat di Kecamatan Kalipuro.

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwamgi, 2017.



Gambar 9: Sosialisai Dinas Pendidikan Dan Gerakan PKK Dalam Program Banyuwangi Cerdas Kepada Masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2017.



Gambar 10: Sosialisasi Program Banyuwangi Cerdas Yang Dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2017.



Gambar 11: Sosialisasi Iklan Program Banyuwangi Cerdas.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2017.



Gambar 12: Pedoman Pendaftaran Program Banyuwangi Cerdas.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2017.

Meski kebijakan PBC bersifat positif, akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang menyalah gunakan program banyuwangi cerdas ini. Seperti pernyataan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Drs. Sutikno,M.Pd. selaku Kepala Sub.Bagian Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

“Masih ada masyarakat yang menyalahgunakan kebijakan PBC, penyalahgunaan berupa masyarakat kaya yang berpura-pura menjadi masyarakat miskin untuk ikut serta dalam program yang di khususkan hanya untuk masyarakat tidak mampu (miskin).” (Hasil wawancara Kamis, 9 maret 2017 jam 08:00 WIB di ruang KA.BID.DIKMEN Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Agar implementasi penetapan beasiswa kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, perlu adanya kejelasan komponen sasaran Program Banyuwangi Cerdas yang diukur berdasarkan indikator yaitu persyaratan secara keseluruhan (umum, khusus, dan akademik), syarat umum, syarat khusus, syarat akademik, tahap pendaftaran, tahap seleksi. Hal ini sangat penting karena dapat mempermudah Dinas Pendidikan dalam merekrut penerima beasiswa PBC. Maka, untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kebijakan yang sama diperlukan indikator persyaratan tersebut. Persyaratan juga dapat digunakan sebagai dasar penilaian terhadap calon penerima beasiswa, misalnya prestasi yang dicapai, atau dapat melihat keahlian yang dimiliki oleh calon penerima beasiswa. Adanya persyaratan dapat digunakan untuk melihat *treck record* selama menjalani pendidikan sebelumnya, misalnya keahlian di bidang apa, seperti dikemukakan oleh Ibu Drs. Nuriatus Sholeha,M.Pd Ka. Sub Bagian Keuangan yang menangani pelaksanaan PBC Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

“Peryaratan dapat manilai dan menetapkan calon penerima beasiswa PBC.” (Hasil wawancara Rabu, 7 Desember 2016 jam 07:00 WIB di ruang keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Bapak Drs. Sutikno,M.Pd selaku Kepala Sub.Bagian Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah hasil wawancara: “Karena dapat digunakan sebagai tolak ukur dan memastikan *skill* calon penerima beasiswa tersebut.” (Hasil wawancara Kamis, 9 maret 2017 jam 08:00 WIB di ruang KA.BID.DIKMEN Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan Bapak Drs. Dwiyanto menjelaskan bahwa seleksi penetapkan penerima Program Banyuwangi Cerdas dilakukan dengan ketat melalui persayratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon peserta penerima beasiswa PBC. Adapun persyaratan penerima beasiswa, diuraikan sebagai berikut:

1) Persyaratan

a) Persyaratan Umum

(1) Persyaratan beasiswa khusus siswa miskin rintisan (Rintisan 12 tahun) :

(a) Surat keterangan masih aktif sekolah ditandatangani oleh Kepala Sekolah (SD, SMP, SMA/MA, dan SMK negeri/swasta)

(b) Surat keterangan tidak mampu/ miskin dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan mengetahui Camat

(2) Persyaratan beasiswa jenjang pendidikan tinggi:

(a) Beasiswa mahasiswa bidik misi tidak mampu (secara swadaya ekonomi)

1. Foto diri berukuran maksimal 2MB dengan format png
2. Foto rumah tampak depan
3. Foto lantai terluas
4. Foto kamar mandi
5. Foto rekening listrik
6. Foto pajak bumi dan bangunan (PBB)
7. Foto akter kelahiran/ kenal lahir
8. Foto kartu keluarga (KK)
9. Foto kartu kesehatan (BPJS, JAMKERMAS atau SK desa menerangkan tidak mampu dari Desa (Berisi keterangan gaji*))
10. Slip gaji/ (Surat keterangan tidak mampu dari Desa)

(b) Beasiswa tidak mampu berprestasi (secara swadaya ekonomi)

1. Permohonan mengajukan surat permohonan (proposal) kepada Bupati dengan disertai tanda tangan pemohon
2. Surat keterangan tidak mampu/ miskin dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan mengetahui Camat
3. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
4. Fotokopi kartu tanda mahasiswa

5. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) asli selama 1(satu) tahun atau 2 (dua) semester yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh Perguruan Tinggi (Setempel Basah).
6. Surat keterangan asli status mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi
7. Legalisir kartu hasil studi (KHS) atau indeks prestasi kumulatif (IPK) selama 2 (dua) semester dengan nilai minimal 3,5 (ttt asli bukan stempel) stempel lembaga
8. Mencantumkan Nomor HP yang selalu aktif

b) Persyaratan Khusus

- (1) Persyaratan beasiswa khusus siswa miskin rintisan (Rintisan 12 tahun):

- (a) Calon penerima siswa/siswi domisili putra/putri daerah Kabupaten Banyuwangi
- (b) Tergolong keluarga ekonomi di bawah rata-rata (tidak mampu)
- (c) Bersedia membantu dan mendatangani surat persyatratan
- (d) Bersedia melaksanakan pendidikan sekolah hingga tamat (12 tahun).

- (2) Persyaratan beasiswa jenjang pendidikan tinggi:

- (a) Calon penerima siswa/siswi domisili putra/putri daerah Kabupaten Banyuwangi
- (b) Tergolong keluarga ekonomi di bawah rata-rata (tidak mampu)
- (c) Bersedia membantu dan menadatangani surat peryataan

- (d) Melaksanakan kewajiban perkuliahan hingga tamat (4 tahun)
- (e) Bersedia mengabdikan di Kabupaten Banyuwangi selama 2 tahun
(dapat diperhitungkan untuk program penugasan wajib/PTT)
dalam Program Banyuwangi Mengajar

c) Akademik

- (1) Persyaratan beasiswa khusus siswa miskin rintisan (Rintisan 12 tahun):
 - (a) Memiliki Prestasi Akademik yang dibuktikan dengan sertifikat/buku rapor yang sah (asli) (Bila memiliki)
 - (b) Foto copy sertifikat/piagam penghargaan/ surat keterangan prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh (olahraga, kesenian atau bidang lainnya minimal di tingkat Kabupaten dengan meraih predikat 1, 2, atau 3) (Bila memiliki)
- (2) Persyaratan beasiswa jenjang pendidikan tinggi:
 - (a) Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA, dan SMK Negeri dan/atau Swasta Kabupaten Banyuwangi.
 - (b) Memiliki Prestasi Akademik yang dibuktikan dengan sertifikat/buku rapor yang sah (asli)
 - (c) Foto copy sertifikat/piagam penghargaan/ surat keterangan prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh (olahraga, kesenian atau bidang lainnya minimal di tingkat Kabupaten dengan meraih predikat 1, 2, atau 3) (Bila memiliki)

- (c) Penerima beasiswa adalah mahasiswa tidak mampu (miskin) dan berprestasi yang lolos seleksi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi, keterangan tidak mampu di buktikan dengan surat keterangan dari kelurahan/desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan pelaksanaan penetapan PBC dengan penjangkauan dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, penetapan penerima PBC yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi berbeda-beda.

Pertama, seleksi dan penetapan penerima PBC beasiswa khusus siswa miskin rintisan (Rintisan 12 tahun) dilakukan dengan cara koordinasi Internal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan, Kepala SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK se-Kabupaten Banyuwangi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK Negeri se-Kabupaten Banyuwangi dan Desa seluruh pelosok Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan pendaftaran penerima PBC jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya:

1. Siswa bisa mendaftar melalui sekolah ataupun Desa masing-masing wilayah di seluruh Kabupaten Banyuwangi melalui website: <http://pendidikan.banyuwangi.go.id/banyuwangicerdas> dengan menggunakan fasilitas pribadi, Sekolah ataupun Desa.
2. Mengirimkan dokumen proposal berupa PDF ke email: dispendik@banyuwangikab.go.id, dokumen yang dimaksud adalah berupa scaner surat permohonan orang tua, scaner surat keterangan dari

Desa dengan mengetahui Camat, scaner surat masih aktif sekolah, scaner surat kertu keluarga.

3. Setelah Dinas pendidikan mendapatkan calon penerima, Dinas Pendidikan melalui kepala dinas mengajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Kedua, Kegiatan seleksi penetapan penerima PBC pada jenjang pendidikan tinggi dilakukan dengan dua macam, yaitu:

1. Seleksi beasiswa mahasiswa bidik misi tidak mampu (secara swadaya ekonomi)

Poroses seleksi untuk beasiswa mahasiswa bidik misi tidak mampu (secara swadaya ekonomi) dilakukan dengan pendaftaran melalui online pada website Dinas Pendidikan www.pendidikan.banyuwangikab.go.id/, lalu pendaftar harus melakukan enam langkah untuk mendaftar Program Banyuwangi Cerdas, diantaranya:

- a. Searching website Dinas Pendidikan

www.pendidikan.banyuwangikab.go.id/.



Gambar 13: Website Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2017.

- b. Klik pilih menu banyuwangi cerdas.



Gambar 14: Menu Aplikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi .

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2017.

- c. Klik read more dikolom banyuwangi cerdas



Gambar 15: Website Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2017.

- d. Lihat universitas kemudian mulai daftar di kolom yang sudah disediakan.

No	Nama Universitas	Seleksi Banyuwangi Dibuka	Seleksi Banyuwangi Ditutup	Jadwal Seleksi Universitas Dibuka	Pengumuman Hasil Seleksi Universitas	Setatus
1	Universitas Jember	02 June 2017	15 June 2017	03 July 2017	07 June 2017	Daftar Sekarang
2	Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN)	02 June 2017	15 June 2017	01 July 2017	07 July 2017	Daftar Sekarang
3	Universitas Terbuka	02 June 2017	15 June 2017	04 July 2017	07 July 2017	Daftar Sekarang

Gambar 16: Website Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2017.

Gambar 17: Website Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2017.

Setelah proses pendaftaran selesai, pada tahap selanjutnya Dinas Pendidikan menentukan siapa yang lolos dalam tahap seleksi administrasi. Setelah itu Dinas pendidikan mengumumkannya melalui di website Dinas Pendidikan dan menghubungi pemohon beasiswa Program Banyuwangi Cerdas. Tahap kedua peserta didik yang sudah diterima pada tahap pertama ditinjau lapang untuk melihat secara langsung bahwa data yang diberikan sesuai atau tidak dan pantas tidaknya masuk dalam kategori yang telah ditetapkan. Setelah lolos seleksi lapang tahap ketiga, peserta

didik mendaftar di universitas yang dipilih yaitu (Univesitas Jember, Istitut Agama Islam Negeri Jember, Universitas Terbuka).

Setelah itu dilakukan kegiatan seleksi ujian tulis, ujian tulis al-qur'an dan baca al-qur'an (Khusus pendaftar IAINJ), dan wawancara. Materi ujian kompetensi dalam program ini merupakan koordinasi antara Pemerintah Kab. Banyuwangi dengan perguruan tinggi yang memiliki kerjasama secara resmi dengan PEMKAB Banyuwangi. Di sini perguruan tinggi diberikan kewenangan yang diatur dalam MOU (*Memorandum Of Understanding*) untuk menyeleksi mulai pembuatan soal ujian, seleksi tulis, tulis dan seleksi baca al-qur'an (Khusus pendaftar IAINJ), wawancara hingga menetapkan siapa yang lolos seleksi ujian untuk menjadi calon penerima beasiswa PBC.

Selanjutnya Dinas Pendidikan mengusulkan calon penerima Program Banyuwangi Cerdas lolos tahap ujian kompetensi kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa dengan keputusan Bupati. Pada tahap akhir Dinas Pendidikan memberikan pengumuman penerima Program Banyuwangi Cerdas melalui website Dinas Pendidikan dan menghubungi penerima beasiswa Program Banyuwangi Cerdas.

Pendaftaran Beasiswa Program Banyuwangi Cerdas Dibuka Secara Online yang dibantu langsung oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas di, sebagai berikut:



Gambar 18: Pendaftaran Secara Online Program Banyuwangi Cerdas.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2017.

2. Seleksi beasiswa mahasiswa tidak mampu berprestasi (secara swadaya ekonomi)

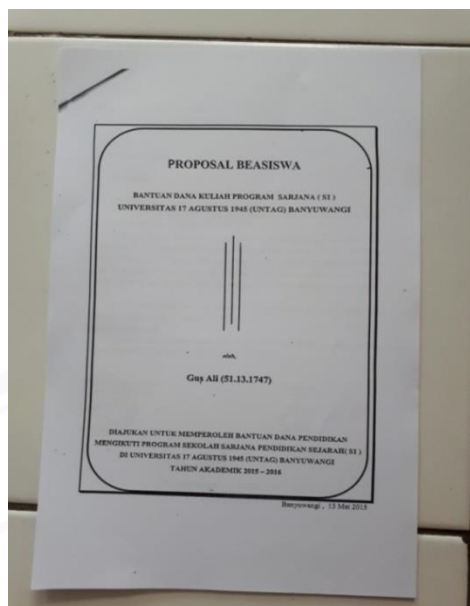
Poroses seleksi tatacara pengajuan permohonan dana untuk beasiswa harus cerdas tidak mampu/miskin berprestasi (secara swadaya ekonomi) dilakukan dengan beberapa tahap, daintaranya:

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan mengajukan surat permohonan (proposal) kepada Bupati dengan disertai tanda tangan pemohon
- b. Surat pemohon diwajibkan melampirkan seperti:
 - 1) Surat keterangan tidak mampu/ miskin dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan mengetahui Camat.
 - 2) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).
 - 3) Fotokopi kartu tanda mahasiswa.

- 4) Rancangan Anggaran Biaya (RAB) asli selama 1(satu) tahun atau 2 (dua) semester yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh Perguruan Tinggi (Setempel Basah).
- 5) Surat keterangan asli status mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi, f. Legalisir kartu hasil studi (KHS) atau indeks prestasi kumulatif (IPK) selama 2 (dua) semester dengan nilai minimal 3,5 (ttt asli bukan stempel) stempel lembaga
- 6) Mencantumkan Nomor HP yang selalu aktif

Setelah itu mahasiswa mendaftar di web: <http://pendidikan.banyuwangi.go.id/banyuwangicerdas>. Setelah web terbuka mahasiswa wajib mengisi 18 kriteria kemiskinan secara online dengan mengupload foto yang ada di form pendaftaran online. Untuk semua persyaratan yang ada di form pendaftaran online berupa semua persyaratan yang sudah tercantum di poin (a) dan poin (b) di PDF dan dikirim ke email: dispendik@banyuwangikab.go.id.

Ketika pengajuan pendaftar diterima maka akan diberikan konfirmasi yang berkelanjutan untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati. Berikut contoh bentuk pengajuan proposal pengajuan beasiswa program banyuwangi cerdas untuk seleksi beasiswa tidak mampu berprestasi (secara swadaya ekonomi), sebagai berikut:



Gambar 19: Proposal Pengajuan Calon Penerima Program Banyuwangi Cerdas.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2016.

Proses seleksi mahasiswa program banyuwangi cerdas yang dilaksanakan pada tanggal 3 agustus 2017 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan Universitas-universitas seperti (Universitas Negeri Jember, IAIN Jember, dan Universitas Terbuka), sebagai berikut:



Gambar 20: Seleksi Program Banyuwangi Cerdas.

Sumber : Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, 2016.



Gambar 21: Seleksi Baca dan Tulis ayat suci al-Quran Mahasiswa Program Banyuwangi Cerdas.

Sumber : Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, 2016.

Berikut ini proses TIM penelusuran tinjau lapang Program Banyuwangi Cerdas kepada Lazamitus Zahro yang telah lolos seleksi PBC IAIN Jember di Dsn. Selorejo Ds. Temurejo Kec. Bangorejo. Berdasarkan pengisian kriteria kemampuan ekomoni Program Banyuwangi Cerdas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 22: Proses TIM Penelusuran Tinjau Lapang Program Banyuwangi Cerdas.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2016.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi PBC sudah berhasil dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada PERBUB Nomor 15 Tahun 2013 tentang program banyuwangi cerdas. Bahwasannya pada implementasi PBC semua lembaga yang terkait sudah memahami bahwa hal yang paling penting dari mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah fungsi dan tercapinya tujuan. Hal itu yang mendasari proses seleksi hingga penetapan penerima Program Banyuwangi Cerdas yang dilaksanakan dengan ketat dan transparan, diharapkan implementasi terhindar dari adanya kecurangan dan mudahnya lapisan masyarakat perkotaan dan perdesaan untuk melakukan pendaftaran Program Banyuwangi Cerdas. Akan tetapi, masih terdapat beberapa masyarakat kurang bijak dengan adanya kebijakan bantuan pendidikan yang diberikan. Seperti adanya masyarakat berekonomi mampu yang berpura-pura menjadi masyarakat berekonomi lemah, padahal pemerintah menyediakan kuota terbatas untuk beasiswa yang diberikan. Alhasil masih banyak masyarakat berekonomi lemah yang kehabisan kuota untuk berkesempatan mendaftar. Jadi, perlu adanya kesadaran dan kerjasama masyarakat terkait didalamnya yang akan mempermudah dalam tahap implementasi berikutnya.

b. Pengalokasian dan Pencairan Dana Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi.

Agar pelaksanaan program kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka membutuhkan sumber daya yang dapat mendukung. Suatu program juga harus didukung dengan sumber daya yang memadai sehingga dapat terlaksana.

Sumber daya di sini berupa sumber daya anggaran seperti pada Program Banyuwangi Cerdas. Dalam pelaksanaannya Program Banyuwangi Cerdas juga membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat mencapai targer/tujuan yang diinginkan sehingga pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa Program Banyuwangi Cerdas ini didukung Sumber daya yang berperan di dalamnya, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Drs. Nuruatun S. M.Pd yang merupakan Kepala Bidang Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

“Dalam kebijakan pendidikan ini mbak!, sumber daya sangatlah berperan penting. Sumber daya menunjang Program Banyuwangi Cerdas ini adalah sumber daya anggaran. Sumber anggaran dalam Program Banyuwangi Cerdas ini adalah sumber anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi.” (Hasil wawancara Jumat, 17 Februari 2017 jam 08:10 WIB di ruang keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Hal ini juga dijelaskan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Drs. Sulitoyo, S. Pd, MM yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

“Terkait sumber anggaran dalam kebijakan Program Banyuwangi Cerdas ini berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi. Meski Hampir seluruh anggaran dari APBD tetapi anggaran PBC juga diperoleh dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat atau dalam bentuk hibah.” (Hasil wawancara Rabu, 7 Desember 2016 jam 07:00 WIB di ruang keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Wawancara di atas merupakan bentuk dukungan sumber daya anggaran untuk pendanaan PBC untuk mencapai tujuan kebijakan. Mengenai hasil wawancara dapat diketahui bahwa sumber daya anggaran itu sangat penting untuk

keberlangsungan kebijakan agar berjalan dengan baik. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya anggaran Program Banyuwangi Cerdas itu bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Suatu kebijakan atau program dalam implementasinya pasti memiliki implementator yang bertanggungjawab pada bidangnya. Seperti halnya siapa aktor yang bertanggungjawab menggambarkan tentang penganggaran Program Banyuwangi Cerdas. Secara teknis pengalokasian dana Program Banyuwangi Cerdas tersebut dilakukan oleh Sub bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan dibantu oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi (BPKAD). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Drs. Nuriatus Sholeha, M. Pd Ka. Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

“Pihak yang terlibat teknis pendanaan dalam implementasi Program banyuwangi cerdas ini tidak lain adalah Sub bagian keuangan mbak. Saya sebagai KASUBBAG Keuangan Dinas Pendidikan Banyuwangi di bantu staf yang menganggarkan tentang pengeluaran keuangan/ anggaran dalam Program Banyuwangi Cerdas. Lalu saya dan staf saya untuk menganggarkan yang diperlukan program ini lalu kami menyerahkan kepada BUPATI. Setelah mendapatkan Persetujuan BUPATI, kami rujuk di Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi (BPKAD).” (Hasil wawancara Jumat, 17 Februari 2017 jam 08:00 WIB di ruang keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Dari wawancara di atas diketahui bahwa Dinas Pendidikan yang terdapat tim pelaksana Program Banyuwangi Cerdas ini, pada pelaksanaan pengalokasian dana Program Banyuwangi Cerdas dilakukan oleh Sub bagian Keuangan Dinas

Pendidikan Kabupaten Banyuwangi (DISPENDIK). Dinas Pendidikan melalui Sub bagian keuangan berperan sebagai teknis dalam menganggarkan pengalokasian dana Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi. Tim lain dalam pengalokasian dana Program Banyuwangi Cerdas adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi (BPKAD) dan BUPATI Banyuwangi pemberi persetujuan dalam pengalokasian dana. *Supplier* pengalokasian dana PBC berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi dan adanya bantuan pihak ketiga berupa hibah. Dana tersebut dikelola untuk mendukung implementasi PBC dengan cara memberikan beasiswa kepada peserta didik yang memiliki potensi namun terkendala biaya pendidikan.

Berkenaan dengan pentingnya pengalokasian dana, pemerintah sudah menyediakan gucuran pengalokasian dana yang memang sudah menjadi sumber penting dalam kebijakan PBC. Pada pengalokasian dana Program Banyuwangi Cerdas juga sudah sesuai dengan jumlah anggaran yang selama ini dibutuhkan pada setiap tahunnya. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Drs. Nuriatus Sholeha, M. Pd Ka. Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dijelaskan sebagai berikut:

“Jadi mbak, Pada pengalokasian dana yang selama ini pemerintah berikan itu sudah sesuai dengan pengajuan anggaran yang dibuat oleh Dinas Pendidikan pada Sub Bagian keuangan. selama ini pemerintah sudah memenuhi kewajibannya dalam memberikan fasilitas sumber daya anggran sesuai dengan yang telah dibutuhkan” (Hasil wawancara Jumat, 17 Febuari 2017 jam 08:00 WIB di ruang keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Selain melakukan wawancara dengan Ibu Drs. Nuriatus Sholeha, M. Pd Ka. Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, peneliti juga melakukan wawancara kepada Dewi Retnosari selaku penerima bantuan Program Banyuwngi Cerdas IAIN Jember, yaitu:

“Untuk pengalokasian dana dari pemerintah selama ini sudah dipenuhi mbak. Semua pengalokasian bantuan beasiswa sudah sesuai kesepakatan awal saya dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan diatas matrai. Jadi menurut saya tidak ada masalah dalam pengalokasian dana dalam Program Banyuwngi Cerdas.”(Hasil wawancara Sabtu, 17 Desember 2016 jam 10:00 WIB di Ds. Kebaman Kabupaten Banyuwangi).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Pendidikan telah berusaha untuk memberikan apa yang sudah menjadi kewajibannya sesuai peraturan yang ditetapkan pada tahapan pengalokasian dana dan pemenuhan dana dalam kebijakan Program Banyuwngi Cerdas. Semua tidak terlepas dari komitmen semua pihak yang terlibat seperti Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi (BPKAD), Dinas Pendidikan (DISPENDIK), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Berikut adalah tabel penglokasian Sumber daya anggraan yang telah dialurkan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada penerima bantuan beasiswa Program Banyuwngi Cerdas, sebagai berikut:

Table 7. Dana Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Banyuwangi Cerdas.

No	PROGRAM	TAHUN	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	JUMLAH UANG	KET
1	BANYUWANGI MENGAJAR	2016	18	18		
JUMLAH					5.000.000.000	ALOKASI 2016
2	REWARD SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI	2016	8	8	185.000.000	
JUMLAH					185.000.000	
3	BEASISWA PRESTASI/TIDAK MAMPU	2011	97	97	700.000.000	
4	BEASISWA PRESTASI/TIDAK MAMPU	2012	75	75	650.000.000	
5	BEASISWA PRESTASI/TIDAK MAMPU	2013	76	76	650.000.000	
6	BEASISWA PRESTASI/TIDAK MAMPU	2014	103	103	648.355.000	
7	BEASISWA TIDAK MAMPU PRESTASI	2015	41	41	204.307.000	
8	CALON PENERIMA BEASISWA TIDAK MAMPU BERPRETASI	2016	50	50	600.000.000	ALOKASI 2016
JUMLAH			194	194	1.452.662.000	
9	BIDIK MISI UNEJ	2011	12	140	576.000.000	
		2012	47		2.256.000.000	
		2013	34		1.224.000.000	
		2014	23		552.000.000	
		2015	14		168.000.000	
		KEKURANGAN TAHUNANGGARAN 2013	10		120.000.000	
10	BIDIK MISI IAIN	2011	12	85	576.000.000	
		2012	17		816.000.000	
		2013	16		576.000.000	
		2014	15		360.000.000	
		2015	20		240.000.000	
		KEKURANGAN TAHUNANGGARAN 2013	5		60.000.000	
JUMLAH			225	225	7.524.000.000	
TOTAL DANA					14.161.662.000	

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah anggran Program Banyuwangi Cerdas bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi, dengan jumlah anggaran setiap tahunnya meningkat sesuai meningkatnya jumlah peserta didik yang mendapatkan bantuan beasiswa Program Banyuwangi cerdas. Kita lihat dari tabel diatas jika ditotal dari awal implementasi program ini pada tahun 2011 anggaran banyuwangi cerdas disalurkan mencapai Rp 788 juta, tahun 2012 berikutnya anggaran yang disalurkan mengalami peningkatan sebar Rp 1,8 miliar, lalu pada tahun 2013 peningkatan alokasi anggaran sebesar Rp 2,07 miliar, pada tahun

2014 berikutnya anggaran yang disalurkan sebesar Rp 2,85 miliar, berikutnya tahun 2015 anggaran yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar Rp 3,2 miliar, setelah itu peningkatan terjadi pada tahun 2016 menjadi Rp 3,75 miliar. Maka, jika ditotal sejak tahun 2011 sampai 2016 anggaran dana yang telah disalurkan dana Rp 14,4 miliar kepada lebih dari 700 mahasiswa asli banyuwangi yang berkuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Mengenai sudah ditetapkan penerima PBC, tahap selanjutnya pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan fasilitas kepada penerima program banyuwangi cerdas. Seperti bantuan kemudahan uang pendidikan beserta kartu PBC (Program Banyuwangi Cerdas). Pemerintah melalui Dinas Pendidikan memberikan pengertian kepada penerima beasiswa tentang langkah dan mekanisme apa yang memang harus dilalui akan alur pencairan dana beasiswa Program Banyuwangi Cerdas. Seperti hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara kepada Bapak Drs. Dwiyanto selaku Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PBC Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menjelaskan, sebagai berikut:

“Untuk melancarkan peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah, kami melakukan pembinaan terhadap penerima PBC. Pembinaan tersebut dilakukan secara rutin oleh Dinas Pendidikan setiap 6 bulan sekali. Dinas pendidikan mengundang seluruh penerima PBC yang baru dan lama di aula Dinas Pendidikan untuk menjelaskan dan memberikan pembekalan sehingga proses pencairan dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini bertujuan supaya penerima PBC dapat memahami semua mekanisme pencairan dalam kebijakan yang dibuat pemerintah.” (Hasil wawancara Rabu, 10 Mei 2017 jam 08:00 WIB di ruang keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Sedangkan untuk mengetahui mekanisme pencairan dana Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi, peneliti melakukan wawancara melalui Bapak Drs. Dwiyanto selaku Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PBC Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menjelaskan sebagai berikut:

“Jadi, begini mbk. Dalam mekanisme Pencairan program banyuwangi cerdas Pemerintah melalui Dinas Pendidikan sudah melaksanakan sesuai implementasi peraturan yang telah tertera. Mengenai aturan mekanisme implementasi pencairan dana program banyuwangi cerdas, Dinas Pendidikan mengacu pada peraturan bupati yang mengatur khusus pemberian hibah dan bantuan sosial di kabupaten banyuwangi dalam PERBUP Nomor 29 Tahun 2016 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta minoritas dan evaluasi hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dana bagi hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.” (Hasil wawancara Jumat, 2 Desember 2016 jam 16:30 WIB di ruang Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Berikut mekanisme isi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung dan menganggran beserta monitoring dan evaluasi hibah. Bantuan sosial, bantuan keuangan dan bagi hasil pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi:

A. Mahasiswa Bidik Misi Yang Tidak Mampu

- a. Penerima Beasiswa Bidik Misi dibiayai mulai tahun pertama perkuliahan sampai dengan selesai (8 semester atau 4 Tahun) akademik perkuliahan;
- b. Besarnya biaya perkuliahan diberikan dengan berpedoman pada APBD Kab. Banyuwangi dan Perbub tentang Penjabaran APBD Kab. Banyuwangi yang dibayarkan setiap awal tahun akademik perkuliahan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Mekanisme Pembayaran Kepada Perguruan Tinggi Negeri

- 1) Pembayaran beasiswa bidik misi yang menjadi hak perguruan tinggi dibayarkan pada awal semester melalui bendahara rektorat/perguruan tinggi;
- 2) Surat tagihan dari perguruan tinggi kepada Bupati Banyuwangi untuk pembayaran beasiswa bidik misi;
- 3) Dengan dasar persetujuan Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengajukan pencairan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Banyuwangi selaku Pengguna Anggaran;
- 4) Untuk pembayaran beasiswa bidik misi pada tahun kedua, ketiga dan keempat tagihan harus dilengkapi:
 - a) Surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;
 - b) Surat pernyataan menyelesaikan perkuliahan tepat waktu;
 - c) Kartu hasil study (KHS) atau indeks prestasi kumulatif (IPK) yang ditandatangani oleh Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK);
 - d) Salinan nomor rekening perguruan tinggi negeri tempat mahasiswa studi;

b. Mekanisme Pembayaran Kepada Mahasiswa Bidik Misi Program Banyuwangi Cerdas

- 1) Pembayaran beasiswa bidik misi yang menjadi hak mahasiswa bidik misi program Banyuwangi Cerdas dibayarkan melalui rekening mahasiswa bersangkutan;
- 2) Surat permohonan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dilampiri:
 - a) Surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;
 - b) Surat pernyataan menyelesaikan perkuliahan tepat waktu;
 - c) Kartu hasil study (KHS) atau indeks prestasi kumulatif (IPK) yang ditandatangani oleh Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK);
 - d) Salinan nomor rekening mahasiswa bidik misi program Banyuwangi Cerdas.

B. Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi.

1. Apabila perkuliahannya di lakukan sejak semester awal, maka pembiayaannya diberikan sampai selesai perkuliahan (8 semester atau 4 Tahun);
2. Apabila waktu menerima beasiswa tidak pada tahun pertama perkuliahan, maka pembiayaannya diberikan sampai selesai perkuliahan sampai 2 semester (satu kali pengajuan proposal);
3. Mahasiswa cukup melaporkan bantuan dana yang sudah diterima sesuai dengan nilai alokasi bantuan yang diterima kepada Bupati,

paling lama disampaikan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pencairan dana atau maksimal tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Untuk mengetahui apakah implementasi dari mekanisme pencairan sudah sesuai atau belum dengan aturan yang telah ditetapkan, maka peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Drs. Nuriatus Sholeha, M. Pd selaku Ka. Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk mengetahui apakah pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi sudah memberikan hak dan kewajibannya dalam proses pencairan, dijelaskan sebagai berikut:

“Jadi mbak, Pada proses pencairan dana beasiswa yang selama ini pemerintah berikan itu sudah sesuai dengan peraturan dan tahapan tentang bagaimana proses pencairan tersebut. Dinas Pendidikan pada Sub Bagian keuangan, selama ini sudah memenuhi kewajibannya dalam memberikan membantu, kemudahan dan mengarahkan langkah apa saja yang harus diambil supaya penerima beasiswa bisa lebih mudah dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana beasiswa tersebut. Dinas pendidikan juga sudah membantu dalam mengajukan langsung kepada Bupati untuk mencairkan dana tersebut. Namun, dikarenakan, bantuan sosial program banyuwangi cerdas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dengan mempertimbangkan ekonomi daerah. Proses implementasi pencairan dana PBC itu sendiri tidak bisa dipastikan, karena proses pencairan terkadang terdapat kendala meski jarang. Kendala yang dimaksud adalah Pada saat pengajuan pencairan sudah diajukan jauh-jauh hari oleh Dispendik kepada Bupati lalu disetujui dan disalurkan di BPKAD, Pencairan anggaran tidak bisa langsung dicairkan/cepat dicairkan. Terkadang bisa tepat waktu dan terkadang tidak. Sehingga adanya keterlambatan pencairan dana hingga beberapa bulan yang membuat penerima beasiswa bingung untuk datang kepada saya selaku KASUBAG Keuangan dan menguhungu saya kerena ingin menanyakan masalah pencairan dana tersebut.” (Hasil wawancara Jumat, 17 Febuari 2017 jam 08:00 WIB di ruang keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Selain melakukan wawancara kepada Dinas Pendidikan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi sudah memberikan hak dan kewajibannya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Dewi Retnosari selaku penerima bantuan program banyuwangi cerdas IAIN Jember.

Berikut adalah hasil wawancara:

“Sebenarnya untuk pemberian hak dan kewajiban pemenuhan fasilitas, pemerintah daerah dalam pelaksanaannya sudah diberikan. Tetapi, proses pencairan dana PBC tidak pasti kapan cair tiap bulannya terkadang bisa sampai tiga bulan baru cair. Dampaknya, saya sebagai salah satu penerima bantuan PBC harus mencari pinjaman dana untuk mengganti dana PBC yang belum turun dan untuk memenuhi kebutuhan. tetapi untuk pencairan dananya sudah pasti turun sesuai besaran yang telah diusulkan dan disetujui oleh bupati, hanya saja waktu pencairannya kurang konsisten sehingga ada kemoloran waktu dalam pencairan.” (Hasil wawancara Jumat, 17 Mei 2017 jam 10:30 WIB di Ds. Kebaman Kabupaten Banyuwangi).

Dari hasil penelitian di atas, baik berupa data dan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pencairan sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang telah dibuat yaitu PERBUP Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 tentang program banyuwangi cerdas dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung dan menganggran beserta monitoring dan evaluasi hibah. Tetapi proses pencairan dana mengalami keterlambatan yang membuat mahasiswa kebingungan dalam memenuhi kebutuhannya.

Mengenai fasilitas lainnya yaitu kartu Program Banyuwangi Cerdas, maka untuk mengetahui bagaimana proses implementasi dari PBC mengenai aspek tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Ibu Sumiyati, S.Sos Ka. Sub Bagian penyusunan program PBC Dinas Pendidikan

Kabupaten Banyuwangi, berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pihak PBC Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi:

“Jenis fasilitas kartu PBC ini dua macam yang sesuai dengan PERBUP Kabupaten Banyuwangi diantaranya jenis Kartu Banyuwangi Belajar dan Kartu Banyuwangi Cerdas. Kartu Banyuwangi Belajar diberikan untuk siswa tidak mampu SD hingga SMA/SMK, sedangkan Kartu Banyuwangi Cerdas ditujukan kepada mahasiswa bidikmisi dan mahasiswa tidak mampu berprestasi. Untuk implementasi PBC pemerintah sudah memberikan fasilitas menjamin keberlangsungan pembelajaran peserta didik dari jenjang pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Kartu banyuwangi belajar mendapatkan fasilitas berupa kekebalan dari pungutan biaya apapun, sehingga sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya apapun terhadap siswa pemilik kartu banyuwangi belajar. Kedua, siswa berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sedangkan, bentuk fasilitas kartu banyuwangi cerdas adalah bantuan beasiswa pendidikan perguruan tinggi dan beasiswa untuk kebutuhan hidup mahasiswa lainnya. Namun, Dinas Pendidikan dalam penyediaan kartu program banyuwangi cerdas masih bisa menyediakan fasilitas kartu banyuwangi belajar yang ditujukan kepada SD hingga SMA/MA/SMK sedangkan Kartu Banyuwangi Cerdas ditujukan kepada mahasiswa bidikmisi dan mahasiswa tidak mampu berprestasi tidak diberikan. Untuk kedepan kami sedang memproses pembuatan Kartu Banyuwangi Cerdas. Tetapi, untuk pemenuhan kewajiban dalam kebutuhan lainnya Dinas Pendidikan sudah mengusahakan untuk memenuhi semua yang telah menjadi hak penerima program banyuwangi cerdas.” (Hasil wawancara Selasa, 6 Desember 2016 jam 07:00 WIB di ruang penyusunan program Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka, peneliti menyimpulkan bahwa dinas pendidikan telah berusaha untuk memberikan dengan baik apa yang sudah menjadi kewajibannya. Akan tetapi, dinas pendidikan dalam implementasinya belum memenuhi penyediaan Kartu Banyuwangi Cerdas yang diberikan kepada peserta didik pendidikan tinggi sebagai lembaga yang memiliki kewajiban untuk penyediaan kartu program banyuwangi cerdas. Tetapi hal tersebut bukan masalah besar karena pemerintah tetap memenuhi kebutuhan vital yang memang menjadi kebutuhan Penerima Program Banyuwangi Cerdas lainnya.

Berikut contoh kartu banyuwangi belajar:



Gambar 23: Kartu Banyuwangi Belajar

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Kesimpulan pemaparan diatas adalah pendaan Program Banyuwangi Cerdas berasal dari Bantuan orang ketiga dan anggran Pendapatan Daerah Pemerintah di Kabupaten Banyuwangi. Dinas Pendidikan Sebagai Pihak Penting Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi juga mejalankan dengan baik apa yang sudah menjadi kewajinannya dengan memberikan pembinaan kepada penerima Program Banyuwangi Cerdar yang rutin dilakukan selama 6 bulan sekali. Akan tetapi masih terdapat permasalahan dalam pencairannya, Hal ini dikarenakan untuk proses pencairan dana beasiswa masih terdapat keterlambatan hingga beberapa bulan. Menurut Ibu Drs. Nuriatus Sholeha,M.Pd Ka. Sub Bagian Keuangan yang menangani pelaksanaan PBC Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memaparkan dikarenakan, bantuan sosial program banyuwangi cerdas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi

dengan mempertimbangkan ekonomi daerah. Proses implementasi pencairan dana PBC itu sendiri tidak bisa dipastikan, karena proses pencairan terkadang terdapat kendala meski jarang.

c. Laporan Pertanggungjawaban Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi.

Mengimplementasikan Suatu kebijakan bukanlah satu hal yang mudah terutama dalam mencapai tujuan bersama. Masalahnya adalah memenuhi berbagai komponen yang dapat menyebabkan konflik yang mendorong berkembangnya politik sebagai konflik. Mengenai Mekanisme Pertanggungjawaban program banyuwangi cerdas mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur khusus pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Banyuwangi.

Untuk mengetahui mekanisme laporan pertanggungjawaban Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi, peneliti melakukan wawancara melalui Bapak Drs. Dwiyanto selaku Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PBC Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menjelaskan sebagai berikut:

“Mekanisme Pertanggungjawaban program banyuwangi cerdas disini juga sudah sesuai implementasi peraturan yang telah tertera. Mengenai aturan mekanisme implementasi pertanggungjawaban dana program banyuwangi cerdas, Dinas Pendidikan mengacu pada peraturan bupati yang mengatur khusus pemberian hibah dan bantuan sosial di kabupaten banyuwangi dalam PERBUP Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi.” (Hasil wawancara Jumat, 2 Desember 2016 jam 16:30 WIB di ruang sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Pada suatu kebijakan pasti terdapat adanya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat dinilai apakah kebijakan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dalam kebijakan. Dalam hal ini untuk mengetahui

apakah dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada Penerima PBC sudah terrealisasi dengan tepat. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengatur peraturan adanya laporan pertanggungjawaban dalam kebijakan Program Banyuwangi Cerdas. Hal ini juga dijelaskan melalui wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Drs. Nuriatus Sholeha, M. Pd selaku Ka. Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

“Bagini mbak, pertanggungjawaban bagi penerima bantuan sosial diwajibkan mempertanggungjawabkan atas bantuan pendidikan yang telah diterima dengan memberikan objek pemeriksaan laporan pertanggungjawaban berbentuk realisasi penggunaan dana pada tiap tahun anggaran berkenaan kepada bupati dengan kurun waktu yang sudah ditetapkan. Sedangkan peserta didik yang juga mendapatkan bantuan dari pihak ketiga diwajibkan untuk melaporkan bantuan yang didapat kepada bupati. Bagi peserta didik jengang pendidikan dasar dan jengang pendidikan menengah pelaporan diwakili oleh satuan pendidikan (UPTD), untuk perguruan tinggi dilaporkan oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui dinas pendidikan kepada bupati. Sehingga kami dapat mengetahui apakah benar anggaran yang telah dikeluarka sudah digunakan dengan baik.” (Hasil wawancara Jumat, 16 Desember 2016 jam 10:30 WIB di Dinas Kabupaten Banyuwangi).

Untuk mengetahui apakah implementasi laporan pertanggungjawaban Program Banyuwangi Cerdas, peneliti juga melakukan wawancara kepada Leoda Zulfikar Asrusani selaku penerima beasiswa program banyuwangi cerdas, sebagai berikut:

“Jadi mbak, untuk implementasi laporan pertanggungjawaban Program Banyuwangi Cerdas itu saya membuat berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan dan sudah dijelaskan pada saat sosialisasi tentang langkah dan bagaimana alur ketika sudah menjadi penerima beasiswa. Jadi, saya dan teman-teman penerima beasiswa Program Banyuwangi Cerdas diwajibkan untuk membuat realisasi dana yg sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, laporan tersebut diserahkan kepada Dinas Pendidikan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.” (Hasil wawancara Kamis, 12 Januari 2016 jam 90:30 WIB di Ds. Giri Kabupaten Banyuwangi).

Kesimpulan dari penjelasan diatas tentang Pertanggungjawaban Program Banyuwangi Cerdas ini dalah penerima beasiswa diwajibkan membuat realisasi laporan pertanggungjawaban dana yang sudah diberikan. Hal ini digunakan untuk mengetahui bagaimana dana beasiswa yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi digunakan sebaik-bainya dan tidak melengceng dari tujuan yang sudah diharapkan yaitu untuk membantu peserta didik dalam mengayam pendidikan yang lebih baik.



Gambar 24: Pembinaan Dinas Pendidikan Kepada Penerima Beasiswa IAINJ Tentang Tatacara Pencairan dan Pertanggungjawaban Program Banyuwangi Cerdas.

Sumbe : Dinas Pendidikan, 2017.

d. Monitoring Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan monitoring adalah suatu kegiatan yang bertumpu terhadap fokus kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring itu sendiri diambil untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu dengan

maksud apakah Program Banyuwangi Cerdas dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang menjadi tujuan kebijakan.

Untuk mengetahui bagaimana monitoring peserta didik dalam penggunaan dana PBC dan kesepakatan pendidikan, peneliti telah melakukan wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Dwiyanto selaku Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PBC Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. berikut hasil penelitian yang telah peneliti lakukan:

“Dinas Pendidikan sudah menjalankan monitoring dengan baik, karena ketika ada kesalahan dalam laporan pertanggungjawaban kami Dinas Pendidikan akan meluruskan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sampai saat ini monitoring penggunaan dana PBC sudah dapat dikatakan berhasil dan berjalan dengan baik. Terkait dengan monitoring penggunaan dana PBC dari pihak Dinas Pendidikan melakukannya berbeda antara penerima kartu banyuwangi belajar dan kartu banyuwangi cerdas. Bagi penerima kartu banyuwangi belajar monitoring dilakukan saat rapat rutin yang dilakukan pada hari senin setelah melakukan kontak dengan seluruh kepala sekolah. Sedangkan untuk penerima kartu banyuwangi cerdas Dinas Pendidikan monitoring dengan cara melihat dari hasil laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh seluruh peserta didik yang menerima dana PBC. Sedangkan untuk menotoring penerima bantuan kartu banyuwangi cerdas lainnya kesepakatan pendidikan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan beberapa perguruan tinggi negeri yang diatur dalam (*memorandum of understanding*) MOU. Koordinasi yang dihasilkan adalah berupa laporan yang diberikan oleh perguruan tinggi tentang hasil kuliah penerima PBC terkait anak yang kuliahnya tidak aktif kuliah, IPKnya jelek dan mahasiswa yang akan diberikan surat teguran bahkan hingga mengundurkan diri.” (Hasil wawancara Jumat, 2 Desember 2016 jam 16:43 WIB di ruang sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Dari hasil peneliti lakukan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa monitoring sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dipertegas pernyataan keberhasilan program banyuwangi cerdas oleh Bapak Drs. Dwiyanto selaku sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan

kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi beserta sudah adanya koordinasi yang dilakukan dengan baik antara pihak sekolah, perguruan tinggi dan Dinas Pendidikan, kedua selaku pihak yang memonitoring (Dinas Pendidikan) pengguna dana dan kesepakatan pendidikan PBC telah mengatakan sudah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan dipandang dalam arti luas, merupakan alat administrasi hukum sebagai aktor organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012:102). Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor tersebut dapat membuat keberhasilan dan kegagalan. Faktor pertama faktor internal yang terdiri dari kualitas kebijakan dan/atau program itu sendiri, sumber daya (kemampuan sumberdaya pelaksana, finansial, fasilitas) yang memadai, karakter organisasi, dan komunikasi, koordinasi, kerjasama yang baik antara *stakeholder*. sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal yang terdiri dari koordinasi lingkungan di luar organisasi seperti geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Nomor 15

Tahun 2013 tentang program Banyuwangi cerdas di Kabupaten Banyuwangi

Sebuah program pasti terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, baik faktor pendukung atau faktor penghambat suatu program tersebut. Faktor-faktor itu nantinya memperlihatkan keseriusan kerja keras aktor-

aktor terkait dalam melaksanakan program yang dibuat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Banyuwangi cerdas:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi kebijakan PBC diberikan oleh Dispendik Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1) Faktor Internal

a) Sumber Anggaran

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia merupakan visi dari Kabupaten Banyuwangi. Untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah membutuhkan pembangunan sumber daya manusia yang memadai sebagai sorotan utama pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah pembangunan di sektor pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Program pembangunan pendidikan pemerintah yang dimaksud adalah Program Banyuwangi Cerdas.

Tidak ada pendidikan yang berkualitas dengan harga yang murah. Apalagi di abad ilmu pengetahuan saat ini memiliki ilmu pengetahuan yang berkualitas memerlukan dana yang memadai, Misalnya pada program Program Banyuwangi Cerdas. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berupa dana anggaran untuk kelancaran Program Banyuwangi Cerdas. Bentuk bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah diharapkan mampu dalam mewujudkan visi dari pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia

melalui pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Pendanaan bantuan beasiswa kepada peserta didik sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi beserta pihak Ketiga yang tidak mengikat. Jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membantu peserta didik berbeda-beda tiap tahun. Jumlah anggaran beasiswa yang diberikan selalu mengalami peningkatan.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Drs. Dwiyanto selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menjelaskan sebagai berikut:

“Pada tahun 2011 anggaran banyuwangi cerdas disalurkan dana sebesar Rp 788 juta, tahun 2012 berikutnya anggaran yang disalurkan mengalami peningkatan sebar Rp 1,8 miliar, lalu pada tahun 2013 peningkatan alokasi anggaran sebesar Rp 2,07 miliar, pada tahun 2014 berikutnya anggaran yang disalurkan sebesar Rp 2,85 miliar, berikutnya tahun 2015 anggaran yang disalurkan mengalami peningkatan sebar Rp 3,2 miliar, tahun 2016 menjadi Rp 3,75 setelah itu peningkatan terjadi pada tahun 2017 menjadi Rp 7 miliar. Maka, jika ditotal sejak sejak tahun 2011 sampai 2017 anggaran dana yang telah disalurkan dana Rp 15 miliar kepada lebih dari 700 mahasiswa asli Banyuwangi yang berkuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.” (Hasil wawancara Jumat, 2 Desember 2016 jam 16:30 WIB di ruang sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan jumlah anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sangat besar dalam mendukung keberlangsungan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Jumlah anggaran yang ada selalu meningkat dalam setiap tahunnya di sesuai dengan jumlah penerima bantuan yang semakin meningkat. Hal ini menjadi bukti keseriusan Kabupaten Banyuwangi untuk mendukung penuh Program Banyuwangi Cerdas dengan memberikan bantuan anggran pendidikan. Pemberian anggaran pemerintah yang telah diberikan diharapkan dapat

memanfaatkan dengan baik untuk meringankan beban pendidikan seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

Program akan berjalan berhasil tidaknya implementasi program PBC di daerah tergantung bagaimana dukungan pemerintah daerah. Peraturan daerah sangat mendukung pemberian bantuan pendidikan kepada pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Hal ini terlihat dari perumusan dan penetapan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas Kabupaten Banyuwangi. Secara langsung seluruh lembaga, pihak-pihak terkait, beserta masyarakat harus melaksanakan peraturan bupati yang ada di daerah. Penetapan peraturan diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang telah ada, sehingga meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

b) Komitmen Seluruh Stake Holder

Komitmen merupakan pengambilan sikap seseorang atau organisasi sehingga akan mendorong diri untuk semangat bekerja, menjalankan tugas mencapai tujuan yang diinginkan. Komitmen yang diberikan bisa berupa sumber daya pelaksanaan yang memadai dan rencana program yang akan terus diberikan pada setiap tahun dengan keinginan terus menambah anggaran yang diberikan untuk mendorong pembangunan sektor pendidikan dengan melihat kemampuan daerah. Menurut Bapak Drs. Dwiyanto selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bentuk komitmen seluruh stake holder yang telah diberikan, sebagai berikut:

“Seluruh stake holder pelaksana PBC di Kabupaten Banyuwangi secara pasti sangat mendukung kebijakan Program Banyuwangi Cerdas yang digagas oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Komitmen dan dukungan lainnya dapat terlihat dari kegigihan seluruh stake holder dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya masing-masing sehingga bisa membawa kebijakan program banyuwangi cerdas mendapatkan penghargaan sebagai perlindungan sosial yang dinilai terbaik pada Pro Poor Award tahun 2014. “Banyuwangi cerdas merupakan ikhtiar Pemkab dan seluruh stake holder untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu.” (Hasil wawancara Jumat, 2 Desember 2016 jam 16:30 WIB di ruang sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Terkait pada penjelasan diatas, sudah menjadi bukti bahwa komitmen seluruh pelaksana sudah sangat kuat sehingga bisa membawa implementasi kebijakan program banyuwangi cerdas mendapatkan penghargaan pada Pro Poor Award tahun 2014.

c) Tingginya Motivasi

Tingginya motivasi lembaga pelaksana untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang menjadi faktor keberhasilan program. Seperti, dorongan moral dari sekolah yang menginginkan siswa-siswinya menjadi orang yang sukses, khususnya bagi siswa-siswi kurang mampu secara ekonomi agar mendapat bantuan pendidikan.

Tinggainya motivasi juga ditunjukkan Dinas Pendidikan dalam berperan aktif dengan sesekali terjun ke sekolah untuk mengsosialisasikan program unggulan yaitu Program Banyuwangi Cerdas, bertujuan memberikan sosialisasi, memberikan harapan dan memotivasi peserta didik tidak mampu berprestasi dengan menjangkau lebih banyak sampai ke pelosok desa agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini juga terlihat dari tingginya motivasi seluruh stake holder dalam pelaksanaan program banyuwangi cerdas. Pada pelaksanaannya

seluruh stake holder melakukan rapat koordinasi tahunan untuk pengembangan dan menyalurkan lebih luas terkait informasi pembangunan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

Berikut foto rapat koordinasi pembuatan buku inovasi pendidikan dalam rangka pengembangan media cetak dan penyebaran informasi pendidikan di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar 25: Rapat Koordinasi Pembuatan Buku Inovasi.

Sumber : Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, 2017

2) Faktor Eksternal

a) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat bisa terlihat dari peran serta masyarakat dalam Program Banyuwangi Cerdas. Pertama, bentuk pemberian informasi kepada sesama masyarakat Kabupaten Banyuwangi saat melihat tetangga/kerabatnya yang cerdas dan memiliki keinginan melanjutkan pendidikan namun terkendala biaya. Informasi yang dimaksud berupa saran atau pemerian pemahaman sesama masyarakat tentang informasi bantuan Program Banyuwangi Cerdas Perintah

Kabupaten Banyuwangi yang mungkin dapat membantu dari permasalahan pendidikan tersebut, sehingga tetangga/kerabatnya dapat melanjutkan pendidikan yang diinginkan. Kedua, terdapat pengaduan/pelaporan yang diberikan masyarakat kepada Dinas Pendidikan ketika ada salah satu dari tetangga/kerabatnya yang membutuhkan bantuan Program Banyuwangi Cerdas dengan memiliki kelayakan mendapatkan bantuan dari apa yang sudah menjadi persyaratan program banyuwangi cerdas.

Pernyataan diperkuat oleh Bapak Drs. Sutikno, M.Pd selaku Kepala Sub.Bagian Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

“Berdasarkan implementasi program banyuwangi cerdas sudah banyak partisipasi yang diberikan oleh masyarakat. seperti, adanya beberapa laporan komite sekolah kepada dinas pendidikan atas pelaporan masyarakat yang melihat tetangga/saudara berprestasi akan tetapi tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terkendala ekonomi. Ada juga masyarakat yang secara langsung datang kepada dinas untuk melapor.”
(Hasil wawancara Kamis, 19 Mei 2016 jam 01:30 WIB di ruang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa terkait partisipasi masyarakat yang diberikan sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari kepeduli sesama saudara atau sesama masyarakat dan mulai tumbuhnya rasa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Sehingga program yang diberikan dapat terlaksana dengan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan beasiswa pendidikan karena kendala tingkat ekonomi yang rendah (miskin).

b. Faktor Penghambat

1) Faktor Internal

a) Pencairan dana yang terlambat

Faktor penghambat implementasi program banyuwangi cerdas adalah pencairan dana yang terlambat. Hal ini terjadi karena mekanisme proses pencairan dana PBC yang di berikan tidak ada kepastian dalam hal pencairan setiap bulannya. Dampaknya, terdapat beberapa masiswa yang mengeluh pada waktu pencairan dan PBC yang terkadang molor dan tidak tepat waktu. Keterlambatan pencairan mengakibatkan penerima beasiswa harus mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan wajibnya seperti makan, bayar kos dan masih banyak lainnya hingga dana beasiswanya cair. Keterlambatan juga dipertegas dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Drs. Sutikno,M.Pd selaku Kepala Sub.Bagian Pendidikan Menengah di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah hasil wawancara:

“Pada bulan juli 2015 calon mahasiswa yang terseleksi sudah masuk sebagai terseleksi penerima dana Program Banyuwangi Cerdas berjumlah sebanyak 50 orang. Dari jumlah tersebut ketika kebutuhan dan daftar ulang yang diharapkan dari Program Banyuwangi Cerdas masih dalam proses. Adanya keterlambatan proses pencairan yang seharusnya bulan juli digunakan untuk daftar ulang, tetapi baru cair pada bulan Agustus atau September membuat orang tua calon mahasiswa bingung mencari dana talangan untuk daftar ulang. Bahkan mengakibatkan mahasiswa yang sudah terdaftar mendapatkan bantuan Program Banyuwangi Cerdas mungundurkan diri karena tidak memiliki biaya untuk daftar ulang. Tetapi untuk menyelesaikan masalah yang ada Dispendik berusaha untuk mencari solusi dan membicarakan dengan seluruh stake holder pelaksanaan PBC lainnya sehingga untuk pelaksanaan tahun 2016 sudah tidak terjadi keterlambatan pada proses daftar ulang.” (Hasil wawancara Kamis, 19 Mei 2016 jam 12:30 WIB di di ruang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada Dewi Retnosari selaku penerima bantuan program banyuangi cerdas IAIN Jember. Berikut adalah hasil wawancara:

“Sebenarnya untuk pemberian hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam PBC sudah diberikan. Namun, proses pencairan dana PBC tidak dapat dipastikan pencairannya. Terkadang pencairan dana bisa dilakukan dengan kurun waktu tiga bulan baru cair. Dampaknya, kita harus mencari pinjaman dana untuk mengganti dana PBC yang belum turun dan untuk memenuhi kebutuhan. tetapi untuk pencairan dananya sudah pasti turun sesuai besaran yang telah diusulkan dan disetujui oleh bupati, hanya saja waktu pencairannya kurang konsisten sehingga ada kemoloran waktu dalam pencairan.” (Hasil wawancara Sabtu, 17 Desember 2016 jam 10:30 WIB di Ds. Kebaman Kabupaten Banyuwangi).

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa dinas pendidikan telah berusaha untuk memberikan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Akan tetapi, pada proses implementasi kebijakan tak sepenuhnya akan bisa terlepas dari semua kendala seperti dalam proses pencairan dana PBC, dan dinas pendidikan beserta stake holder lainnya sudah berusaha menjalankan tugas sesuai peraturan yang ditetapkan.

2) Faktor Eksternal

a) Budaya menikah usia dini

Budaya pernikahan dini masih saja menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Kebanyakan para pelaku pernikahan dini dilakukan oleh remaja desa yang memiliki pendidikan rendah. Pernikahan dini terjadi karena masih ada anggapan bahwa ketika remaja yang usianya diatas 20 tahun belum menikah maka mereka disebut sebagai perawan tua. Anggapan mitos yang ada membuat banyak dari orang tua yang ingin cepat menikahkan anaknya karena banyak orang tua yang tidak

menginginkan anaknya dipanggil perawan tua. Perihal lain menganggap bahwa sekolah hanya membuang uang.

Dilihat dari faktor umur maka kebanyakan dari mereka mayoritas masih berpendidikan dasar (SD) hingga pendidikan menengah atas (SMA). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial, budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan Ibu Drs. Nuriatus Sholeha, M.Pd selaku Kepala Sub.Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi salah satu faktor penghambat implementasi adalah pernikahan dini. Berikut adalah hasil wawancara:

“Faktor penghambat implementasi PBC diantaranya kurang adanya kesadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat yang tinggal dipelosok desa atau kampung. Mereka beranggapan bahwa pendidikan hanya menghabiskan uang. Sehingga banyak dari masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Mereka beranggapan khususnya anak perempuan tidak membutuhkan pendidikan tinggi, karena yang terpenting bisa memasak, berdandan dan melayani suami dengan baik. Untuk melakukan perubahan pola pikir masyarakat, Dinas Pendidikan melakukan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan individu, kelompok ataupun negara.” (Hasil wawancara Rabu, 7 Desember 2016 jam 08:10 WIB di ruang keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, masih ada beberapa masyarakat yang masih melakukan pernikahan dini khususnya di desa. Pemerintah dalam mengurangi pernikahan dini melakukan sosialisasi dan perubahan pola pikir masyarakat bahwa pendidikan itu penting. Sehingga masyarakat bisa berkembang dan mengekspresikan kemampuan yang dimiliki.

b) Mengundurkan diri karena alasan tidak cocok dengan jurusan

Faktor penghambat lainnya adalah pengunduran diri dari salah satu penerima program banyuwangi cerdas dengan alasan bahwa dia tidak cocok dengan jurusan. Secara tidak langsung pengunduran diri tersebut berpengaruh terhadap implementasi program banyuwangi cerdas. Mengenai pengunduran diri karena alasan tidak cocok dengan jurusan dalam program banyuwangi cerdas, peneliti melakukan wawancara yang kepada Bapak Drs. Sutikno,M.Pd selaku Kepala Sub.Bagian Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah hasil wawancara:

“Pengunduran diri mahasiswa berpengaruh terhadap implementasi PBC. Alasannya, karena tiap tahun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki kapasitas kuota terbatas untuk penerima program, ketika pengunduran diri dilakukan oleh mahasiswa yang terekrut secara pasti menggagalkan tujuan pemerintah dalam pemenuhan kuota yang telah disediakan. Penyediaan kuota yang seharusnya dapat diisi oleh masyarakat lain yang membutuhkan malah terbuang dengan sia-sia. Dalam mengantisipasi hal yang sama maka, Dinas Pendidikan menyediakan kuota lebih sedikit untuk mengganti sipasi kejadian yang sama. Supaya implementasi program banyuwangi cerdas bisa derjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan.” (Hasil wawancara Kamis, 19 Mei 2016 jam 01:30 WIB di ruang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pengunduran diri peserta didik dalam proses penetapan penerima bantuan program banyuwangi cerdas. Sehingga mengakibatkan sedikit mempengaruhi implementasi kebijakan. Namun, adanya solusi penanganan yang baik oleh Dinas Pendidikan membuat pelaksanaan program kedepan menjadi bisa terkendali untuk pencapaian tujuan program banyuwangi cerdas.

C. Pembahasan

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan pokok penelitian sesuai dengan data. Analisis kualitatif merupakan analisis data muncul bisa berwujud kata-kata/ pemaparan tetapi bukan rangkaian angka-angka. Sesuai dengan peneliti paparkan di bab sebelumnya, peneliti menggunakan model analisis interaktif kualitatif Miles, Huberman dan Saldana (1984:21). Pengumpulan analisis data yang dikumpulkan peneliti berupa Kondensasi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi. Berikut hasil analisis data peneliti yang peneliti lakukan:

Program banyuwangi cerdas merupakan bentuk pemberian kesempatan belajar masyarakat dalam rangka mendukung penjaminan pendidikan bagi peserta didik atau mahasiswa tidak mampu berprestasi. Implementasi pemberian bantuan pendidikan untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan administrasi. Administrasi menurut Sagala (2009: 26) adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia secara sistematis untuk menjalankan roda suatu usaha atau misi organisasi agar dapat terlaksana, sesuatu usaha dengan sesuatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan dari implementasi PBC itu sendiri tertuang dalam PERBUP Nomor 15 Tahun 2013 berupa memberikan fasilitas berupa bantuan dan kemudahan peserta didik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap guna memperoleh penghidupan

lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia dengan memotong rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Kegiatan bersama sekelompok manusia juga dilakukan beberapa instansi dan pihak dalam implementasi kebijakan program banyuwangi cerdas untuk mencapai tujuan yang sama. Instansi dan pihak-pihak terkait diantaranya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi, sekolah-sekolah, beberapa perguruan tinggi negeri, masyarakat, dan penerima program banyuwangi cerdas. Pihak yang paling berperan dalam implementasi program banyuwangi cerdas di Kabupaten Banyuwangi adalah PEMDA, Dispendik dan penerima bantuan PBC. Usaha untuk pencapaian tujuan yang dilakukan masing-masing instansi dan pihak itu sendiri berbeda. Dinama semua tugas dan fungsi masing-masing instansi dan pihak disesuaikan dengan wewenang dan tanggungjawabnya. Perbedaan dilakukan supaya instansi/ pihak-pihak terkait bisa lebih mudah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Apabila pembedaan tugas dan fungsi instansi dan pihak terkait pada implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik maka tujuan dari kebijakan program banyuwangi cerdas dapat tercapai.

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas Dalam Rangka Mendukung Penjaminan Kelangsungan Pendidikan Di Kabupaten Banyuwangi.

Hal pertama yang harus dilakukan peneliti dalam melakukan analisis implementasi program banyuwangi cerdas adalah peneliti menganalisa apakah

kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi program banyuwangi cerdas sudah berjalan dengan tepat atau belum. Sebagaimana ketepatan pemilihan implementasi kebijakan sangatlah berpengaruh terhadap tercapainya tujuan suatu kebijakan, dalam hal ini implementasi harus sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Sehingga pencapaian implementasi kebijakan program banyuwangi cerdas bisa berjalan dengan baik.

Menurut Matland dalam jurnalnya yang berjudul *Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation*, terdapat empat model. Implementasi kebijakan Matland dibedakan menurut potensi konflik dan ambiguitasnya. Berikut adalah Penjelasan tabel eksposisi empat perspektif model implementasi Matland:

Table 9. Matriks Matland

	Low Conflict	High Conflict
Low Ambiguity	<i>Administrative Implementation</i>	<i>Political Implementation</i>
	<i>Implementation decided by resources</i> (diterukan oleh sumber daya)	<i>Implementation decided by power</i> (ditentukan oleh kekuasaan)
	<i>Example: Smallpox eradication</i> (pemberantasan cacar)	<i>Example: Busing</i> (angkutan bis)
High Ambiguity	<i>Experimental eradication</i>	<i>Symbolic Implementation</i>
	<i>Implementation decided by contextual conditions</i> (ditentukan oleh kondisi kontesksual)	<i>Implementation decided by coalition strength</i> (ditentukan oleh kekuatan koalisi)
	<i>Example: Headstart</i> (kepala pimpinan)	<i>Example: Community action agencies</i> (tindakan komunikasi lembaga)

Sumber :Matland, 1995 Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Jurnal of Public Administration Research and Theory. J-PART, Vol. 5, No. 2

Analisis penelitian akan dibagi berdasarkan beberapa tahap sesuai dengan faktor penelitian, diantaranya: a) Sosialisasi dan penetapan penerima PBC, b) Pengalokasian dan pencairan dana PBC, c) Laporan pertanggungjawaban PBC, d) Monitoring PBC:

a. Sosialisai dan Penetapan Penerima Bantuan Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi.

1) Policy Conflict

Policy Conflict adalah sikap saling memainkan peran sentral diantara dua pelaksana bahkan lebih pelaksana, pada setiap aktor memiliki pengambilan keputusan, tujuan, pandangan berbeda. Setiap aktor berada dalam sikap oposisi bukan kerjasama dan cenderung mementingkan diri sendiri. *Policy Conflict* dibagi menjadi dua macam yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikan dalam kebijakan program banyuwangi cerdas bisa terjadi pada saat sosialisasi dan penetapan penerima beasiswa antara Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan masyarakat sebagai penerima kebijakan program banyuangi cerdas. Sedangkan konflik horizontal bisa terjadi diantara sesama masyarakat penerima kebijakan program banyuwangi cerdas.

Setelah melakukan penelitian, peneliti tidak menemukan adanya konflik vertikal yang terjadi antara Dinas Kabupaten Banyuwangi sebagai pelaksana kebijakan dengan masyarakat selaku objek kebijakan. Karena PBC disosialisasikan baru diimplementasikan dan seluruh masyarakat berperan serta

dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat dapat melihat dari tujuan pelaksanaan PBC. Meski terdapat sumber potensi konflik diantara pemerintah dan masyarakat, pada saat masih ada beberapa masyarakat yang berniat untuk memalsukan persyaratan pendaftaran yang sudah ditentukan. Akan, tetapi konflik vertikal tidak sampai terjadi. Hal ini disebabkan dalam implementasi penetapan penerima program banyuwangi cerdas dari tahap seleksi hingga penetapan penerima tidak adanya penyimpangan karena Dinas Pendidikan sudah melaksanakan penetapan sesuai dengan ketepatan untuk mendapatkan bantuan beasiswa Program Banyuwangi Cerdas yang ada dan akuntabel serta dilakukan secara transparan kepada semua masyarakat. Transparan disini seperti adalah apa saja menjadi persyaratan penerima program banyuwangi cerdas, bagaimana cara mendaftar sebagai penerima bantuan program banyuwangi cerdas.

Peneliti juga tidak menemukan adanya konflik horizontal yang terjadi antara sesama masyarakat selaku objek kebijakan. Hal ini disebabkan pada tahap pendaftaran seluruh pihak berpeluang untuk memiliki hak mengajukan dan mendaftarkan diri sendiri ataupun orang lain sebagai calon penerima PBC, namun calon penerima harus memenuhi kriteria persyaratan yang telah pemerintah buat. Selain itu pelaksanaan PBC mulai sosialisasi hingga penetapan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan selaku lembaga yang mewakili pemerintah daerah sudah jelas, transparan dan akuntabel. Pelaksananya juga mengikutsertakan masyarakat misalnya, peran serta masyarakat dalam perencanaan PBC diwakilkan oleh musyawarah guru bimbingan konseling (MGBK). MGBK membantu dalam pembukaan pendaftaran serta mendaftarkan siapa yang memenuhi syarat untuk

mendapatkan atau menjangkau penerima PBC. Peran serta komite sekolah mewadahi masyarakat untuk mengakomodasikan, melaporkan kepada MGBK siapa yang berhak mendapatkan bantuan PBC. faktor lain yang membuat rendah konflik horizontal disebabkan mekanisme proses penetapan penerimaan program banyuwangi cerdas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan PERBUP Nomor 15 Tahun 2013 sehingga menimbulkan tingkat konflik horizontal yang rendah.

2) *Policy Ambiguity*

Policy Ambiguity adalah tingkat kemaduan dalam suatu kebijakan. Terdapat dua macam *Policy Ambiguity* yaitu, *Ambiguity* tujuan dan *Ambiguity* sasaran. Pada proses implementasi kebijakan potensi *Ambiguity* dapat saja terjadi, seperti pada proses sosialisasi dan penetapan penerima program banyuwangi cerdas. *Ambiguity* bisa terjadi antara Dinas Pendidikan sebagai pelaksana program dan masyarakat sebagai objek kebijakan dalam menafsirkan apa saja yang menjadi persyaratan dan mekanisme penetapan peserta. Sesuai pemaparan dalam penyajian yang peneliti lakukan diatas, bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa program banyuwangi cerdas. Pada penyajian dijelaskan bahwa pemenuhan syarat-syarat permohonan telah diatur oleh pemerintah daerah dengan jelas dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan mekanisme persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk tujuan, fasilitas, waktu pembelajaran dan pemenuhan kewajiban seluruh pelaksana dan objek kebijakan juga sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan PERBUP Nomor 15 Tahun

2013. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tingkat ambiguitas dalam proses penetapan penerima program banyuwangi cerdas ini rendah.

Berdasarkan dua penjelasan *Policy Conflict* dan *Policy Ambiguity* dalam proses sosialisasi dan penetapan penerima program banyuwangi cerdas di atas, dapat disimpulkan bahwa *Policy Conflict* yang ada dalam proses sosialisasi dan penetapan penerima program banyuwangi cerdas mempunyai tingkat konflik yang rendah. Sebagaimana rendahnya konflik vertikal dan horizontal antar lembaga pelaksana maupun dengan masyarakat selaku objek kebijakan, karena seluruh aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program sudah memahami seksama apa yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan wewenangnya.

Seperti yang telah peneliti paparkan bahwa dalam sosialisasi dan penetapan penerima program banyuwangi cerdas juga mempunyai tingkat *Policy Ambiguity* yang rendah. Hal ini dapat terlihat dari proses persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan mekanisme penetapan penerima yang sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Mengikuti pemaparan Matland, apabila suatu kebijakan memiliki tingkat konflik yang rendah dan ambiguitas atau kemanduan dengan tingkat yang rendah. Maka, menggunakan model *Administrative Implementation* adalah implementasi yang dilaksanakan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintah sebagai otoritas pusat. pemerintah memiliki informasi sumber daya, dan kemampuan untuk membuat dan menentukan kebijakan yang diinginkan. Informasi yang dimiliki pemerintah itu sendiri berjalan mengalir dari atas ke bawah (top-down). Dimana

sumber daya variabel independen menjadi faktor dasar menjadi lancar tidaknya implementasi dan setiap aktor memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan implementasi kebijakan program banyuwangi cerdas di Kabupaten Banyuwangi pada sosialisasi sampai penetapan penerima sudah berhasil sesuai tujuan dari PERBUP Nomor 15 Tahun 2013 dalam memberikan fasilitas berupa bantuan kemudahan yang dilaksanakan dengan efektif, karena seluruh sumber daya seperti Dinas Pendidikan, UPTD Dinas Pendidikan tingkat kecamatan, sekolah, perguruan tinggi negeri dan masyarakat sebagai objek kebijakan telah menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan sangat baik.

b. Pengalokasian dan Pencairan Dana Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi.

1) Policy Conflict

Implementasi pada tahap pengalokasian dan pencairan dana program banyuwangi cerdas di Kabupaten Banyuwangi, *Policy Conflict* di bagi menjadi dua macam yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Pada tahap pengalokasian dana dan Pencairan program banyuwangi cerdas yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan tidak adanya konflik vertikan dan horizontal dalam pengalokasian dana terdapat Konflik vertikan dalam pencairan dana program banyuwangi cerdas.

Tidak ada konflik vertikan dan horizontal dalam pengalokasian dana dalam program banyuwangi cerdas ditandai dengan pendanaan baru bisa diberikan

kepada penerima bantuan yang sudah lolos sebagai penerima beasiswa PBC. Pendanaan PBC itu sendiri berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dan hidah dari pihak ketiga yang tidak mengikat berdasarkan pedoman pada PERBUP. Pada pendanaan tidak adanya pihak-pihak, lembaga dan masyarakat yang dirugikan selama pelaksanaan pengalokasian dana program banyuwangi cerdas. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak memaksa pihak-pihak ketiga untuk turut memberikan dana demi kelancaran Program Banyuwangi Cerdas.

Konflik vertikan dalam pencairan dana program banyuwangi cerdas disimpulkan berdasarkan pada keterlambatan pada proses pencairan dana PBC. Keterlambatan yang terjadi secara langsung dapat mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan tersebut, karena bantuan yang diberikan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditunda bagi penerima bantuan beasiswa PBC. Jadi, saat pencairan dana terlambat dapat menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat penerima bantuan PBC. Sedangkan untuk nominal dana yang didapat oleh semua penerima tidak terdapat konflik karena nominal beasiswa yang diberikan sudah ditentukan sesuai kebutuhan masing masing penerima beasiswa.

Meski terdapat konflik verikal pada pencairan pemerintah tetep memberikan apa yang memang sudah menjadi hak dari penerima bantuan pendidikan berupa dana bantuan PBC. Hal ini menjadi bukti adanya ketertiban Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas dengan baik sesuai peraturan pencairan yang telah ditetapkan.

Maka, dapat dipastikan bahwa Dinas Pendidikan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan wewenang yang dimiliki berdasarkan peraturan PERBUB Nomor 15 Tahun 2013. Keberhasilan pengalokasian dana program banyuwangi cerdas tidak terlepas dari komitmen dan kesiapan seluruh anggota pelaksana dinas pendidikan sebagai organisasi yang profesional pada bidangnya. Dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam memfasilitasi kebutuhan seluruh penerima program banyuwangi cerdas.

Selain tidak adanya konflik vertikal, konflik horizontal juga tidak terjadi dalam pengalokasian pendanaan program banyuwangi cerdas. Hal ini berdasarkan komunikasi sudah yang baik antara lembaga dengan hipak-pihak terkait pelaksana program sehingga anatara pemerintah, lembaga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat satu dengan yang lain sudah saling mengerti tentang bagaimana pengalokasian dana yang akan diberikan kepada penerima program banyuwangi cerdas dan lembaga terkait, sehingga potensi tingkat konflik horisontal yang ditimbulkan rendah. Namun, berbeda pada pelaksanaan pencairan dana program banyuwangi cerdas. terdapat konflik vertical dan tidak terdapat konflik horizontal pencairan dana program banyuwangi cerdas. Berdasarkan pemaparan di atas dan setelah peneliti melakukan penelitian, bahwa pengalokasian dana program banyuwangi cerdas kurang berjalan secara lancar dan sesuai yang diharapkan oleh penerima beasiswa. Sehingga tingkat potensi konflik vertikal tinggi dan horizontal yang ditimbulkan rendah.

2) *Policy Ambiguity*

Policy Ambiguity merupakan tingkat kemenduan kebijakan. Terdapat dua macam *Policy Ambiguity* yaitu, *Ambiguity* tujuan dan *Ambiguity* sasaran. Pada proses pengalokasian dana dan pencairan program banyuwangi cerdas, potensi *Ambiguity* bisa saja terjadi. Tetapi, potensi tingkat *Policy Ambiguity* dalam proses pengalokasian dana dan pencairan dana tidak ada (rendah). Tingkat *Ambiguity* rendah dikarenakan kejelasan persyaratan untuk mendapatkan alokasi dana dan pencairan pelaksanaan program banyuwangi cerdas sudah sesuai ditetapkan pemerintah sesuai tahap-tahap apa yang memang harus dilaksanakan. Hal ini ditambah dengan adanya sosialisasi yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya, sehingga semua pihak sudah memahami ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan tentang *Policy Conflict* dan *Policy Ambiguity* pada pengalokasian dana program banyuwangi cerdas diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Policy Conflict* memiliki tingkat konflik tinggi. Hal ini di tandai dengan adanya konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat sebagai penerima bantuan dalam masalah pencairan sedangkan untuk horizontal tidak terdapat konflik antara pemerintah, lembaga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat karena semua aktor sudah memahami tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Selain itu, *Policy Ambiguity* dalam pengalokaisian dan pencairan dana program banyuwangi cerdas memiliki tingkat ambiguitas yang rendah. Hal ini terlihat pada pelaksanaan ketentuan persayatan yang sudah dipenuhi oleh masyarakat dan pengalokasian dana dan pencairan yang diberikan tepat sasaran kepada

masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ketetapan pemerintah berdasarkan PERBUP Nomor 15 Tahun 2013.

Mengikuti pemaparan Matland, apabila suatu kebijakan memiliki tingkat konflik yang tinggi dan ambiguitas tingkat yang rendah. Maka, menggunakan model *Political Implementation* adalah implementasi yang ditentukan oleh kekuasaan. Kebijakan yang bersifat kritikal bagi kehidupan bersama atau berkenaan dengan eksistensi negara, termasuk dalam hal ini pemerintah yang sah dapat melakukan paksaan. Prinsip utama dalam pelaksanaan politik adalah bahwa hasil pelaksanaan diputuskan oleh kekuasaan pemerintah mengalir dari atas ke bawah (top-down). Meliputi kebijakan-kebijakan yang masuk dalam kategori *directed* atau berkenaan dengan eksistensi negara dan bangsa. Kebijakan disini disebut sebagai *existensial driven policy* (pertahanan, keamanan, penegak keadilan, dan sebagainya).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan implementasi kebijakan program banyuwangi cerdas di Kabupaten Banyuwangi pada pelaksanaan pengalokasian dan pencairan dana dan pecairan kurang efektif. Sebab masih ada satu faktor yang mempengaruhi proses implementasinya yaitu terdapat keterlambatan dalam pencairan dana PBC dan membuat penerima bantuan merasa resah akan tuntutan kebutuhan hidup.

c. Laporan Pertanggungjawaban Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi.

1) *Policy Conflict*

Policy Conflict adalah sikap saling memainkan peran sentral diantara dua pelaksana bahkan lebih pelaksana, pada setiap aktor memiliki pengambilan keputusan, tujuan, pandangan berbeda. Setiap aktor berada dalam sikap oposisi bukan kerjasama dan cenderung mementingkan diri sendiri. *Policy Conflict* dibagi menjadi dua macam yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikan dan konflik horizontal dalam kebijakan banyuwangi cerdas bisa terjadi pada saat pertanggungjawaban beasiswa program banyuwangi cerdas.

Pada tahap laporan pertanggungjawaban program banyuwangi cerdas tidak ditemukan indikasi adanya konflik vertikal maupun konflik horizontal. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pihak terkait dalam pelaksana maupun objek penerima beasiswa yang merasa tidak memahami dengan laporan pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh pihak penerima beasiswa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Oleh, karenanya ini menjadi bukti adanya ketertiban penerima beasiswa dan Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas dengan baik sesuai peraturan laporan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan. Pada pertanggungjawaban penerima bantuan diwajibkan memenuhi pertanggungjawaban bantuan dana yang telah diberikan dengan membuat transkrip laporan pertanggungjawaban danayamg sudah diberikan dan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dari program banyuwangi cerdas tertera pada PERBUP Nomor 15 Tahun 2013.

Berdasarkan mekanisme tahap pertanggungjawaban pada implementasi program banyuwangi cerdas sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan pemahaman semua pihak tentang kewajiban dalam membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan PERBUP Nomor 15 Tahun 2013 yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat potensi konflik vertikal dan horizontal yang ditimbulkan rendah.

2) *Policy Ambiguity*

Policy Ambiguity adalah tingkat kemaduan dalam suatu kebijakan. Terdapat dua macam *Policy Ambiguity* yaitu, *Ambiguity* tujuan dan *Ambiguity* sasaran. Pada proses implementasi kebijakan potensi *Ambiguity* dapat saja terjadi, seperti pada proses pertanggungjawaban program banyuwangi cerdas.

Tingkat *ambiguity* bisa terjadi antara Dinas Pendidikan sebagai pelaksana program dan Masyarakat sebagai objek kebijakan dalam menafsiran tujuan mekanisme pertanggungjawaban. Sesuai pemaparan dalam penyajian yang peneliti lakukan diatas, bahwa pelaksanaan mekanisme pertanggungjawaban program banyuwangi cerdas mengacu pada tujuan sebagai obyek pemeriksaan penggunaan dana dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada pihak penerima dana bantuan PBC. Setelah peneliti melakukan penelitian ternyata tidak terdapat tingkat konflik, dikarenakan pihak Dinas Pendidikan dan penerima bantuan dana PBC sudah memahami dan mengerti dengan tujuan yang telah disebutkan dalam PERBUP Nomor 15 Tahun 2013. Pada hakekatnya proses pertanggungjawaban PBC yang perlu dimengerti dan dipahami terlebih tujuan dari biberlakukaannya proses dan tujuan pertanggungjawaban PBC ini. Untuk semua pihak dan lembaga

terkait itu sendiri sudah memahami proses dan tujuannya, sehingga pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan tentang *Policy Conflict* dan *Policy Ambiguity* pada pertanggungjawaban program banyuwangi cerdas di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Policy Conflict* memiliki tingkat konflik rendah. Hal ini ditandai dengan tidak adanya konflik vertikal dan horizontal antara pemerintah, lembaga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat karena semua aktor sudah memahami tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Selain itu, *Policy Ambiguity* dalam pertanggungjawaban program banyuwangi cerdas memiliki tingkat ambiguitas yang rendah. Hal ini terlihat pada ketentuan mekanisme dan implementasi yang sudah diketahui dan dipahami oleh semua lembaga. Seperti pelaksanaan ketentuan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan difahami oleh Dinas Pendidikan dan penerima bantuan dalam laporan pertanggungjawaban yang sudah mendapat bantuan dari Program Banyuwangi Cerdas. Sehingga pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah berdasarkan PERBUP Nomor 15 Tahun 2013.

Mengikuti pemaparan Matland, apabila suatu kebijakan memiliki tingkat konflik yang rendah dan ambiguitas atau kemanduan dengan tingkat yang rendah. Maka, menggunakan model *Administrative Implementation* adalah implementasi yang dilaksanakan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintah sebagai otoritas pusat. Pada tahap laporan pertanggungjawaban sumber daya merupakan faktor dasar apakah implementasi dapat berjalan dengan baik atau tidak, karena kebijakan dibuat dengan menyesuaikan sumberdaya yang ada. Disini

pemerintah memiliki informasi sumber daya, dan kemampuan untuk membuat dan menentukan kebijakan yang diinginkan. Informasi yang dimiliki pemerintah itu sendiri berjalan mengalir dari atas ke bawah (top-down). Pada implementasi PBC setiap aktor memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang dan dan fungsi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan implementasi kebijakan program banyuwangi cerdas di Kabupaten Banyuwangi pada proses pembuatan laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan efektif, karena seluruh sumber daya seperti Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat sebagai objek kebijakan telah mengerti dan memahami proses pencairan dan tujuan pembuatan laporan pertanggungjawaban.

d. Monitoring Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi.

1) *Policy Conflict*

Implementasi pada tahap monitoring program banyuwangi cerdas di Kabupaten Banyuwangi, *Policy Conflict* di bagi menjadi dua macam yaitu konflik vertical dan konflik horizontal. Pada tahap monitoring program banyuwangi cerdas yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan tidak adanya tingkat Konflik vertikan ataupun horisontal dalam monitoring program banyuwangi cerdas. Sebab, pelaksanaan monitoring penggunaan dana program banyuwangi cerdas dilaksanakan dengan cukup baik antara Dinas Pendidikan dengan penerima bantuan program banyuwangi cerdas, maupun antara Dinas Pendidikan dan

Universitas terkait yang memiliki koordinasi dengan Dispendik dalam pelaksanaan monitoring program banyuwangi cerdas.

Pada monitoring Dinas Pendidikan dan penerima bantuan program banyuwangi cerdas, penerima bantuan program banyuwangi cerdas sudah melampirkan laporan pertanggungjawaban berupa proposal realisasi bantuan dana yang didapat sehingga Dinas Pendidikan dapat langsung memastikan laporan yang sudah diberikan dengan kesimpulan apakah dana beasiswa yang peserta didik dapat digunakan dengan baik atau tidak. Sedangkan untuk monitoring antara Dinas Pendidikan dan Universitas terkait yang memiliki koordinasi dengan Dispendik dalam pelaksanaan monitoring program banyuwangi cerdas juga sudah berjalan dengan cukup baik karena untuk menotoring penerima bantuan kartu banyuwangi cerdas Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan beberapa perguruan tinggi negeri yang diatur dalam (*memorandum of understanding*) MOU. Koordinasi yang dihasilkan adalah berupa laporan yang diberikan oleh perguruan tinggi tentang hasil kuliah penerima PBC terkait anak yang kuliahnya tidak aktif kuliah, IPKnya jelek dan mahasiswa yang akan diberikan surat teguran bahkan hingga mengundurkan diri.

Berdasarkan penjelasan monitoring tentang penggunaan dana dalam program banyuwangi cerdas di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sudah berjalan dengan baik antara Dinas Pendidikan dengan penerima bantuan program banyuwangi cerdas, maupun antara Dinas Pendidikan dan Universitas terkait yang memiliki koordinasi dengan Dispendik. Sehingga dapat disimpulkan *Policy Conflict* memiliki tingkat konflik rendah.

2) *Policy Ambiguity*

Policy Ambiguity adalah tingkat kemaduan dalam suatu kebijakan. Terdapat dua macam *Policy Ambiguity* yaitu, *Ambiguity* tujuan dan *Ambiguity* sasaran. Pada proses implementasi kebijakan potensi *Ambiguity* dapat saja terjadi, seperti pada proses monitoring program banyuwangi cerdas. Potensi ambuitas bisa saja timbul antara Dinas Pendidikan dan penerima bantuan PBC. Namun, setelah peneliti melakukan penelitian, tidak adanya potensi ambiguitas yang terjadi. Semua dikarenakan seluruh pihak sudah memahami dan mengerti tentang tujuan diadakannya monitoring penggunaan dana PBC yang telah diberikan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa *Policy Ambiguity* dalam monitoring penggunaan dan PBC ini mempunyai tingkat yang rendah.

Berdasarkan penjelasan tentang *Policy Conflict* dan *Policy Ambiguity* pada monitoring program banyuwangi cerdas diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Policy Conflict* memiliki tingkat konflik rendah. Hal ini di tandai dengan tidak adanya konflik vertikal dan horizontal antara pemerintah, lembaga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat karena semua aktor sudah memahami tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Selain itu, *Policy Ambiguity* monitoring program banyuwangi cerdas memiliki tingkat ambiguitas yang rendah. Hal ini terlihat pada ketentuan mekanisme yang sudah diketahui dan dipahami oleh semua pihak dalam bagaimana cara Dinas Pendidikan melakukan monitoring kepada penerima bantuan dan sudah terpenuhinya laporan pertanggungjawab oleh penerima bantuan dalam program banyuwangi cerdas. Sehingga pada

pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah berdasarkan PERBUP Nomor 15 Tahun 2013.

Mengikuti pemaparan Matland, apabila suatu kebijakan memiliki tingkat konflik yang rendah dan ambiguitas atau kemanduan dengan tingkat yang rendah. Maka, menggunakan model *Administrative Implementation* adalah implementasi yang dilaksanakan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintah sebagai otoritas pusat. pemerintah memiliki informasi sumber daya, dan kemampuan untuk membuat dan menentukan kebijakan yang diinginkan. Informasi yang dimiliki pemerintah itu sendiri berjalan mengalir dari atas ke bawah (top-down). Dimana sumber daya menjadi faktor dasar menjadi lancar tidaknya implementasi dan setiap aktor memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang dan dan fungsi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan implementasi kebijakan program banyuwangi cerdas di Kabupaten Banyuwangi pada monitoring penerima bantuan PBC sudah dilaksanakan dengan baik, karena seluruh sumber daya seperti Dinas Pendidikan, penerima bantuan program banyuwangi cerdas dan Universitas terkait yang memiliki koordinasi dengan baik dalam pelaksanaan monitoring program banyuwangi cerdas karena semua pihak sudah mengerti dan memahami tujuan dari monitoring penggunaan dana program banyuwangi cerdas.

Penilaian efektifitas implementasi program Banyuwangi cerdas, peneliti lakukan dengan teori lain, karena dalam teori implementasi Matland tidak terdapat indikator efektifitas, peneliti menggunakan teori Nugroho sebagai penunjang indikator efektifitas teori Matland. Untuk menilai efektifitas kebijakan dalam

tercapainya tujuan kebijakan menurut Nugroho (2011: 650), berpendapat bahwa pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifitas implementasi kebijakan, yaitu berdasarkan:

1. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan itu sendiri dinilai dari: apakah kebijakan tersebut sudah tepat, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan apakah kebijakan disebut oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

Tepat kebijakan pada penilaian pertama berhubungan dengan apakah kebijakan tersebut sudah tepat. ketepatan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa kebijakan Program Banyuwangi Cerdas (PBC) sudah tepat. Hal pertama yang harus melihat adalah tujuan kebijakan PBC itu sendiri seperti yang peneliti jelaskan pada penyajian, bahwa tujuan kebijakan PBC dalam PERBUP Nomor 15 Tahun 2013 adalah memberikan fasilitas berupa bantuan dan kemudahan peserta didik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap guna memperoleh penghidupan lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia. Jadi, penilaian pertama dalam efektifitas implementasi kebijakan sudah terpenuhi target.

Penilaian kedua adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Jika dilihat dari hasil

penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan. isu utama permasalahan yang ada ialah pemenuhan hak dasar masyarakat khususnya masyarakat ekonomi rendah dalam bidang pendidikan. Berdasarkan pemenuhan karakter isu yang ada, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memberlakukan kebijakan Program Banyuwangi Cerdas (PBC) sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat berekonomi rendah dapat menikmati pelayanan pendidikan dengan baik seperti halnya masyarakat ekonomi atas. Berdasarkan penjelasan diatas maka penilaian ketepatan kebijakan kedua sudah tepat.

Penilaian ketiga adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan. Pada penilaian ketepatan kebijakan dinilai peneliti sudah tepat, karena kebijakan Program Banyuwangi Cerdas (PBC) dibuat dan dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam PERBUP Nomor 15 Tahun 2013. Sehingga mengindikasikan bahwa dalam perumusan kebijakan yang dibuat telah melibatkan lembaga-lembaga dengan memiliki kemampuan dan berwenang yang sesuai dengan karakter kebijakan. Kebijakan yang dimaksud ialah Program Banyuwangi Cerdas (PBC) dan perumus kebijakan ialah Dinas Pendidikan.

2. Tepat Pelaksanaan

Tepat kedua adalah tepat pelaksanaan. Pada tepat pelaksanaan aktor implementasi kebijakan bukan hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat

menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). Berdasarkan penyajian pada bab sebelumnya implementasi kebijakan PBC dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya seperti Dinas Pendidikan, UPTD Dispendik, BPKAD Kabupaten Banyuwangi, Sekolah, Perguruan Tinggi Negeri, dan juga masyarakat lainnya sesuai yang tertuang dalam PERBUP Nomor 15 Tahun 2013. Jika dilihat dari implementasinya, peneliti menilai kebijakan PBC belum dijalankan dengan baik antara lembaga terkait seperti Pemda Banyuwangi (BUPATI), Dinas Pendidikan dan BPKAD yang dilihat pada proses pencairan. Pada saat Dinas Pendidikan yang sudah jauh-jauh hari menyerahkan rujukan BUPATI tentang usulan alokasi anggaran PBC kepada BPKAD untuk dicairkan, Namun dalam proses pencairan mengalami keterlambatan. Sehingga mengakibatkan penerima beasiswa kebingungan untuk membiayai kebutuhan kuliah dan hidupnya.

Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan kebijakan PBC belum dijalankan dengan baik oleh seluruh pihak terkait sesuai kewajiban dan fungsinya. Sehingga peneliti beranggapan syarat dari tercapainya efektifitas ketepatan pelaksanaan belum terpenuhi.

3. Tepat Target

Tepat ketiga adalah tepat target. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tumpang tindih dalam intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan

intervensi kebijakan lain, ataukah tidak. Sesuai penelitian, peneliti tidak menemukan tumpang tindih dalam intervensi lain, akan tetapi adanya intervensi penyempurna kebijakan PBC. Hal ini disebabkan target utama kebijakan PBC adalah masyarakat Kabupaten Banyuwangi dengan memiliki persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan PERBUP Nomor 15 Tahun 2013 tentang program banyuwangi cerdas dan PERBUP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pealaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kedua, kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Dari penilaian peneliti dari hasil kerja lapang, masyarakat Kabupaten Banyuwangi sudah memberikan respon kesiapan yang baik dalam pelaksaannya PBC, Hal ini berdasarkan banyaknya masyarakat yang memahami dan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan PBC, terus meningkatnya peminat dari kebijakan PBC setiap tahunnya. Sedangkan untuk program PBC banyak masyarakat yang mendukung, karena berdampak positif terhadap masyarakat khususnya dalam meringankan beban biaya pendidikan masyarakat berekonomi rendah/lemah sehingga memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi.

Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau mempengaruhi implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan

hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya. Menurut penilaian berdasarkan hasil penelitian, implementasi PBC itu sendiri bersifat baru, karena bentuk bantuan pendidikan perguruan tinggi terlaksana pertama kali ketika digagas oleh Bupati Andullah Azwar Anas di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa syarat tercapainya efektifitas implementasi dalam hal tepat target sudah terpenuhi dengan tepat.

4. Tepat Lingkungan

Tepat keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu: pertama, lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga di antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Kebijakan Program Banyuwangi Cerdas dalam Interaksinya melibatkan antara lembaga dan pihak-pihak terkait untuk perumusan hingga pelaksanaan. Lembaga dan pihak-pihak terkait diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pendidikan dan seluruh kesatuan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Interaksi itu sendiri melalui proses komunikasi antar lembaga dan pihak-pihak terkait dengan mendiskusikan tugas dan fungsi masing-masing untuk pelaksanaan kebijakan. Hal ini bermaksud agar pelaksanaannya berjalan lancar untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kedua, lingkungan eksternal kebijakan adalah lingkungan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan. Bila dilihat dari kebijakan dan implementasi PBC di Kabupaten Banyuwangi kebijakan implementasi sudah cukup baik karena berdampak positif. Penyambutan dan partisipasi baik yang diberikan seluruh masyarakat terhadap

pelaksanaan kebijakan Program Banyuwangi Cerdas. Sebab, kebijakan PBC bentuk pembangunan dibidang pendidikan dengan mewujudkan harapan baru dalam pemberian kesempatan menganyam pendidikan tinggi untuk masyarakat ekonomi lemah.

Interpretive institutions berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategi dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan insividualis, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam penafsiran menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Sejauh penelitian yang telah peneliti lakukan lingkungan eksternal berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan porsinya, dimana lembaga-lembaga strategi memberikan masukan dan kritik yang semestinya. Adanya interpretasi itu sendiri disakapi baik oleh lembaga pelaksana untuk menambah semangat dalam menjalankan kebijakan dengan memberikan yang terbaik agar, tujuan dari implementasi kebijakan tercapai. Sesuai pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan syarat untuk tercapainya efektifitas implemmtasi sudah dipenuhi dengan tepat.

5. Tepat Proses

Tepat kelima adalah tepat proses. Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga proses, yaitu: Pertama, *Policy acceptance* yaitu publik memahami kebijakan merupakan aturan main yang diperlukan untuk masa depan dan pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Kedua, *Strategic readiness* yaitu publik menerima kebijakan sebagai aturan main

dan pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Ketiga, *Policy adoption* yaitu publik siap melaksanakan atau menjadi bagian kebijakan dan pemerintah siap menjadi pelaksana kebijakan.

Menurut peneliti tepat proses sudah terpenuhi, hal ini ditandai ketepatan proses yang sudah dilaksanakan oleh perumus kebijakan dan para implementator. Ketepatan proses dimulai dari sosialisasi kebijakan PBC kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima, memahami dan mengerti mengenai substansi, tujuan, fungsi, proses dengan baik kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Pendidikan. Sehingga timbul pemikiran publik, bahwa publik memang membutuhkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut sesuai dengan masalah yang saat ini timbul pada pembangunan pendidikan khususnya masyarakat ekonomi lemah. Pemerintah dalam perumus dan pelaksanaan kebijakannya itu sendiri sudah menerima, memahami dan melaksanakan kebijakan karena sudah menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Jika, dilihat dari penjelasan diatas untuk syarat efektifitas tepat proses sudah terpenuhi.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa lima tepat efektifitas implementasi Program Banyuwangi Cerdas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Pendidikan belum berjalan dengan efektif. Hal ini didasari belum terpenuhinya ketepatan pelaksanaan dalam kelima tepat yang menjadikan poin penting terciptanya implementasi yang efektif. Dengan demikian dari hasil penelitian yang tertuang dalam kajian dan analisis terhadap implementasi Program Banyuwangi Cerdas dapat diambil kesimpulan

bahwa implementasi program banyuwangi cerdas belum sepenuhnya berhasil. Krtidak berhasilan efektifitas kebijakan dengan menilai tercapainya tujuan kebijakan menurut Nugroho (2011: 650) berdasarkan teori implementasi kebijakan matland, berpendapat bahwa pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifitasan implementasi kebijakan. Kerhasilan yang dimaksud adalah keberhasilan dalam mendukung penjamin belajar untuk masyarakat di Kabupaten Banyuwangi untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dengan memberikan bantuan kesempatan pendidikan yang sudah terlaksana sesuai dengan Perbub Nomor 15 Tahun 2013 tentang Proses Banyuwangi Cerdas.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi

Faktor pendukung dan penghambat sejatinya selalu ada dalam setiap implementasi kebijakan. Tetapi, berhasil tidaknya implementasi semua tergantung kepada bagaimana usaha dari para pelaksana kebijakan untuk dapat memanajemenkan faktor pendukung dan penghambat implementasi menjadi sebuah dampak yang positif untuk implementasi kebijakan itu sendiri. Berdasarkan implementasi kebijakan program banyuwangi cerdas di Kabupaten Banyuwangi terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Berikut faktor pendukung dan penghambat kebijakan banyuwangi cerdas diantaranya:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat mempermudah dan mempercepat suatu implementasi kebijakan. Faktor pendukung dalam program Banyuwangi cerdas dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pendukung internal dalam implementasi Program Banyuwangi Cerdas yang pertama adalah sumber daya yang mendukung. Dalam implementasi kebijakan PBC didukung dengan sumber daya anggaran berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi dan pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumber daya anggaran dalam menunjang kegiatan pada pelaksanaan kebijakan program Banyuwangi cerdas pada tahun 2011 anggaran banyuwangi cerdas disalurkan dana sebesar Rp 788 juta, tahun 2012 berikutnya anggaran yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar Rp 1,8 miliar, lalu pada tahun 2013 peningkatan alokasi anggaran sebesar Rp 2,07 miliar, pada tahun 2014 berikutnya anggaran yang disalurkan sebesar Rp 2,85 miliar, berikutnya tahun 2015 anggaran yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar Rp 3,2 miliar, tahun 2016 menjadi Rp 3,75 setelah itu peningkatan terjadi pada tahun 2017 menjadi Rp 7 miliar. Maka, jika ditotal sejak tahun 2011 sampai 2017 anggaran dana yang telah disalurkan dana Rp 15 miliar kepada lebih dari 700 mahasiswa asli Banyuwangi yang berkuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Faktor pendukung kedua datang dari peraturan daerah yang mendukung berupa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas. Perbup tersebut dibuat dengan maksud dan tujuan agar semua masyarakat dan pihak-pihak bersangkutan dapat menjalankan peraturan hukum yang telah

ditetapkan sehingga bisa memperlancar kinerja dan efektifitas dari tujuan dibentuknya program Banyuwangi Cerdas.

Faktor pendukung ketiga datang dari komitmen dari seluruh *stake hodel* berbentuk pengambilan sikap dari seluruh aktor atau pihak pemerintahan yang terlibat di dalamnya. Penilaian dinilai dari kegigihan menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban yang semestinya harus dilakukan dan sudah menjadi kewajibannya untuk pelaksanaan program Banyuwangi cerdas ini.

Faktor pendukung keempat adalah tingginya motivasi datang dari dorongan moral sekolah dan pemerintah kepada peserta didik dengan mengiinginkan peserta didiknya menjadi orang yang sukses, khususnya bagi peserta didik kurang mampu secara ekonomi agar tetap mendapatkan pendidikan yang baik maka diberikanlah bantuan pendidikan. Pemberian dukungan moral diberikan dengan cara terjun lapang dengan mensosialisaikan, memberikan harapan dan memotivasi kepada peserta didik tidak mampu berprestasi untuk tetap semangat belajarnya dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan program Banyuawngi cerdas.

Faktor pendukung eksternal dalam implementasi program Banyuwangi cerdas datang dari partisipasi masyarakat yang di nilai dari pemberian informasi kepada sesama masyarakat Kabupaten Banyuwangi tentang program Banyuwangi cerdas saat melihat tetangga/kerabatnya memiliki keinginan melanjutkan pendidikan dengan perprestasi bagus manun terkendala biaya. Sehingga keingin untuk melanjutkan pendidikan bisa tercapai.

b. Faktor Penghambat

Hambatan dalam program banyuwangi cerdas di Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat internal kebijakan banyuwangi cerdas yang pertama yaitu percairan dana yang terlambat, dana yang seharusnya dicairkan diataranya 1) keterlambatan pencairan saat penerima bantuan harus mendaftar ulang, yaitu dana yang seharusnya sudah cair bulan juli tetapi baru bisa cair bulan agustus, 2) keterlambatan pencairan yang seharusnya satu tahun sekali, namun terjadi pada keterlambatan 3 bulan. Akibatnya penerima bantuan harus mencari pinjaman dana segar untuk menutupi biaya keperluan lainnya seperti kos, buku, makan, dan lainnya. Faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang datang dari budaya menikah usia dini, hal ini lebih sering terjadi di perdesaan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk kehidupan mereka kedepan. Mereka juga beranggapan bahwa pendidikan hanya menghabiskan uang, sedangkan untuk perempuan yang terpenting hanya bisa memasak dan dandan itu sudah cukup. Hal ini yang membuat mereka berfikir tidak harus memiliki keahlian dan berpendidikan tinggi.

faktor penghambat kedua, datang dari penerima program PBC yang mengundurkan diri karena alasan tidak cocok dengan jurusan. Hal ini disebabkan pemerintah hanya memiliki koordinasi dengan tiga perguruan tinggi yaitu IAIN Jember, Universitas Negeri Jember dan Universitas Terbuka. Jadi, secara otomatis penyediaan jurusan yang ada memanglah sedikit, mungkin membuat penerima

yang awalnya berfikir ada jurusan yang diinginkan tetapi tidak ada, sehingga penerima bantuan sudah tidak bersemangat untuk melanjutkan pendidikannya.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi merupakan tahap paling penting untuk mengetahui suatu program dapat berjalan secara efektif dan sesuai rencana. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tiga hal dari unsur implementasi, *output* dan *outcome* program serta faktor pendukung dan penghambat implementasi program. Implementasi PERBUP Nomor 15 Tahun 2013 dalam rangka mendukung penjaminan keberlangsungan pendidikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi PERBUP Nomor 15 Tahun 2013 dalam rangka mendukung penjaminan keberlangsungan pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi terkait teknis pelaksanaan dilakukan mulai dari tahap sosialisasi dan penetapan penerima sampai tahap pertanggungjawaban. Pada tahap penetapan semua calon penerima harus melewati verifikasi tahap-tahap persyaratan yang sudah disosialisasikan untuk mendapatkan bantuan PBC sesuai jenis jenjang pendidikan. Untuk pengalokasian dana dan pencairan dana, pengalokasian dana PBC bersumber dari anggaran pendapatan daerah (APBD) dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, namun pada tahun ini pelaksanaan kurang efektif karena terdapat keterlambatan pencairan. Pada tahap laporan pertanggungjawaban PBC sudah berjalan semestinya yaitu seluruh

penerima bantuan PBC wajib memberikan lampiran/arsip berbentuk proposal dari penggunaan dana untuk diberikan kepada Dinas Pendidikan dan diserahkan Kepada Bupati Banyuwangi. Sedangkan implementasi monitoring PBC dilakukan dengan melihat laporan pertanggungjawaban penerima bantuan dan laporan dari perguruan tinggi yang memiliki (*memorandum of understanding*) MOU yang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sehingga dapat disimpulkan implementasi PBC belum terlaksana secara maksimal karena untuk penciran masih mengalami kendala.

2. Dukungan dan hambatan dalam kebijakan Program Banyuwangi Cerdas yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ada beraneka ragam. Faktor Pendukung dalam program banyuwangi cerdas, di antaranya: a. Tersedianya Sumber Anggaran: Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan telah mengucurkan dana lebih dari 15 miliar mulai tahun 2011-2017. Semua dana yang sudah digucurkan mampu membantu lebih dari 700 peserta didik untuk tetap melanjutkan pendidikan yang lebih baik., b. Peraturan Daerah Yang Mendukung: pelaksanaan kebijakan program banyuwangi cerdas telah di sahkan melalui PERBUP Nomor 15 Tahun 2013. Sehingga dapat dipastikan kebijakan tersebut mendapatkan dukungan penuh pemerintah dan lembaga dibawahnya sehingga kebijakan tersebut wajib dilaksakan., c. Komitmen Dan Dukungan Seluruh Stake Holder Pemerintah Kabupaten Banyuwangi: terlihat dari lamanya program kebijakan

dilaksanakan yaitu sejak tahun 2011 sampai saat ini dan berhasilnya PBC mendapatkan penghargaan Pro Poor Award tahun 2014 sebagai salah satu inovasi pembangunan dibidang pendidikan., d. Tingginya Motivasi Dari Lembaga Pelaksana PBC: motivasi lembaga pelaksana dapat terlihat seperti pembaharuan refolusi PBC dengan membuat buku inovasi sehingga masyarakat lebih mengenal PBC dan membuat masyarakat tidak bingung dengan bagaimana dan persyaratan apa untuk mendapatkan bantuan PBC., e. Peran Merta Masyarakat Kabupaten Banyuwangi: terlihat dari saling memberikan informasi antara masyarakat satu dengan yang lain dan pelaporan masyarakat kepada Dinas Pendidikan dengan adanya masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Sedangkan faktor penghambat dalam program banyuwangi cerdas, di antaranya: a. Pencairan dana yang terlambat: berupa keterlambatan anggran yang diberikan pemerintah, pencairan dana tidak tepat waktu dengan waktu yang dibutuhkan oleh penerima beasiswa., b. Budaya menikah dini: masih banyak masyarakat desa yang percara akan mitos perawan tua yang membuat mereka takut tua jika harus melanjutkan pendidikan hingga pendidikan tinggi yang menjadikan mereka memiliki kualitas pendidikan rendah., c. Mengundurkan diri karena alasan tidak cocok dengan jurusan: Sedikitnya jurusan yang disediakan oleh Dinas Pendidikan daerah sehingga ada beberapa yang merasa tidak ingin mengambil jurusan tersebut dan lebih memilih untuk mengundurkan diri.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu membuat jadwal pencairan dana dengan rapi serta melakukan rapat bersama antara Bupati, Dinas Pendidikan, BPKAD, sekolah, dan perguruan tinggi. Sehingga pelaksanaan pencairan dana dapat lebih terjadwal, berjalan cepat dan tepat pada waktunya.
2. Merubah pola pikir masyarakat desa melalui pendekatan yang dilakukan oleh relawan dari kebijakan program banyuwangi cerdas (DETAS). Pemahaman yang diberikan tentang pentingnya pendidikan yang dapat berpengaruh kuat pada keberlangsungan baik atau buruk dampak pendidikan rendah terhadap penerus mereka nantinya.
3. Segera menjalin koordinasi dengan perguruan tinggi lainnya, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Surabaya dan lain-lain. Sehingga lebih banyak pilihan jurusan yang dapat diambil oleh calon penerima beasiswa dan tidak terjadi masalah adanya calon penerima beasiswa Program Banyuwangi Cerdas mengundurkan diri karena merasa tidak suka dengan jurusan yang tersedia.
4. Segera diberikannya kartu banyuwangi cerdas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk mempermudah dalam menyusun siapa saja yang mendapatkan bantuan program banyuwangi cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-asar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Amri, S. 2013. *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar & Menengah: dalam Teori, Kosep dan Analisis*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya
- Banyuwangi. 2017. Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (online) www.banyuwangikab.go.id Diakses tanggal 7 Desember 2016
- Daryanto., Suprihatin, Agung. 2013. *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gava Media
- Dinas Pendidikan. 2017. Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (online) www.pendidikankab.go.id Diakses tanggal 28 April 2017
- Hamdi, S. 2006. *Dasar-Dasar dan Teori Administrsi Publik*. Malang. Agritek YPN
- Islamy, Irfan, M. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Keban, Y. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gava Media
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia. 2017. Website Resmi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia. (online) http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_4B619F17-97F5-4B93-BB0B-7F83B5512B0B_.pdf Diakses tanggal 7 April 2018
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
- Matland, Richar E. 1995. "Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. *Jurnal of Public Administration Research and Theory*. J-PART, Vol. 5, No. 2

- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press
- Moloeng, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: PMN
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- _____. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Buapat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas
- Purwanto, E.A & Sulistryastuti, D.R.2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
- Sagala, Syaiful. 2009. *Konsep Dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Saldana, Miles & Huberman. 2014. *Qualiti Data Analysis*. America: SAGE Publictions
- Soedomo, A. Hadi. 2008. *Pendidikan: Suatu pengantar*. Surakarta: UNS Press
- Sugandha, Dann. 1991. *Koordinasi : Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- _____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sukidin, Damai Dermadi. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo

- Tjiptoherijanto, Projono dan Mandala Manurung. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Triwijayanto, T. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Wijono, 1989. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan LPTK
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru